

**PERAN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PONGGOK KAB. KLATEN**



**Diajukan oleh:**

**Ameilia Ferlina**

**16919053**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI (S2)  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**PERAN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PONGGOK KAB. KLATEN**

**TESIS S-2**

**Program Magister Akuntansi**



**Diajukan oleh:**

**Ameilia Ferlina**

**16919053**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI (S2)  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kumala Hadi', is written over a horizontal line.

Dr. Kumala Hadi, M.Si., Ak.

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, Program Studi Program Magister Akuntansi,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis  
yang disusun oleh :

**AMEILIA FERLINA**

No. MHS. : 16919053

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**PERAN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PONGGOK KAB. KLATEN**

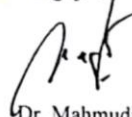
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Kumala Hadi, M.Si., Ak.

Penguji II,



Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Dr. Dekal Cahyani, S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFA.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul **“Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pongok Kab. Klaten”** merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, serta sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Maret 2020



Ameilia Ferlina

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamudillahi robbil' alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Peran Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pongok Kab. Klaten”**. Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Strata-2 Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, arahan, dan bimbingan. Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.com. (IS), Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Kumalahadi, M.SI. AK, CA, CPA Selaku dosen pembimbing tesis yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun tesis sehingga dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si. Ak., CA., CMA. Selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dalam menyusun tesis.
4. Terimakasih kepada Pemerintah Desa Pongok yang membantu penulis untuk mendapatkan data penelitian.
5. Terimakasih untuk suamiku tercinta setiap dukungan, doa dan semangatnya, akhirnya istrimu bisa menyelesaikan S2 dengan baik.
6. Terimakasih anakku tercinta Aurora telah menjadi anak yang baik dan pengertian selama mama menjalani kuliah S2.
7. Terimakasih untuk ayahanda tercinta dan mama selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus, I love u.

8. Terimakasih untuk Ibu, adik-adikku tercinta selalu memberikan semangat dan doanya.
9. Terimakasih untuk Ibu mertua dan kaka ipar yang memberikan dukungan dan doanya.
10. Lorensa bunga ayu ibu pejabat yang sudah menjadi sahabat baik, terimakasih sudah berjuang bersama-sama, love u.
11. Teman seangkatan dan sepemikiran maksy 14, terimakasih untuk bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Semua pihak yang membantu dalam proses penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Akhir kata, apabila ada saran dan kritik mengenai tesis ini, email ke **ameilia.lina@gmail.com**.

**Wassalamualaikum. Wr. Wb.**  
**Penulis,**

**(Ameilia Ferlina)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Kepemimpinan .....	12
1. Konsep Kepemimpinan .....	12
2. Tipe Kepemimpinan .....	14
3. Fungsi kepemimpinan .....	20
B. Partisipasi Publik .....	22
C. Konseptualisasi Pembangunan Desa .....	25
1. Masyarakat Desa.....	25
2. Pembangunan dari Desa.....	29
3. Anggaran Desa .....	32
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	34
D. Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42



1. Sumber Data Primer.....	42
2. Sumber Data Sekunder .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
1. Observasi .....	43
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi.....	44
E. Validitas Data .....	44
F. Analisis Data.....	45
G. Bagan Alur Penelitian.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Deskripsi Desa Ponggok .....	61
2. Program dan Capaian Pembangunan Desa Ponggok.....	76
3. Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Desa Ponggok.....	108
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	119
B. Pembahasan.....	134
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>145</b>
A. Simpulan.....	145
B. Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>154</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif.....	47
Gambar 4. 1 Peta Pembagian Padukuhan di Desa Ponggok.....	64
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	69
Gambar 4. 3 Musrebangdes Ponggok 2018 .....	80
Gambar 4. 4 Wisata Umbul Ponggok (tampak atas) .....	90
Gambar 4. 5 Wisata Umbul Ponggok (tampak bawah) .....	90
Gambar 4. 6 Wisata kolam Umbul ciblon.....	92
Gambar 4. 7 Resto Umbul ciblon .....	92
Gambar 4. 8 Toko Desa.....	93
Gambar 4. 9 Budidaya Ikan .....	96
Gambar 4. 10 Penggunaan Gedung sebagai acara Lomba Paud.....	97
Gambar 4. 11 Jalan Raya Utama Desa Ponggok .....	100
Gambar 4. 12 Toko Desa dan BUMDes Desa Ponggok .....	100
Gambar 4. 13 Pemeriksaan dan pengobatan gratis.....	103
Gambar 4. 14 Produk UMKM Desa Ponggok .....	106
Gambar 4. 15 Kegiatan UMK Nila Murni Desa Ponggok.....	107
Gambar 4. 16 Musyawarah Pengisian BPD Tingkat RW .....	116
Gambar 4. 17 Kepala Desa dan Warga sedang berdiskusi.....	119
Gambar 4. 18 Pemanfaatan Selokan air sebagai tempat Budidaya ikan .....	129
Gambar 4. 19 Kerja bakti perbaikan jalan berlubang .....	129
Gambar 4. 20 Kegiatan Nginggris day Dusun Umbulsari .....	132
Gambar 4. 21 Pelatihan Siskeudes tahun 2019 .....	132
Gambar 4. 22 Kerangka Konseptual Pembangunan Desa Ponggok .....	135

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Bagan Alur Penelitian .....	48
Tabel 4. 1 Jumlah RW dan RT.....	63
Tabel 4. 2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4. 3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	65
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	66
Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Desa Pongok.....	81
Tabel 4. 6 Kepemimpinan dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa .....	133

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Hal ini penting karena pembangunan pedesaan selama ini menjadi tema utama dalam studi ekonomi, namun dalam praktik pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat dari data kemiskinan 60% berada di wilayah pedesaan.

Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data penyajian analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi penentu keberhasilan transformasi ekonomi di Desa Ponggok. Peran kepemimpinan tersebut dapat dilihat dari empat indikator, yaitu: pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, konsiderasi individual. Secara umum empat indikator tersebut terlihat dari pemimpin mampu mengajak masyarakat untuk mau bersama membangun desa, meningkatkan berkontribusi dan swadaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran desa, mengelola perbedaan dalam proses penyusunan program dan anggaran. Sedangkan partisipasi masyarakat dilihat dari indikator kerjasama, komunikasi dan adaptif, proaktif, dan inklusif. Partisipasi masyarakat terlihat dari pelibatan semua anggota masyarakat dalam perencanaan, implementasi hingga evaluasi program pembangunan desa. Masyarakat menyumbangkan tenaga, uang, waktu dan ide dalam setiap program. Pemerintah desa juga memiliki kebijakan yang melarang warga dari luar desa untuk memiliki usaha atau menjadi pegawai di BUMDes. Peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat tersebut membuat alokasi anggaran dan program pembangunan tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya BUMDes yang bergerak di bidang wisata dan pertanian, program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dan berbagai penghargaan lokal dan nasional yang diraih.

Kata Kunci: Kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa

## ABSTRACT

This study aims to analyze the role of leadership and community participation in village development, a case study in Ponggok Village, Klaten Regency. This is important because rural development has been the main theme in economic studies, but in practice development has not gone well. This condition can be seen from the Indonesian poverty data, 60% are in rural areas.

The research is a descriptive study using a qualitative approach. Data collection is done by observation, interviews, Focus Group Discussion (FGD) and review of documentation. Data validity has used source triangulation techniques. Qualitative data analysis has been carried out with the stages of data collection, data reduction in the presentation of data analysis, and drawing conclusions.

The research results showed that the role of leadership and community participation in village development was a determinant of the success of economic transformation in Ponggok Village. The role of leadership can be seen from four indicators, namely: ideal influence, motivational inspiration, intellectual stimulation, individual consideration. In general, the four indicators can be seen from leaders able to invite the community to want to jointly develop the village, increase contributions and self-help to overcome the limitations of the village budget, manage differences in the program and budget formulation process. Whereas community participation was seen from the indicators of cooperation, communication and adaptive, proactive, and inclusive. Community participation can be seen from the involvement of all community members in the planning, implementation and evaluation of village development programs. The community donated energy, money, time and ideas in each program. The village government also has a policy that prohibits residents from outside the village to have a business or become employees at BUMDes. The role of leadership and community participation makes budget allocations and development programs right on target. This was demonstrated by the development of BUMDes engaged in tourism and agriculture, empowerment programs that can increase the capacity of rural communities, and various local and national awards achieved.

Keywords: Leadership, community participation, and village development.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Pembangunan pedesaan selama ini menjadi salah satu topik yang kerap disinggung dalam praktek dan teori pembangunan ekonomi serta otonomi daerah di Indonesia. Banyak program dan proyek pemerintah hanya berputar pada infrastruktur, industri manufaktur dan pertambangan atau jasa keuangan. Terlebih lagi masyarakat pedesaan menghadapi masalah sosio-ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade karena perubahan pola produksi, manajemen, dan pasar dari produk-produk pertanian atau agrikultur (Hernandez dan Moisa, 2011; Lurie dan Brekken, 2017). Padahal, tujuan utama pembangunan yaitu meningkatkan distribusi pembangunan dan program lainnya pada wilayah pedesaan (Hehamahua, 2015). Artinya, point utama pembangunan yaitu wilayah pedesaan, yang bertumpu pada paradigma bahwa penguatan potensi lokal merupakan esensi dari tujuan otonomi daerah, belum sepenuhnya terwujud.

Banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam berbagai bidang, terutama kebutuhan dasar (Warsono dan Ruksamin, 2014). Dalam bidang infrastruktur, masih banyak terdapat fasilitas khususnya jalan dan jembatan yang masih kurang memadai. Keterbatasan insfrastruktur di pedesaan akan menghambat perekonomian dan akses masyarakat. Kesenjangan pelayanan infrastruktur antar

wilayah mengakibatkan minimnya kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan masyarakat desa yang rendah, serta UMR yang rendah dibandingkan dengan masyarakat kota yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang berbeda jauh dari masyarakat kota. Dalam bidang kesehatan, kurangnya tenaga medis yang ada membuat pelayanan kesehatan kurang maksimal. Terlebih lagi, masalah fasilitas posyandu yang masih minim membuat bidan dan kader posyandu kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi ibu dan anak.

Pembangunan desa dibutuhkan dalam rangka peningkatan potensi dan pemenuhan kebutuhan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Putra, Pratiwi, dan Suwondo, 2016). Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Oleh karenanya, reposisi pembangunan desa menjadi urgen karena jumlah desa di Indonesia mencapai 74.091 desa (World Bank, 2015) dan lebih dari 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan (Data Sensus Badan Pusat Statistik (BPS), 2010).

Reposisi masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat melalui berbagai bentuk. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan

masyarakat desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa euforia tersendiri bagi para pemangku kepentingan desa. Dengan UU tersebut, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintah desa. UU tersebut memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan kata lain, desa ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. UU Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kenyataannya, beberapa perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya masih belum mampu membuat desa mampu mengembangkan ekonomi desa. Handra, dkk (2017) menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara



umum sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan (84 persen), sementara itu penggunaan bagi pengembangan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya. Dengan kata lain, ketersediaan dana untuk desa belum mampu mengatasi masalah ekonomi pedesaan.

Ketidakoptimalan reposisi masyarakat desa dalam pembangunan tersebut disinyalir karena desa belum dapat memaksimalkan peran pemimpin dan partisipasi masyarakat (Boonperm, Haughton, dan Khandker, 2013; Smit, Leeuwen dan Florax, 2015). Slight, Adams dan Sherren (2016) mengatakan bahwa dalam pembangunan desa, diperlukan dukungan keuangan dan kebijakan yang dapat menciptakan inovasi dan motivasi bagi masyarakat pedesaan yang berasal dari ketersediaan kepemimpinan yang memadai. Pemimpin yang tidak akuntabel, menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan desa (Warsono dan Ruksamin, 2014).

Partisipasi masyarakat juga tidak bisa lagi hanya sebagai masukan dalam perencanaan, namun harus terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Karena jika pemerintah masih bersifat *inward looking* (hanya berorientasi pada jajaran birokrasi pemerintahan), maka partisipasi publik dalam kebijakan hanya akan menjadi *selogan kosong* (Santoso, Hanif, dan Gustomy, 2004). Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga

setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dibutuhkan peran pemimpin yang dapat memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Suroso dkk (2014), faktor yang mampu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di antaranya adalah usia, pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal di desa tersebut, tingkat komunikasi dan kepemimpinan. Faktor kunci dan utama yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kepemimpinan (Pasolong, 2008). Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat menghadapi masalah kompleks, yang dapat dilihat dari tingkat perekonomian yang tergolong miskin, mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, yakni sejauh mana kepala desa merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pelaksana dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui

pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Salah satu yang dapat diusahakan oleh masyarakat desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan optimalisasi Dana Desa melalui pembentukan perusahaan atau badan usaha. Zheng, Batuo, dan Shepherd (2017) mengatakan bahwa dalam meningkatkan ekonomi lokal yang berdampak masif memerlukan perusahaan lokal yang khas sesuai dengan potensi yang dikelola mirip dengan *state own enterprise* atau badan usaha milik negara.

Desa ponggok merupakan salah satu desa yang berhasil dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Sejak tahun 2009 desa ponggok mulai mengalami perubahan menuju lebih baik dibawah pimpinan kepala desa Junaedi Mulyono. Melalui komunikasi yang dibangun dengan baik bersama masyarakat desa maka terciptalah inovasi untuk merubah Desa Ponggok. Inovasi baru dapat terwujud salah satunya yaitu dengan melalui proses komunikasi yang dibangun oleh pemimpin kepada anggotanya atau masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyebaran ide baru tersebut mampu menempatkan masyarakat pada posisi kuat dan berdaya, sebab mereka bisa menjadi penggerak perubahan baik untuk diri mereka sendiri maupun lingkungannya. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Bapak Juanedi Mulyono mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program kerjanya untuk mengubah desa ponggok menjadi desa yang lebih baik. Dengan inisiasi dan inovasi kepala desa beserta masyarakat telah mampu melihat potensi desa yang ada dan berhasil mengelola dengan inovasi yang menghasilkan omset yang luar biasa. Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dilakukan oleh kepala desa untuk menumbuhkembangkan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat maka kepala Desa Ponggok tahun 2009 mendirikan BUMDes Tirta mandiri untuk mengelola sumber daya alam yang ada Desa Ponggok.

Melihat potensi air yang berlimpah, di mana ada 9 mata air alami yang dimiliki desa ponggok pemerintah desa dan masyarakat Desa Ponggok memanfaatkan hal tersebut untuk dikembangkan menjadi objek wisata yang sekarang kita kenal dengan sebutan umbul ponggok. Dengan memanfaatkan dana desa yang setiap tahunnya diterima dari pemerintah pusat dan investasi dari masyarakat desa maka didirikanlah tempat wisata umbul ponggok.

Tempat wisata ini menghadirkan wisata air yang tidak biasa, di mana sebuah inovasi diperlukan untuk membuat sesuatu berbeda, kreatifitas yang luar biasa terbukti dari wisata ini, dimana jika biasa melihat wisata air dengan kolam renang dan *water boom* maka berbeda dengan wisata ini. Umbul ponggok hadir dengan konsep baru yang lagi tren yaitu wisata foto bawah air. Pengunjung tidak hanya berfoto, namun juga para pengunjung juga dapat *snorkeling* dengan suguhan pemandangan ikan yang ada di kolam.

Wisata pemandian umbul ponggok ini mampu membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan, wisata ini mampu menarik wisatawan hingga 40 ribu orang per bulan. Pada tahun 2017 wisata ini dapat meraup omset hingga 6,5 milyar rupiah pertaunnya. Hal ini tentu berbanding terbalik ketika kita melihat 10 tahun lalu, dimana umbul ponggok hanya pemandian tua yang tidak memiliki daya tarik dengan omset hanya 5 juta rupiah pertahunnya. Desa ponggok sekarang tidak hanya memiliki umbul ponggok, tetapi memiliki 3 tempat wisata air lainnya yaitu umbul sigedang-kapilaler, umbul ingas (*cokrotulung*) dan umbul besuki.

Desa ponggok memang memiliki kekayaan air yang berlimpah. Sumber air yang berlimpah ini tentu membawa banyak manfaat, selain untuk membuka tempat wisata air, berbagai keperluan masyarakat seperti bahan baku air minum rumah tangga & industry, pengairan sawah & perkebunan dapat terpenuhi dengan sumber air yang ada, sumber air bersih ini dikelola oleh PDAM. Selain untuk keperluan di atas, sumber air yang melimpah yang mengalir di saluran air yang ada di depan rumah

warga juga tidak luput dari perhatian kepala desa, hal ini membuat kepala desa berinisiasi untuk memiliki program satu rumah satu empang. Hal ini bertujuan untuk dapat mengembangkan lagi ekonomi masyarakat. Dengan adanya empang ini maka warga dapat membudidayakan ikan tawar. Kini setiap minggunya masyarakat Desa Ponggok dapat memanen 7 ton ikan air tawar.

Desa Ponggok yang dulunya desa tertinggal mampu berubah menjadi desa yang maju semenjak adanya inovasi kepala desa dengan mendirikan BUMDes Tirta Mandiri pada tahun 2009. Tujuan pendirian BUMDes Tirta Mandiri yaitu untuk mengelola potensi desa seperti wisata umbul ponggok, kios desa, ponggok ciblon, penyewaan gedung pertemuan, *event organizer* dan budidaya perikanan. Pada tahun 2017 pendapatan BUMDes Tirta Mandiri telah mencapai Rp 14 milyar rupiah dan memberikan sumbangan Pendapatan Asli Desa (PADES) sekitar Rp 700 juta rupiah (sumber Tempo.co 2017).

Desa Ponggok awalnya sempat mengalami krisis ekonomi serta sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di desa yang berdampak pada masyarakat yang menganggur. Hal itu terbukti dengan tingkat kemiskinan di Desa Ponggok dulunya sekitar 45% sedangkan untuk tingkat pengangguran masyarakat sekitar 40% dan menjadi salah satu desa termiskin di Kabupaten Klaten. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran kepemimpinan dalam pembangunan Desa Ponggok?
2. Bagaimana Peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Ponggok?
3. Mengapa Desa Ponggok Lebih maju dari pada Desa lain dalam pengoptimalan potensi Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Klaten bahwa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pembangunan desa

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak dalam hal ini yang berkepentingan dalam pembangun desa
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dalam memahami bahwa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangun desa terlebih bermanfaat dalam ranah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Akuntansi.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kepemimpinan**

##### **1. Konsep Kepemimpinan**

Di era demokrasi, setiap pemimpin memiliki daya tarik dan popularitas tersendiri. Seorang pemimpin yang tidak melakukan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dianggap merupakan pemimpin yang baik. Pemimpin diharapkan menjadi tokoh yang selalu memberikan solusi pada setiap persoalan yang ada. Dalam keadaan yang terjepit secara finansial dan kelembagaan dituntut untuk menjalankan program.

Kepemimpinan menurut House dalam bukunya Gary Yuki adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi (Yuki, 2010). George R. Terry dalam bukunya Miftah Thoha merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi (Thoha, 2006). Struktur organisasi adalah susunan unit atau satuan kerja atau fungsi-fungsi yang dijabarkan dari tugas atau kegiatan pokok suatu organisasi, dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan akan dianggap baik jika mampu memenuhi fungsinya, walaupun tidak semua kepemimpinan memberikan peluang yang sama untuk mewujudkannya.

Fungsi kepemimpinan menurut Hill dan Carol (1997) memiliki dua dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya
- b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemimpin.

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan. Kepemimpinan juga sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan seolah-olah dipaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor seperti struktur atau tantangan, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi.

Kepemimpinan ada dalam setiap sosial, karena adanya interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan yang di pengaruhi, pada dasarnya seorang dapat disebut pemimpin jika dapat mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin yang memperoleh respek dan kepercayaan berarti ia telah berada pada pencapaian tertinggi.

## 2. Tipe Kepemimpinan

Banyak penelitian mengenai kepemimpinan yang dibahas dari berbagai perspektif yang memfokuskan pada perbedaan karakteristik antar pemimpin dan pengikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat satupun sifat atau watak atau kombinasi antara sifat atau watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tentang kemampuan para pemimpin, maka para peneliti merubah masalah penelitian pada pengaruh situasi terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin. Dengan berkembangnya zaman, ditemukan type baru dalam kepemimpinan yaitu tipe transformasional. Type ini dianggap sebagai type terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional ini mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya, dan kontingensi.

Kreitner (2003) menyebutkan adanya empat teori kepemimpinan yang ada *sejak tahun 1950-an hingga kini. Keempat teori kepemimpinan tersebut adalah: Trait Theory, Behaviour Styles Theory, Situational Theory, dan Transformational Theory.* Selain empat teori kepemimpinan tersebut masih terdapat empat teori kepemimpinan yang secara luas dikenal dalam kepustakaan manajemen yakni: *Great Man Theory, Participative leadership Theory, Contingency Theory, & Transactional Leadership Theory. Participative Leadership Theory & Contingency Theory* masing-masing dapat digabung ke teori kepemimpinan *Behavioral Styles Theory dan Situational Theory.*

a. *Great Man Theory*

Menurut teori kepemimpinan ini seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri istimewa yang mencakup: karisma, kecerdasan, kebijaksanaan dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Karisma sendiri menunjukkan kepribadian seseorang yang dicirikan oleh pesona pribadi, daya tarik, yang disertai dengan kemampuan komunikasi interpersonal dan persuasi yang luar biasa. Teori kepemimpinan ini sebagian besar bersandar pada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Carlyle di abad 19 yang pernah menyatakan bahwa sejarah dunia tak lain adalah sejarah hidup orang-orang besar. Menurutnya, seorang pemimpin besar akan lahir saat dibutuhkan sehingga para pemimpin ini tidak bisa diciptakan.

b. *Trait Theory*

Teori kepemimpinan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari *Great Man Theory* yang mengatakan bahwa para pemimpin dilahirkan dan bukan diciptakan (*leader are born and not made*). Tetapi sejalan dengan pemikiran mazhab behavioralis, pada peneliti di tahun 1950-an berkesimpulan bahwa karakteristik pemimpin tidak seluruhnya merupakan bawaan sejak lahir, namun diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Karena itu mereka berkesimpulan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat dipelajari. Riset mereka menunjukkan bahwa ada

karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehubungan dengan kepemimpinan efektif, yaitu: Kecerdasan, Pengetahuan & keahlian, Dominasi, Percaya diri, energi yang tinggi, Toleran terhadap stress, Integritas & kejujuran, Kematangan.

*c. Behavioral Styles Theory*

Selama perang dunia II studi mengenai teori kepemimpinan mengalami perubahan arah yang signifikan dari mempelajari ciri-ciri individu menjadi pola perilaku pemimpin yang disebut dengan leadership styles. Dengan demikian maka fokus beralih dari “siapa pemimpin itu” menjadi “bagaimana seorang pemimpin berperilaku atau menjalankan gaya kepemimpinan” Berbagai penelitian awal menyimpulkan adanya tiga gaya kepemimpinan yaitu:

- gaya kepemimpinan otoriter (*authoritarian leadership style*)
- gaya kepemimpinan demokratis (*democratic leadership style*)
- gaya kepemimpinan *laissez-faire* (*laissez-faire leadership style*)

*d. Situational Theory*

Para peneliti yang menganut aliran teori kepemimpinan ini mengatakan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan sangat tergantung kepada situasi yang melingkupinya. Oleh karena itu, mereka mempunyai asumsi bahwa kepemimpinan yang berhasil akan terjadi apabila gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai

dengan situasi. Kinerja seorang pemimpin bergantung kepada dua faktor yang saling terhubung yaitu:

- 1) Situasi, sejauh mana situasi yang ada memberikan kendali & pengaruh agar pekerjaan dapat diselesaikan
- 2) Motivasi, apa motivasi dasar dari pemimpin. Apakah self esteem-nya tergantung dari penyelesaian tugas (*task motivated*) atau hubungan (*relationship motivated*).

*e. Transactional Leadership Theory*

Menurut teori kepemimpinan ini, karyawan akan termotivasi oleh imbalan maupun hukuman. Seorang pemimpin akan dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif apabila ia mampu mengembangkan struktur kerja yang jelas sehingga para manajer akan dapat merumuskan dengan jelas apa yang harus mereka lakukan dan dibutuhkan oleh para bawahannya serta memberi imbalan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Demikian pula sebaliknya, dalam teori kepemimpinan ini, sang manajer dapat memberikan hukuman bila karyawan tidak berhasil memenuhi standar kinerja yang diberikan kepadanya.

*f. Transformational Leadership Theory*

Teori kepemimpinan ini didasari oleh hasil penelitian mengenai perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi (*transformational leader*) mampu memberikan inspirasi

kepada yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu yang melebihi apa yang telah direncanakan organisasi. Ia juga seorang pemimpin yang visioner yang mengajak orang lain bergerak untuk mengikuti visinya. Mereka mengandalkan karisma dan kewibawaan (*referent power*) dalam menjalankan kepemimpinannya.

Bass dan Avolio (2004) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yaitu:

1) Pengaruh idealis

Pemimpin transformasional berperilaku dengan cara memengaruhi pengikut mereka sehingga pengikut dapat mengagumi, menghormati, sehingga dapat dipercaya. Ada dua aspek yang dilihat untuk pengaruh ideal ini, yaitu: perilaku pemimpin dan unsur-unsur yang dikaitkan dengan pemimpin. Selain itu, pemimpin yang memiliki banyak pengaruh ideal adalah bersedia untuk mengambil risiko dan konsisten dan tidak sewenang-wenang. Mereka dapat diandalkan untuk melakukan hal yang benar, menunjukkan standar perilaku etika dan moral.

2) Motivasi yang memberi Inspirasi.

Pemimpin transformasional berperilaku dengan cara yang memberikan motivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka dengan memberikan arti dan tantangan untuk bekerja. Semangat tim terangsang, antusiasme dan optimisme akan ditampilkan. Sehingga, pemimpin mendapatkan pengikut

yang aktif terlibat dengan pola komunikasi yang intens serta menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan visi bersama.

### 3) Stimulasi Intelektual

Pemimpin transformasional mendorong upaya pengikut mereka untuk menjadi inovatif dan kreatif dengan mempertanyakan asumsi, reframing masalah, dan mendekati situasi lama dengan cara baru. Kreativitas didorong. Tidak ada kritik publik terhadap kesalahan individu anggotanya. Ide-ide baru dan solusi masalah secara kreatif dikumpulkan dari pengikut, termasuk dalam proses mengatasi masalah dan menemukan solusi. Pengikut didorong untuk mencoba pendekatan baru, dan ide-ide mereka tidak dikritik karena mereka berbeda dari ide-ide para pemimpin.

### 4) Konsiderasi Individu

Pemimpin transformasional memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masing-masing pengikut individu untuk pencapaian dan pertumbuhan dengan bertindak sebagai pelatih atau mentor. Pengikut dan rekan yang potensial dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Perilaku pemimpin menunjukkan penerimaan terhadap perbedaan individu (misalnya, beberapa karyawan menerima lebih banyak dorongan, otonomi lebih banyak, standar yang jelas). Komunikasi dua arah didorong serta Interaksi dengan pengikut dipersonalisasi (misalnya, pemimpin ingat percakapan sebelumnya, adalah menyadari masalah individu, dan melihat individu sebagai manusia seutuhnya bukan hanya sebagai seorang karyawan).



Pemimpin lebih banyak mendengar para pengikutnya. Pelimpahan tugas sebagai sarana untuk mengembangkan tugas yang didelegasikan dengan memantau apakah para pengikut perlu arahan atau dukungan dan untuk menilai kemajuan.

Banyak peneliti menyatakan bahwa yang sepakat bahwa model kepemimpinan transformasional merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan transformasional mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan watak, gaya dan kontingensi, dan juga konsep kepemimpinan transformasional menggabungkan dan menyempurnakan konsep-konsep terdahulu yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosiologi.

### **3. Fungsi kepemimpinan**

Seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat memiliki fungsi-fungsi manajerial dengan baik. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Siagian (2013) tentang fungsi-fungsi manajerial yang mutlak perlu dikuasai oleh seorang manager atau pemimpin, yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

- b. Pengorganisasian, yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- c. Penggerakan, yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis
- d. Pengawasan, yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya
- e. Penilaian, yaitu pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Peran kepemimpinan sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan maupun kemunduran perekonomian suatu masyarakat. Peluang kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan seorang pemimpin yang kuat dalam masyarakat yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk berubah yang lebih baik. Menggerakkan masyarakat kearah kemajuan merupakan sesuatu hal yang penting namun, untuk melakukan hal itu dibutuhkan aspek kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin. Rasa hormat, kepercayaan, dan dihargai akan berjalan

seiring waktu ketika pemimpin mampu memberikan solusi atas masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat. Seorang pemimpin juga harus memiliki visi dan misi yang jelas serta memiliki pemahaman tentang pengetahuan lokal daerah yang dipimpin dengan baik sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan.

## **B. Partisipasi Publik**

Partisipasi publik dalam proses pembangunan berfungsi sebagai penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan akhirnya penerimaan kembali hasil pembangunan. Sebagai masukan pembangunan, partisipasi berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sedangkan keluaran, partisipasi merupakan keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengikutsertakan masyarakat dalam mewujudkannya sehingga masyarakat memiliki dan ikut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Kencana (2002) mengatakan bahwa

partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan desa. Dengan demikian maka masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pembangunan desa untuk kepentingan bersama. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Nordholt, 1987), partisipasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana caranya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan dengan menyumbangkan beberapa sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi kegiatan tertentu, bagian manfaat dari program pembangunan, dan atau keterlibatan masyarakat dalam upaya evaluasi program. Maka partisipasi dilakukan dengan

melihat keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga pemeliharaan serta pemanfaatan hasil kegiatan.

Namun kenyataannya dalam mewujudkan kegiatan yang partisipatif memiliki proses yang panjang dan tidak mudah karena terhalang oleh beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Seringkali kegiatan partisipatif terkendala oleh tidak adanya keinginan keikutsertaan masyarakat untuk terjun dalam kegiatan tersebut. Menurut Ndraha (1982) partisipasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Adanya keterlibatan mental dan emosional dari individu yang berpartisipasi
2. Adanya kesediaan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan untuk mencapai tujuan bersama
3. Adanya kesediaan untuk bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, serta partisipasi ditentukan oleh keterlibatan masyarakat untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, bukan ditentukan pihak lain.

Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan adalah salah satu syarat mutlak, bagaimana tidak, pembangunan dikatakan tidak berhasil jika tanpa partisipasi masyarakat di dalamnya. Proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi mencerminkan upaya kemandirian daerah yang transparan dan akuntabel antara komponen pemerintah, masyarakat, yang dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki. Dalam

mengevaluasi partisipasi publik, penelitian ini menggunakan indikator menurut Enserink, Witteveen dan Lie (2009), sebagai berikut:

1. Kerjasama, selama proses pembangunan, seluruh elemen stakeholder harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Termasuk juga penganggaran dan pelaporan keuangan.
2. Komunikatif dan Adaptif, komunikasi antar masyarakat dan pemerintah harus dua arah, sehingga pemahaman visi bersama mudah tercapai.
3. Proaktif, partisipasi harus dilakukan secara proaktif oleh masyarakat tanpa ada paksaan dengan melibatkan sumber daya modal secara sukarela.
4. Inklusif, proses partisipasi harus melibatkan seluruh elemen tanpa adanya diskriminasi dan setara.
5. Edukatif, proses partisipasi juga dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam memberikan pendapat, demokratisasi, ekonomi dan lain sebagainya.

### **C. Konseptualisasi Pembangunan Desa**

#### **1. Masyarakat Desa**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu: kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

(Slamet, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003). Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, structural dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah.

Budaya merupakan salah satu faktor yang membentuk pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Maju tidaknya sebuah desa akan bergantung pada pola pikir masyarakat itu sendiri untuk menerima atau menolak adanya perubahan serta pembangunan. Unsur budaya mempengaruhi tingkah laku serta aktifitas masyarakat, apakah mereka akan bertingkah laku positif atau negatif. Begitu pula dengan kemauan, akan terwujud jika budaya suatu masyarakat terbiasa untuk melakukan kegiatan yang akan membawa mereka mencapai tujuan bersama.

Menurut Koentjaraningrat, bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah:

- a. Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya.

b. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai.

c. Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.



d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

f. Sistem Religi

asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

g. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan.

Proses perubahan ekonomi masyarakat terkait dengan budaya tradisional itu sendiri. Menurut Dove (1988) dalam penelitiannya bahwa budaya lokal dan agama di beberapa suku ternyata sangat berperan dalam proses pembangunan dan dinamika sosial perkembangan masyarakat. Karena dalam kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari agama dan budaya, bahkan nilai-nilai budaya tersebut merupakan faktor mental yang menentukan perbuatan atau aktifitas seorang maupun kelompok masyarakat (Koentjaraningrat, 1971).

## **2. Pembangunan dari Desa**

Menurut Soedjono Hoemardani (1981), pembangunan memiliki pengertian adanya suatu usaha untuk memperkembangkan dan memperbaharui, mengganti yang tidak atau yang kurang baik dengan yang baik, membuat yang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik diusahakan menjadi lebih baik. Keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan turut berkontribusi terhadap terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Daerah perkotaan, terutama kota-kota besar di Indonesia mulai kewalahan menghadapi arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan.

Pemerintah pada berbagai kota besar setiap tahunnya dipusingkan oleh permasalahan yang muncul sebagai dampak dari tingginya arus masyarakat desa yang pindah ke kota. Memang perpindahan penduduk dari desa ke kota menimbulkan berbagai dampak di daerah perkotaan. Kedatangan penduduk desa di daerah perkotaan secara permanen selain membawa dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah timbulnya dampak negatif akibat migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Dampak negatif yang ditimbulkan akan menambah permasalahan di daerah perkotaan, antara lain terjadi peledakan jumlah penduduk, munculnya berbagai masalah sosial seperti peningkatan pengangguran, peningkatan masyarakat miskin, gelandangan, tingginya kejadian kriminal dan sebagainya.

Upaya pemerataan pendapatan yang selama ini dipertanyakan sebenarnya dapat dilakukan dengan paradigma otonomi daerah. Kebijakan pada saatnya akan memperlihatkan perubahan dalam hubungan negara-masyarakat sipil sebagai fungsi pemerintahan yang diperkecil ke tingkat pedesaan. Hal tersebut termasuk peningkatan penekanan pada partisipasi sebagai dasar formulasi kebijakan, perbedaan tipe pembangunan dari kemitraan dalam pemerintah daerah dan peran baru bagi organisasi masyarakat (Beaumont dan Nicholls, 2008). Perkembangan terakhir yang dapat dilihat yaitu dimulainya pembangunan ekonomi dimulai dari kebijakan dan perencanaan pada skala regional, termasuk juga desa sebagai bagian terkecil (Wetzstein, 2007).

Pergeseran tanggungjawab yang lebih luas antara pemerintah lokal dan regional dalam pembangunan perkotaan menjadi serangkaian inisiatif gabungan dari stakeholder lokal, regional dan pemerintah pusat. Stakeholder yang terkait ini memiliki tingkatan peran yang berbeda dan ditambah dengan peran yang dimiliki kelompok bisnis. Dalam pergeseran yang lebih luas tanggung jawab lokal dan regional untuk pertumbuhan regional telah menjadi serangkaian inisiatif bersama.

Keterkaitan desa-kota perlu dipahami dalam suatu rentang wilayah yang relatif tanpa batas. Karenanya, para analis pembangunan tidak perlu lagi membuat dikotomi antara pembangunan desa dan pembangunan kota. Demikian halnya dengan pemahaman yang komprehensif tentang dimensi ekonomis dan finansial, spasial dan sosial, serta dimensi-dimensi relevan lainnya dalam pembangunan regional. Semuanya harus diperhatikan dan diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kecenderungan lama akan pengkotak-kotakan analisis perlu segera ditinggalkan.

Salah satu tujuan pembangunan perdesaan adalah mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi dan industrialisasi perdesaan, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, penyediaan bahan pangan dan bahan lain untuk kebutuhan konsumsi dan produksi melalui: keterkaitan wilayah perdesaan dan perkotaan, penguatan pengelolaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan. Sementara itu pembangunan perkotaan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada daerah sekitarnya, perdesaan dan kaitan dengan sistem ekonomi nasional dan global yang

menjamin kelangsungan hidup ekonomi lokal dan kesempurnaan fungsi ekonomi nasional dalam mensejahterakan masyarakat umum.

Didasarkan pada tujuan tersebut, dalam pembangunan ekonomi ada beberapa indikator pembangunan ekonomi yang meliputi: (1) prasarana dan sarana sistem agribisnis; (2) pengembangan industri kecil dan rumah tangga; (3) penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat; (4) pengembangan jaringan produksi dan pemasaran; (5) penguasaan teknologi tepat guna; (6) pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Disamping keenam komponen dalam program prioritas tersebut, secara khusus pembangunan perdesaan harus juga menekankan pada upaya peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin. Pendekatan regional daerah akan mengintegrasikan kota dan desa dalam pembangunan mengarah pada berkembang secara bersama dan sejalan.

### **3. Anggaran Desa**

Mangkoesoebroto (2001) menyatakan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa dari pengeluaran pemerintah, hal itu mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Belanja pemerintah daerah meningkat karena tuntutan belanja pelayanan publik semakin meningkat. Permintaan tumbuh karena dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang membutuhkan layanan dari pemerintah. Sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan

oleh (Soetrisno, 1988), dominasi kepala desa dalam program pembangunan pedesaan, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat pedesaan yang pada akhirnya menyebabkan kematian kemerdekaan politik pembangunan desa. Dana Desa sebenarnya sangat berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena Desa adalah di garis depan pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik, regulasi publik, dan pemberdayaan.

Rozaki, et.al (2005) menjelaskan sesungguhnya kebijakan alokasi dana untuk desa memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana untuk desa berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki hak otonomi berdasarkan kewenangan yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dipahami dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang desa, sehingga ada keragaman susunan desa menyebabkan jenis, bentuk, dan isi dari otoritas sangat bervariasi dari satu daerah dan daerah lain sesuai dan kebiasaan masyarakat setempat. Penggunaan Dana

Desa tidak terbatas untuk membagi dana, tetapi juga menyiratkan pergerakan penduduk desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini tentu persiapan teknis yang diperlukan matang, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga desa dan kabupaten. Tentu saja, dibutuhkan pemahaman dan kesepakatan dari berbagai pihak, karena masing-masing kabupaten dan desa akan memiliki karakteristik masing-masing. Dana Desa akan mendorong pelaksanaan otonomi desa, serta upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dan desa, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat pedesaan untuk dapat melaksanakan pembangunan desa. Dengan Dana Desa difokuskan pada pengembangan masyarakat pedesaan diharapkan mendorong beberapa masalah penanganan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan secara mandiri tanpa harus menunggu lama datang dari program pemerintah daerah.

#### **4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi asli desa. Sutopo (dalam Hastowiyono dan Suharyanto, 2014) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hadirnya BUMDes tersebut untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa (PP No 72/2005, Pasal 78 Ayat 1). Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Ketentuan ini bersifat mandatory, bukan voluntary sehingga pengelolaan BUMDes sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Permendagri No 38/2010 tentang BUMDes).

Kemudian, pada Pasal 87 ayat (1) dalam UU Desa dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa; BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan (ayat 2); dan (ayat 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam UU tersebut mengandung pengertian bahwa desa diberi kesempatan, hak dan



kewenangan untuk mendirikan BUMDesa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa (Sidik, 2015).

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (PKDSP, 2007) adalah (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama; (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat; (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha; (5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun; (6) Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan (7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan

kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang.

Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014), adalah (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan bersama-sama dengan serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, fasilitas dan bantuan yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk

swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ponggok akibat urgensi dalam praktek untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang dialami oleh beberapa desa di Indonesia. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang terjadi di Desa Ponggok, penelitian ini menggunakan enam indikator pengukuran yaitu:

1. Prasarana dan sarana sistem agribisnis
2. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga
3. Penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat
4. Pengembangan jaringan produksi dan pemasaran
5. Penguasaan teknologi tepat guna
6. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

Capaian baik keberhasilan maupun kegagalan, pembangunan desa menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa. Seperti argumen yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam keberhasilan pembangunan desa. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar tercapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan indikator kepemimpinan transformasional sebagai model kepemimpinan yang dapat menggambarkan objek penelitian, indikator tersebut adalah pengaruh ideal (*idealized influence*), motivasi inspirasi (*inspirational*

*motivation*), stimulasi intelektual (*intellectual stimulation*), dan konsiderasi individu (*individualized consideration*).

1. Pengaruh ideal

Merupakan sosok ideal yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi pegawai dan masyarakat, dipercaya, dihormati dan mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan desa.

2. Motivasi inspirasi

Dapat memotivasi seluruh pegawai dan masyarakat untuk memiliki komitmen terhadap visi desa dan mendukung semangat team dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan di desa.

3. Stimulasi intelektual

Kepala desa dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan pegawai dan masyarakat dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk menjadikan desa ke arah yang lebih baik.

4. Konsiderasi individu

Kepala desa dapat bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi pegawai dan masyarakat.

Dalam mengevaluasi partisipasi publik, penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kerjasama, selama proses pembangunan, seluruh elemen stakeholder harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan,

implementasi dan evaluasi. Termasuk juga penganggaran dan pelaporan keuangan.

2. Komunikatif dan Adaptif, komunikasi antar masyarakat dan pemerintah harus dua arah, sehingga pemahaman visi bersama mudah tercapai.
3. Proaktif, partisipasi harus dilakukan secara proaktif oleh masyarakat tanpa ada paksaan dengan melibatkan sumber daya modal secara sukarela.
4. Inklusif, proses partisipasi harus melibatkan seluruh elemen tanpa adanya diskriminasi dan setara.
5. Edukatif, proses partisipasi juga dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam memberikan pendapat, demokratisasi, ekonomi dan lain sebagainya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena (Strauss dan Corbin, 2007). Menurut (Creswell 2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004). Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dari pihak-pihak yang terkait. Sejalan dengan apa yang dijelaskan di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deduktif.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pongok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 2 April 2019. Lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keberhasilan kepemimpinan kepala Desa Pongok dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Serta melihat penghargaan Desa Pongok

mendapatkan piagam penghargaan sebagai desa wisata terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Menjadi desa percontohan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam Kementerian Desa, Wilayah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **C. Sumber Data**

Lofland yang dikutip oleh Moleong (2004) menjelaskan sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, sedangkan dokumen dan lain-lainnya adalah data tambahan. Sumber data yang digunakan peneliti antara lain:

#### **1. Sumber Data Primer**

Informan diambil dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam tentang obyek penelitian dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap (*purposive sampling*) (Sutopo 2002). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

- a. Kepala Desa Ponggok sebagai pemimpin Desa Ponggok
- b. Sekertaris Desa Ponggok
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PERENCANAAN)
- e. Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR UMUM)
- f. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
- g. Kadus (kepala dusun) tiap-tiap dusun di Desa Ponggok
- h. Masyarakat Desa Ponggok sebagai bagian dari proses pembangunan desa.

- i. Tokoh masyarakat Desa Ponggok
- j. Ketua BUMDes Tirta Mandiri
- k. Direktur PT. Boga Raharja
- l. Anggota PKK Desa Ponggok
- m. Pedagang Yang ada di tempat wisata
- n. Petani ikan Desa Ponggok

## **2. Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah dokumen Buku Renstra, RPJMDes, APBDDes, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa yang dianggap perlu dan relevan dalam penelitian ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

### **1. Observasi**

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan (Yin, 2003). Observasi dilakukan dengan mengunjungi obyek observasi, merekam dan mencatat informasi dari aktivitas-aktivitas di Desa Ponggok. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pembangunan Desa Ponggok dan melihat karakteristik kepemimpinan kepala desa dan karakteristik budaya masyarakat Desa Ponggok. Observasi juga dilakukan dengan tinggal/ menetap di Desa Ponggok sebagai cara untuk lebih memahami budaya masyarakat dan gaya kepemimpinan kepala desa.



## **2. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) sebagaimana dijelaskan oleh (Sutopo 2002) yaitu wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan memilih konteks dan waktu yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam. Wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. Data informan, tanggal dan pedoman wawancara terdapat di lampiran.

## **3. Dokumentasi**

Selama proses penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, internet, laporan lembaga) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, surat dan e-mail) (Creswell, 2013). Dokumen yang dimaksud yaitu laporan-laporan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Desa Ponggok.

## **E. Validitas Data**

Validitas data atau kesahihan data merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu. Menurut (Moleong 2004) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. (Denzin dalam Moleong 2004) membedakan empat

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber mengarahkan penulis agar dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Menurut (Moleong 2004) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara: 1) membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan yang lain, 2) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi yang dalam penelitian ini dengan pemeriksaan hasil wawancara para informan kunci yang terlibat aktif. Selain itu juga dengan pengamatan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian.

## **F. Analisis Data**

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analitik deduktif. Model penelitian analitik deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Model penelitian ini berangkat dari teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

Oleh karena itu, dapat diringkas alur metode penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Tahap Analisis Pengumpulan data**

Peneliti melakukan proses pengumpulan data dari lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal dalam

bentuk pedoman wawancara dan observasi. Pengumpulan data yang akan ditanyakan kepada partisipan dalam proyek penelitian berdasarkan literatur dan teori yang digunakan dalam kajian pustaka. Untuk membantu menganalisis dari sifat pertanyaan wawancara, peneliti menggunakan pengkodean berdasarkan jenis pertanyaan. Kemudian peneliti memulai pengumpulan data dengan serangkaian kode awal yang berasal dari proposisi teoritis dan kerangka kerja konseptual. Terkait dengan pertanyaan penelitian dan objek penelitian kode-kode ini akan dapat berubah (penyisipan, penghapusan dan penggabungan) tergantung pada kelayakan untuk data yang di dapat. Proses pengumpulan data melibatkan sisi informan, aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

## 2. Tahap Analisis Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan data pada kategorisasi data berdasarkan elemen-elemen penelitian. Tahap tersebut untuk melakukan reduksi data sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Peneliti mereduksi data juga sebagai bentuk analisa untuk menajamkan dan menggolongkan untuk ditarik kesimpulan.

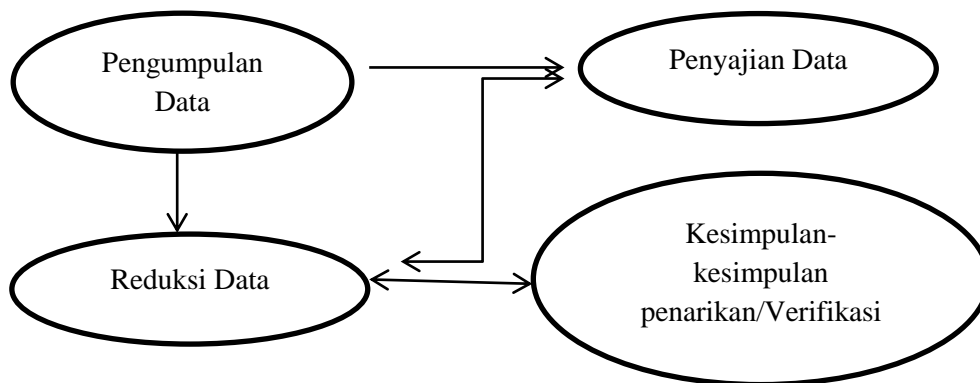
## 3. Penyajian Analisis Data

Tahap ini peneliti membuat penyajian data, baik dengan narasi matrik atau menyajikan gambar sebagai sekumpulan informasi tersusun untuk kemudian penarikan kesimpulan.

#### 4. Kesimpulan Analisis

Tahap akhir adalah kesimpulan analisis yang dimaknai sebagai penarikan data yang telah ditampilkan dengan teknik analisis oleh Creswell (2012) dan Seiddel dalam Bungin (2012) melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Peneliti menetapkan keajegan / dominasi data dengan memberi kode
- b) Peneliti memilah kode ke dalam pola tematik ikhtisar berdasarkan keajegan /dominasi data
- c) Peneliti membuat kategorisasi makna persamaan dan perbedaan dari pola-pola tematik
- d) Peneliti membuat deskripsi hubungan logik antar kategori
- e) Peneliti membuat temuan kesimpulan akhir tematik-tematik setiap dimensi penelitian yang diikuti dengan implikasi teori, metodologis dan praktis serta saransaran.



Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif

## G. Bagan Alur Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan indikator yang berasal dari konsep yang telah dijelaskan dalam BAB II yaitu 1) program dan capaian pembangunan, 2) kepemimpinan, 3) partisipasi masyarakat. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan telaah dokumen resmi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa capaian pembangunan Desa Ponggok diperoleh dari kepemimpinan dan partisipasi publik yang baik. Kedua variable tersebut dapat menghasilkan program yang sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga capaian program menjadi maksimal. Bagan alur penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Bagan Alur Penelitian

<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Temuan lapangan</b>
1. Capaian Pembangunan Desa	a. Prasarana dan sarana sistem agribisnis	wawancara 2019 Direktur PT Boga Raharja pada tanggal 2 april wawancara Petani Ikan Bapak Sukardi pada tanggal 14 januari 2019  wawancara Ibu Kadus 1 Ibu stevani tanggal 14 januari 2019	1) Pembelian beras langsung dari petani dengan tujuan agar petani tidak bingung menjual hasil panen mereka, selain itu agar petani juga mendapat harga yang pantas dari hasil panen mereka.  2) Budidaya ikan dengan memanfaatkan tanah kas desa  3) Pemberiaan fasilitas untuk para petani dengan

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			<p>menyediakan pupuk dan obat-obatan untuk kebutuhan pertanian. Selain itu juga menyewakan alat pertanian seperti traktor</p> <p>4) Memberikan pinjaman tempat untuk ternak sapi dan kambing</p>
	<p>b. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga</p>	<p>Wawancara Kadus 1 Ibu Anindiayuri stevani pada tanggal 14 Januari 2019</p>	<p>1) Kepala Desa memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK untuk membuat sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian pemerintah Desa memberikan pelatihan pembuatan kue kepada ibu-ibu PKK.</p> <p>2) Selain pembuatan kue Ibu-ibu PKK juga membuat produk olahan ikan yang terbentuk dalam UMKM.</p> <p>3) Pemberian pelatihan wirausaha kepada para pemuda-pemuda Desa Ponggok</p> <p>4) Memberikan pelatihan</p>

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			<p>budidaya ikan air tawar.</p> <p>5) Pemberian bantuan permodalan dengan bunga yang rendah yaitu sebesar 2% melalui PT. Arta Tirta Mandiri.</p>
	<p>c. Penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat</p>	<p>Wawancara Kadus 1 Ibu Anindiayuri stevani pada tanggal 14 Januari 2019</p> <p>Wawancara Dusun 2 ibu Wahyu pada tanggal 14 Januari 2019</p>	<p>1) Kepala Desa Ponggok mensosialisasikan kepada ibu-ibu PKK untuk membuat sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian pemerintah desa memberikan pelatihan pembuatan kue kepada ibu-ibu PKK untuk membuat Katering.</p> <p>2) Hampir setiap taun pemerintah Desa Ponggok melakukan pendampingan usaha mikro/ kecil masyarakat dengan membuka jaringan permodalan dan akses peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat kepada UMKM, melalui program kegiatan inilah</p>

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
		Wawancara Petani ikan Bapak Sukardi pada tanggal 14 januari 2019	<p>maka munculah ide pembuatan produk olahan berbahan dasar ikan</p> <p>3) Adanya program dari pemerintah desa bahwa warga dapat mengembangkan budidaya ikan dengan memanfaatkan tanah kas desa yang ada dibelakang balai desa dengan sistem bagi hasil</p>
	d. Pengembangan jaringan produksi dan pemasaran	Wawancara Bapak Joko Dirut BUMDes pada tanggal 16 januari 2019	<p>1) Desa Ponggok memanfaatkan teknologi serta internet untuk melakukan pemasaran pariwisata umbul ponggok. Penggunaan instagram dan whatapp sebagai media untuk melakukan promosi secara gratis, mengingat bahwa modal pengembangan wisata ini sangat terbatas. Namun pemilihan media sosial terbukti membuahkan hasil, dimana banyak masyarakat</p>



Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			<p>yang tertarik untuk datang ke umbul ponggok dan menikmati wisata bawah air yang sangat indah.</p> <p>2) mengadakan event event promosi maupun mengikuti event promosi di luar desa</p>
	e. Penguasaan teknologi tepat guna	RPJMDes 2014-2019	<p>1) Optimalisasi dan pengembangan website desa untuk informasi publik dan mengenalkan potensi desa serta menjalin kemitraan dengan pihak luar</p> <p>2) Pengembangan soft ware untuk peningkatan pelayanan publik Pe-manfaatan teknologi di pergunakan secara maksimal oleh pemerintah Desa Ponggok sebagai sebuah sarana untuk melakukan pembangunan desa mulai dari pelayanan Publik dari sisi administrasi, kependudukan, pelayanan</p>

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			<p>masyarakat dan pelayanan lainnya. Desa ponggok sudah menerima 4 kali penghargaan sebagai Desa dengan Administrasi terbaik</p>
	<p>f. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan</p>	<p>RPJMDes 2014-2019 dan Wawancara Dusun 2 ibu Wahyu pada tanggal 14 Januari 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan potensi umbul/sumber air dengan semangat pelestarian dan asas manfaat yang optimal</li> <li>2) Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian</li> <li>3) Peningkatan produksi dan kualitas produk perikanan sekaligus diversifikasi produk olahan.</li> <li>4) Pengembangan industri rumah tangga dan industri air minum oleh Bum Des</li> <li>5) Pengembangan potensi kesenian sebagai pendukung sektor pariwisata</li> <li>6) Analisis potensi dengan melibatkan pihak konsultan secara terus menerus melalui proses riset dan pengembangan secara berkelanjutan</li> </ol>

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			7) Desa Ponggok memiliki sumber daya alam berupa sumber air yang berlimpah dan lahan pertanian yang subur. Pemanfaatan Sumber dayaair yang berlimpah telah dikelola oleh Desa Ponggok dengan sangat baik dibawah Badan Usaha Milik Desa dimana setiap potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Ponggok di kelola oleh PT yang berbeda-beda.
2. Kepemimpinan Transformasional	a. Pengaruh Ideal	Wawancara dengan Kepala Desa Wawancara pada tanggal 2 April 2019	Kepala desa memberikan banyak masukan kepada perangkat desa agar dapat mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam dalam program-program yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan selalu menumbuhkan budaya gotong royong dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seperti perbaikan fasilitas umum sehingga menumbuhkan rasa memiliki

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			dan merawat asset desa bersama.
	b. Motivasi Inspirasi	Wawancara Bapak Sri Mulyono BPD pada tanggal 16 Januari 2019	Kepala Desa Mengupayakan keterlibatan seluruh aparatur Desa dan semua warga untuk mencapai visi dan misi Desa Ponggok dalam momen perkumpulan. Memberikan sosialisasi mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan mengajak masyarakat untuk menjaga jalan, jembatan ataupun talud yang telah dibangun agar bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu kepala desa juga memberikan arahan agar masyarakat ikut memajukan usaha-usaha desa yang telah dimiliki karena usaha-usaha desa merupakan sumber pedapatan mereka dan sumber dana bagi pembangunan desa
	c. Stimulasi Intelektual	Wawancara kepala Dusun 2 ibu Wahyu pada tanggal	Hampir setiap taun pemerintah Desa Ponggok memiliki

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
		14 Januari 2019	kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui program kegiatan pemberdayaan inilah maka munculah UMKM-UMKM yang sekarang ada di Ponggok.
	d. Konsiderasi Individu	Wawancara Kepala Dusun II Ibu Wahyu pada tanggal 14 Januari 2019	<p>a. Setiap satu minggu sekali pak lurah secara langsung meninjau langsung lokasi-lokasi yang sedang dilaksanakan pembangunan. Ketika beliau tidak dapat melakukan kunjungan secara langsung beliau tetap mengawal dengan menanyakan lewat whatsapp bagaimana perkembangan pelaksanaan kegiatannya, jika ada masalah maka pak lurah membuat peta permasalahan dan memberikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.</p> <p>b. Bapak kepala desa sering berkeliling kampung untuk</p>

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			berkomunikasi dengan warga dan menanyakan kabar dan keluhan warga serta berdiskusi bersama warga.
3. Partisipasi Publik	a. Kerjasama	Wawancara Kaur Keuangan pada tanggal 2 April 2019	Mayarakat Ponggok memiliki partisipasi dan kerjasama luar biasa. Dalam acara musrembangdes setiap tahunya bertambah rame, dimana masyarakat ingin mendengarkan hasil dari musrawarah dan ikut menentukan usulan yang harus menjadi prioritas utama. Masyarakat juga semakin kritis, mereka menanyakan setiap detail uang yang dilaporkan dalam APBDes setiap tahunnya.
	b. Komunikastif dan Adaptif	Wawancara Bapak Sri Mulyono BPD Desa Ponggok pada tanggal 16 Januari 2019	Dalam Pertemuan rutin yang diadakan setiap 35 hari sekali masyarakat akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada didesa, baik jalan yang rusak,

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			penerangan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dibutuhkan.
	c. Proaktif	Wawancara kaur umum Bapak laskar pada tanggal 16 Januari 2019	Warga sadar membuang sampah pada tempatnya serta kebersihan lingkungan karna Desa ponggok menjadi Desa wisata dan menjadi Desa percontohan maka warga sekarang lebih peduli dengan kebersihan lingkungan.
	d. Inklusif	Wawancara kaur perencanaan Bapak Sunarno pada tanggal 14 Januari 2019  Wawancara Kepala Dusun 1 umbul ponggok pada tanggal 14 Januari 2019	1) Perencanaan Desa Ponggok merupakan hasil dari Musrembangdes. Dimana usulan dari tingkat RT masuk ke RW kemudian RW masuk ke dusun dan dusun masuk ke Desa kemudian nanti dari Desa baru dirangkum.  2) 75% masyarakat Ponggok sekarang ikut berinvestasi dalam pengembangan wisata umbul ponggok. Kegigihan pemerintah desa dan dukungan dari masyarakat

Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			membuat mengembangkan wisata umbul ponggok menjadi sukses.
	e. Edukatif	RPJMDes 2014-2019 dan Wawancara kaur keuangan tanggal 2 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan akses pendidikan formal dan informal bagi warga miskin dengan memberikan Kartu Cerdas: akses bantuan pendidikan bagi warga miskin</li> <li>2) Peningkatan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program Satu Rumah Satu Sarjana: Program bea siswa ke perguruan tinggi/akademi/ lembaga pendidikan kerja/ Balai Latihan Kerja/ Magang.</li> <li>3) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di level desa dengan membangun pembangunan dan pengembangan sarpras di level desa (PAUD, TK, SD, dan PLS).</li> </ol>



Konsep	Indikator	Sumber Data	Temuan lapangan
			<p>Pembangunan fasilitas pusat studi tematik untuk pusat riset internal maupun riset eksternal yang dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran sekaligus mendukung PAD Desa.</p> <p>4) Membiasakan warga untuk berani memberikan pendapat, usulan dan kritik dalam forum diskusi.</p>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Sistematika dalam bagian ini dimulai dari gambaran umum Desa Ponggok, capaian pembangunan desa, kemudian mengelaborasi peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat Desa Ponggok dalam pembangunan desa.

##### **1. Deskripsi Desa Ponggok**

Desa Ponggok merupakan desa yang memiliki mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa Ponggok khususnya dan masyarakat desa lain yang pada umumnya. Nama “Ponggok” berasal dari cerita masyarakat turun menurun bahwa dahulu terdapat mata air atau *umbul* yang diperkirakan akan menjadi sebuah telaga yang sangat besar dan bisa menggenangi pemukiman penduduk sekitarnya, karena mempercayai ada sebuah firasat munculnya sepasang ikan yang menyerupai ikan asin. Guna mengantisipasi agar umbul air tidak membesar oleh nenek moyang kemudian menanggapi penari yang diiringi oleh gamelan komplit dengan pemain gamelan yang kemudian waranggono beserta gamelannya hilang dan secara tiba-tiba datang seekor burung pungguk yang sangat besar hinggap di dahan pohon gayam, dengan bahasa isyarat burung pungguk tersebut bisa menunjukkan salah satu alat gamelan yang menyerupai gong masih utuh

terpelihara dengan baik. Karena jasa burung yang berada di dahan masyarakat sekitar tertuju di dahan untuk melihat keberadaan burung punggok yang terkesan ajaib itu.

Untuk mengingat peristiwa tersebut kemudian oleh para tetua desa menamakan kampung ponggok, sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok. Umbul Ponggok hingga hari ini digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya diwaktu menjelang puasa, ada sebuah tradisi mandi di Umbul Ponggok yang sampai sekarang di era modern tradisi padusan Umbul Ponggok masih ada dan selalu dikunjungi banyak orang.

Pemerintah Desa Ponggok terbentuk setelah adanya ukur tanah yang meliputi dukuh Ponggok, Jeblogan, Kiringan dan Umbulsari yang dijabat oleh seorang Kepala Desa pertama bernama Amat Sumangun dan dilanjutkan Kepala Desa kedua bernama R. Karto Hudoyo. Kepala Desa ketiga dijabat Bp. Jinu Sastro Mulyono sejak awal orde baru sampai tahun 1988, dilanjutkan Kepala Desa keempat Bp. H. Sunarta dari tahun 1990 s/d 2007 yang masa berakhirnya 12 Januari 2007. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa yang akhirnya Bp. Junaedhi Mulyono, SH terpilih sebagai Kepala Desa kelima.

#### **a. Kondisi Geografis**

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dengan batas desa:

- Sebelah Utara : Ds. Cokro. Kec. Tulung

- Sebelah Timur : Ds. Nganjat. Kec. Polanharjo
- Sebelah Selatan : Ds. Njeblog. Kec. Karangnom
- Sebelah Barat : Ds. Dalangan. Kec. Tulung

Jarak Desa Ponggok dari Kota Klaten  $\pm$  15 Km berada di sebelah utara Kota Klaten, 10 Km dari sebelah barat Jalan Raya Yogya – Solo, dengan potensi kesuburan tanah yang cocok sebagai tanah pertanian dan Perikanan dengan sumber air yang melimpah. Luas wilayah Desa Ponggok 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 (Empat) dukuh terbagi dalam 6 RW dan 12 RT meliputi :

Tabel 4. 1 Jumlah RW dan RT

NO	DUKUH	Jumlah	
		RW	RT
1	Ponggok	2	4
2	Jeblogan	1	2
3	Kiringan	1	2
4	Umbulsari	2	4

Sumber: RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019



Tabel 4. 2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	DUKUH	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Ponggok	327	316
2	Jeblogan	178	192
3	Kiringan	198	208
4	Umbulsari	314	303
Total		1.017	1.019

Sumber: RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019

Dari table 4.2 terlihat bahwa jumlah antara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan berimbang sejumlah 1.017 laki-laki dan 1.019 perempuan. Implikasi dari kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan menjadi lebih merata dan seimbang.

Penduduk Desa Ponggok berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	Tamat SD	321
2	Tamat SLTP	278
3	Tamat SLTA	676
4	Tamat D1/D2	10
5	Tamat D3	63
6	Tamat S1	97
7	Tamat S2	3

Sumber: RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa masyarakat Desa Ponggok memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Jumlah terbesar berada pada tingkat SMA sebanyak 676 orang. Urutan kedua merupakan tamatan SD sebanyak 321 orang. Keempat, sebanyak 278 orang menamatkan SLTP. Keempat, terdapat sebanyak 97 orang berhasil menamatkan sarjana/S1. Terdapat masyarakat yang memiliki gelar vokasi, yaitu D3 sebanyak 63 orang dan D1/D2 sebanyak 10 orang. Sedangkan terdapat tiga orang yang memiliki gelar S2. Kondisi pendidikan ini penting untuk memahami latar belakang masyarakat dalam menjelaskan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Walaupun terdapat anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan, biasanya jenjang sarjana, semakin baik untuk pembangunan wilayah, namun partisipasi masyarakat lainnya juga penting dalam pembangunan kolektif.

Penduduk Desa Ponggok berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Prosentase
1	Karyawan Swasta	428	35
2	Buruh Harian Lepas	300	25
3	Wiraswasta	228	19
4	Pedagang	83	6,8
5	Petani	48	3,9
6	PNS	32	2,6
7	Pensiunan	31	2,5
8	Karyawan/Guru Honorar	26	2,1
9	Buruh Tani	19	1,6
10	Jasa	18	1,5

11	TNI	5	0,4
12	Karyawan BUMD	2	0,2
13	Dokter	2	0,2
14	Dosen	1	0,1

Sumber: RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019

Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Ponggok terbanyak bekerja sebagai karyawan swasta, 428 orang atau 35%. Mata pencaharian kedua terbanyak penduduk Desa Ponggok sebanyak 300 orang atau sekitar 25%. Kemudian, mata pencaharian terbanyak berikutnya adalah wiraswasta sebanyak 228 orang atau 19%. Lebih lanjut, mata pencaharian penduduk Desa Ponggok lainnya bervariasi mulai dari pedagang (6,8%), petani (3,9%), PNS (2,6%) dan beragam mata pencaharian lainnya.

Kondisi budaya masyarakat Desa Ponggok terbilang homogen karena masyarakat yang tinggal di daerah tersebut merupakan penduduk asli. Masyarakat Desa Ponggok sebagian besar yaitu 90% merupakan penduduk asli. Penduduk pendatang hanya sebesar 10% dari seluruh Kepala Keluarga (KK). Tidak ada dokumen resmi yang menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Ponggok, kondisi latar belakang karakter penduduk dari sosial budaya dijelaskan oleh Bapak Junaedi, Kepala Desa, sebagai berikut:

*“Kondisi penduduknya kira-kira seperti ini, di sini Rata-rata penduduknya adalah orang asli sini dari nenek moyang turuntemurun dan strata sosialnya menengah kebawah, tingkat pendidikannya rata-rata rendah tapi mereka punya kelebihan pola kekerabatan yang sangat dekat. Kalau di persenkan mungkin total 90% penduduk asli, sisanya merupakan penduduk pendatang. Walau tergolong sebagai masyarakat baru, namun karena tumbuh bersama*



*jadi sistem sosial yang terbangun menjadi cukup kuat.” (Wawancara pada tanggal 2 April 2019)*

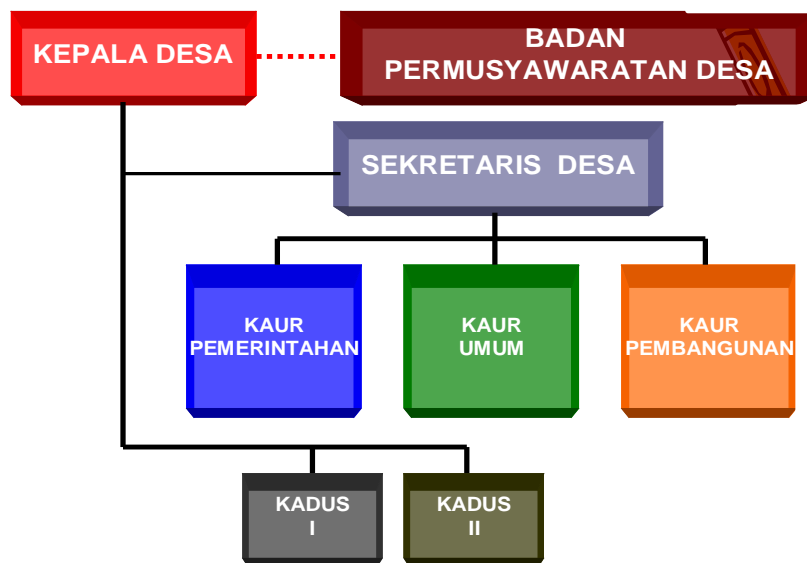
**c. Pemerintahan Desa Ponggok**

Suatu pemerintahan pada umumnya organisasi dan manajemen yang baik merupakan aspek yang penting dan untuk mendapatkan serta menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya merupakan kewenangan dan obyektivitas dalam suatu dasar. Susunan organisasi pemerintahan Desa Ponggok merupakan petunjuk yang akan diperhatikan dalam menjalankan organisasi, hal ini dimaksudkan supaya organisasi pemerintahan ini menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal.

Pelaksanaan pekerjaan tentu yang paling utama dalam fungsi manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai ke bawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Adapun struktur organisasi Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) BPD, (4) Kaur Pemerintahan, (5) Kaur Umum, (6) Kaur Pembangunan (7) Kepala Dusun I (8) Kepala Dusun II.

Pemerintah Desa Ponggok memiliki struktur organisasi dalam membantu dalam mengelola program-program yang ada di Desa ponggok. Perangkat Desa ponggok tersebut memiliki pendidikan Sarjana. Dalam melakukan suatu program kegiatan, terdapat penanggung jawab dari masing-masing program yang sudah

ditentukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga diharapkan adanya kerjasama antara penanggung jawab program agar memudahkan proses pelaksanaan program dan kelancaran program tersebut. Pelaksanaan program kerja yang ada di desa dilakukan secara bertahap. Walaupun penanggung jawab setiap program kerja berbeda tetapi perangkat desa saling membantu ketika suatu program dilaksanakan, sehingga kesuksesan suatu program dapat tercipta dengan koordinasi yang baik antara setiap kepala bagian. Berdasarkan Peraturan Desa Ponggok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sumber: RPJMDes Desa Ponggok 2014-2019

Deskriptif jabatan dan pekerjaan Berikut ini akan diuraikan bentuk dan susunan pemerintahan Desa berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:

## 1) Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi bawahannya. Berikut ini tugas kepala desa:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- b) Membina kehidupan masyarakat;
- c) Membina perekonomian Desa;
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desanya;
- f) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g) Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

Sedangkan fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b) Penanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c) Penyusunan dan atau penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e) Pengadaan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- f) Pelaksanaan koordinasi atas jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

## **2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan paham untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mempunyai kedudukan

sejajar dan menjadi mitra kerja Kepala Desa baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan Desa. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh perwakilan dusun, Agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur tokoh masyarakat yang mempunyai persyaratan. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e) Memproses pemilihan Kades;
- f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga

### 3) Sekretaris Desa

Adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan BPD. Tugas BPD yaitu menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu Kepala Desa dalam pelayanan ketatausahaan. Sekertaris desa memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, urusan keuangan dan urusan adminsitirasi umum, serta pelayanan teknis dan ad- ministratif Perangkat Desa;
- b) Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- c) Pelaksanaan pengumpulan bahan pengolahan data dan perumusan pro- gram – program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- d) Pelaksanaan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e) Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan program kerja

pelaporannya; tahunan dan

- f) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Unsur Teknis Desa**

Urusan pemerintahan: mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan dibidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

Urusan pembangunan mempunyai tugas: menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

Urusan umum mempunyai tugas: melakukan tugas – tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan atau Sekretaris Desa.

Kepala dusun mempunyai tugas: membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **d. Potensi Desa Ponggok**

##### **1) Potensi Lokasi**

Berdasarkan peta Kabupaten Klaten Desa Ponggok merupakan desa yang berada di sebelah Utara Kota Klaten. Desa Ponggok secara geografis memiliki lokasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena berada di posisi segitiga emas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Desa Ponggok mengambil keuntungan dari Solo sebagai kota Vokasi dan Jogja sebagai kota pelajar dan budaya, sebagai pusat pendidikan dan tujuan wisatawan. Dengan potensi desa yang dimiliki, Desa Ponggok mengembangkan potensi unggulan desa di sektor pertanian mengingat bahwa ponggok memiliki lahan pertanian yang sangat subur.

##### **2) Potensi Kondisi Perekonomian**

Untuk melakukan pembangunan menuju desa mandiri selain mengoptimalkan potensi yang dimiliki, tentu juga membutuhkan dukungan dari segi ekonomi untuk dapat merealisasikan perencanaan yang telah dibuat. Desa Ponggok memiliki potensi Keuangan pada tahun 2018 yang besar yang bersumber dari :

- a) APBDesa rata-rata pertahun 2.000.000.000
- b) Pendapatan Asli Desa rata-rata per tahun 140.000.000
- c) ADD per tahun rata-rata 26.592.000
- d) Swadaya masyarakat rata-rata 20.261.500
- e) Sumber lain rata-rata 1.500.000.000
- f) Bantuan dari Kabupaten 16.728.000



- g) Bantuan dari Provinsi 300.000.000
  - h) Bantuan dari Pusat (PNPM) 75.000.000
- 3) Potensi Desa ponggok yang lain
- a) Letak Desa Ponggok yang sangat strategis antara Jalan Antar Kabupaten dan tidak Jauh dari jalur nasional jalan Yogyakarta menuju Surakarta dan Boyolali – Semarang
  - b) Jumlah SDM yang memadai
  - c) Potensi sumber air dan Lahan pertanian dengan irigasi yang memadai
  - d) UMKM di berbagai sektor baik jasa maupun barang
  - e) Modal sosial (kepercayaan,gotong royong,kebersamaan)
  - f) Trush (kepercayaan) terhadap pemerintahan desa yang cukup baik
  - g) Adanya kelompok-kelompok usaha bersama maupun kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan.
  - h) Berada dalam kawasan industri pengolahan air minum

## **2. Program dan Capaian Pembangunan Desa Ponggok**

### **a. Alokasi Anggaran dan Program Pembangunan**

Setiap desa tentu harus memiliki perencanaan dalam pembangunan. Perencanaan merupakan salah satu langkah paling penting untuk menentukan masa depan sebuah desa. Tanpa adanya perencanaan yang baik dan matang, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan

diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Perencanaan yang baik yaitu dengan melibatkan masyarakat didalamnya.

Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat didalamnya maka perencanaan akan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap proses pembangunan yang melibatkan masyarakat akan membuat masyarakat merasa memiliki tanggungjawab akan keberhasilan desanya.

Perencanaan di Desa Ponggok dimulai dengan mengumpulkan usulan masyarakat dari tingkat paling bawah yaitu RT melalui kegiatan rembuk RT. Setelah usulan setiap RT terkumpul maka usulan yang ada akan godok untuk di diskusikan pada tingkat dusun melalui kegiatan rembuk dusun untuk menentukan usulan-usulan yang dianggap paling penting dan memiliki kebermanfaatan paling besar. Setelah rembuk dusun maka usulan yang telah ditetapkan ditingkat dusun maka akan dibawa pada rembuk desa. Pada musrembangdes inilah usulan dari dua dusun yang ada di desa ponggok akan dimusyawarahkan untuk ditentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Di kegiatan musrembangdes inilah semua warga dapat melihat dan ikut memberikan pendapat dan usulan untuk menentukan rencana kerja desa ponggok yang kemudian tertuang dalam rencana kerja pembangunan desa RKPDes Ponggok.

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Hal ini didukung oleh pernyataan kepala Desa Ponggok yaitu Bapak Junaidi menyatakan:

*” Sebelum kami memulai menentukan arah pembangunan di Desa Ponggok ini, saya ingin melihat masalah apa yang kita miliki dan potensi apa yang kita miliki, hal ini tidak bisa hanya dilihat sekilas tanpa adanya data yang akurat. Maka dari itu saya meminta bantuan mahasiswa KKN dari UGM untuk membantu memetakan potensi yang ada di Desa Ponggok dan permasalahan-permasalahan yang ada dengan terjun langsung ke masyarakat dan menganalisis permasalahan yang ada. Berbekal dari data dan informasi yang diberikan mahasiswa KKN UGM inilah saya memulai untuk membuat perencanaan untuk membuat Ponggok menjadi Desa Wisata ”.* (Wawancara pada tanggal 02 April 2019 )

Proses perencanaan pembangunan Desa Ponggok, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: 1) penyusunan RPJM Desa dan 2) penyusunan RKP Desa. Perencanaan pembangunan Desa Ponggok dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a) pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b) penyelarasan arah kebijakan perencanaan
  - c) pembangunan kabupaten/kota;

- d) pengkajian keadaan Desa;
  - e) penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - f) penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - g) penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - h) penetapan RPJM Desa.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a) penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b) pembentukan tim penyusun RKP Desa
  - c) pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian
  - d) program/kegiatan masuk ke Desa
  - e) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - f) penyusunan rancangan RKP Desa;
  - g) penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - h) penetapan RKP Desa;
  - i) perubahan RKP Desa; dan
  - j) pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Daftar Usulan yang ada dalam RKP Desa tentu haruslah usulan yang benar-benar diusulkan oleh masyarakat dan usulan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat bukan usulan dari kepentingan segelintir orang. Tim penyusun RKPDesa Ponggok menyusun daftar usulan RKPDesa berdasarkan hasil usulan masyarakat hal ini dipertegas dari pernyataan kaur perencanaan Bapak Sunarno:

*” Perencanaan di Desa Ponggok itu hasil dari Musrembangdes, kita kan tiap tahun melaksanakan musrembangdes itukan usulan dari RT masuk ke RW kemudian RW masuk ke dusun dan dusun masuk ke Desa kemudian nanti dari Desa baru dirangkum. Kalau untuk pembangunan yang cakupannya besar seperti pariwisata dan gedung itu kan usulan dari Desa bekerja sama dengan konsultan. Semua ide-ide yang ada di Pak lurah, lembaga RT, RW kita sinkronkan dengan konsultan”. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil dari pengajuan masing-masing RW, kemudian dimusyawarkan bersama BPD pemerintah Desa mana yang lebih fokus dan lebih penting”. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2019)*

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Sri Mulyono selaku BPD Desa Ponggok:

*” Perbedaan kepemimpinan Kepala Desa yang sekarang dengan yang sebelumnya sama saja, cuma kalau dulu usulan itu dari atas ke bawah, kalau sekarang kan dari bawah ke atas. Walaupun usulan dari atas kan tetap saja usulan itu sebenarnya dari bawah kemudian keputusannya dari atas. Kalau sekarang kan usulan dari bawah kemudian di musyawarahkan mana yang lebih penting dulu bersama baru diambil keputusan”. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019)*



Gambar 4. 3 Musrembangdes Ponggok 2018

Setelah melakukan pengajuan daftar usulan RKP Desa maka tersusunlah Dokumen RKP Desa Pongkok sebagai acuan dalam pembangunan Desa Pongkok. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya pongkok telah memiliki acuan dalam pelaksanaan dengan melihat RKP Desa yang telah dibuat dan di setujui bersama. Namun pelaksanaan pembangunan tidak semuanya akan sesuai dengan RKP Desa yang telah dibuat, karena perlu melihat kembali ketersediaan anggaran pada tahun pelaksanaan dengan melihat pendapatan yang diterima Desa Pongkok. Berikut komparasi alokasi anggaran Desa Pongkok selama lima tahun:

Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Desa Pongkok

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Infrastruktur dan Fasilitas Umum	1.153.301.000 <b>(52,58%)</b>	1.167.317.000 (36,84%)	1.808.102.000 <b>(55,66%)</b>	1.788.804.100 <b>(52,33%)</b>
Kesehatan Dan Olahraga	10.000.000 (0,46%)	60.000.000 (1,89%)	30.670.000 (0,94%)	50.304.250 (1,47%)
Perekonomian	30.000.000 (1,37%)	507.500.000 (16,02%)	90.670.000 (2,79%)	15.000.000 (0,44%)
Pemerintahan Desa	950.433.919 (43,33%)	1.300.980.672 <b>(41,06%)</b>	736.398.655 (22,67%)	1.015.929.866 (29,72%)
Keagamaan	-	54.400.000 (1,72%)	15.000.000 (0,46%)	18.000.000 (0,05%)
Kelestarian Lingkungan	24.000.000 (1,10%)	-	-	134.000.000 (0,98%)
Sosial Budaya	4.600.000 (0,21%)	54.400.000 (1,72%)	10.000.000 (0,41%)	8.500.000 (0,25%)
Pertanian Terpadu	5.000.000 (0,23%)	-	17.000.000 (0,52%)	3.855.000 (0,11%)
Pendidikan dan Peningkatan SDM	16.000.000 (0,73%)	24.000.000 (0,76%)	540.600.000 (16,64%)	533.859.000 (15,62%)
Jumlah	2.193.334.919	3.168.597.672	3.248.440.655	3.418.052.216

Sumber: RAPBDes Desa Pongkok Tahun 2015-2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Desa Ponggok memiliki total anggaran belanja sebesar Rp. 2.193.334.919 di mana alokasi anggaran paling besar untuk alokasi insfrastruktur dan fasilitas umum sebesar Rp. 1.153.301.000 (52,58%). Dari total anggaran pada Insfrastruktur dan Fasilitas Umum dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasana desa serta pembangunan jalan serta talud. Tahun 2016 Desa Ponggok memiliki peruntukan alokasi anggaran terbesar berbeda dengan tahun 2015 yaitu, pada alokasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 1.300.980.672 (41,06%) dari jumlah total anggaran Rp. 3.168.597.672. Peningkatan anggaran pada pemerintahan desa dibanding tahun sebelumnya yaitu dikarenakan adanya pengisian perangkat desa. Pada peringkat kedua alokasi anggaran sebesar Rp. 1.167.317.000 (36,84%) dipergunakan untuk pembangunan insfrastruktur desa serta pengembangan wisata desa yaitu pembangunan tempat wisata umbul besuki. Alokasi anggaran ketiga digunakan untuk perekonomian sebesar Rp.507.500.000 (16,02%) yaitu pengembangan kegiatan PKK serta UKM.

Pada tahun 2017 Desa Ponggok memiliki fokus anggaran belanja terbesar pada insfrastruktur dan fasilitas umum berbeda dengan tahun 2016 fokus anggaran terbesar ada pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahun 2017 alokasi anggaran terbesarnya pada insfrastruktur dan fasilitas umum untuk pengembangan objek wisata dan pembangunan sarana dan prasara desa yang masih menjadi fokus usulan yaitu sebesar Rp. 1.808.102.000 (55,66%) dari jumlah total anggaran Rp. 3.248.440.655. Pada peringkat dua pada tahun 2017 Desa Ponggok masih mengalokasikan anggaran terbesarnya pada yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada peringkat tiga alokasi sebesar Rp. 540.600.000

(16,64%) diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat, Desa Ponggok masih berkomitmen untuk mengembangkan SDM perangkat desa serta warga desa melalui pelatihan-pelatihan yang menambah pengetahuan masyarakat dan menumbuhkan ide serta kreatifitas warga untuk berwirausaha.

Tahun 2018 total alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 3.418.052.216. Pada tahun 2018 Desa Ponggok masih memprioritaskan alokasi anggarannya sebesar Rp.1.788.804.100 (52,33%) untuk kegiatan infrastruktur dan fasilitas umum seperti pembangunan fasilitas umum serta prasarana produksi seperti tempat UKM. Dari analisis tabel diatas dapat diketahui dari tahun 2015-2018 Desa ponggok memiliki prioritas anggaran terbesarnya setiap tahun berbeda-beda, namun pada tahun 2015, 2017, dan 2018 Desa ponggok berfokus pada kegiatan infrastruktur dan fasilitas umum.

Desa Ponggok setiap tahunnya masih berfokus pada pembangunan desa, terlihat dari alokasi belanja pada laporan APBDes bahwa prosentase anggaran setiap tahun masih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur ini tidak hanya tentang jalan dan irigasi, namun ada pengembangan wisata desa serta pengembangan infrastruktur untuk UKM. Pada peringkat kedua dapat dilihat bahwa anggaran belanja ponggok setiap tahunnya dari tahun 2015-2018 masih pada kebutuhan pemerintah desa, yaitu belanja pegawai, honor-honor serta kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan kantor. Pada peringkat ketiga hampir setiap tahunnya berfokus pada perekonomian dan pemberdayaan. Pelatihan untuk menambah skill dan keterampilan warga Desa Ponggok agar lebih berdaya dan berkembang.



Program pemberdayaan diperuntukkan untuk menumbuhkan perekonomian di Desa Ponggok. Serta menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat desa yaitu tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Kepala Desa Ponggok Bapak Junaedi menyatakan bahwa:

*“ Ketika kita menjadi Perangkat Pemerintah Desa kita harus mengingat kembali apa visi dan misi awal kita. Setelah kita melihat visi dan misi yang telah kita buat maka kita akan kembali berfokus pada visi dan misi tersebut. Desa Ponggok memiliki Visi menjadi Desa yang mandiri, bagaimana agar Ponggok menjadi desa yang mandiri, pertama saya melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa, ternyata permasalahannya yaitu kemiskinan, kenapa masyarakat miskin? Karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Berarti yang harus diselesaikan adalah masalah kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan talud jelas ini tidak nyambung. Kebanyakan Desa-desa lain mengalokasikan anggaran terbesar mereka untuk pembangunan talud, jalan/ jembatan. Kita memiliki rencana pembangunan yang berbeda, dengan melihat peta potensi, data dan informasi yang telah kita pegang maka melalui musrembangdes kami memutuskan untuk pengalokasian anggaran terbesar kami untuk mengembangkan wisata umbul dan pembangunan pabrik air minum mengingat bahwa potensi yang kita miliki yaitu air yang berlimpah”. (Wawancara pada tanggal 02 April 2019)*

Umbul ponggok merupakan salah satu tempat wisata air yang paling populer di Jawa Tengah, wisata ini tidak hanya menawarkan permainan air yang biasa, namun memberikan konsep yang berbeda dari tempat wisata air yang ada. Umbul ponggok memberikan nuansa baru dari kebanyakan wisata air, dimana para wisatawan dapat melakukan wisata foto bawah air. Tak hanya berfoto disini para pengunjung juga dapat *snorkeling* dengan suguhan pemandangan ikan yang cantik dan air yang sangat jernih dan segar karna berasal dari sumber mata air. Membuat objek wisata merupakan hal yang mudah, hampir semua desa atau kelompok masyarakat dapat membuat objek wisata, namun membuat objek wisata yang menarik dan unik tidak semua orang dapat membuatnya,

dimana dibutuhkan ide yang luar biasa. Berangkat dari pengalaman Kepala Desa Ponggok yaitu Bapak Junaedi Mulyono maka beliau memiliki ide untuk mengembangkan umbul ponggok menjadi tempat wisata yang menarik dan favorit. Bapak Junaedi Mulyono menyatakan:

*“ Ide dan konsep wisata umbul ponggok merupakan dari pengalaman saya sewaktu study banding ke Bali. Waktu itu saya diajak snorkeling dilaut, tapi waktu snorkeling saya merasa mata saya ini perih karena air laut, dan biaya snorkeling juga mahal, kemudian saya kepikiran kalau snorkeling nya di air tawar mungkin mata kita tidak akan perih dan biayanya tidak akan mahal. Setelah saya pulang dari bali saya kemudian mengunjungi umbul ponggok, dan snorkeling menggunakan perlengkapan seadanya cuma memakai kaca mata renang, saya merasa umbul ponggok tidak kalah cantik dengan pemandangan bawah laut. Umbul ponggok memiliki air yang sangat jernih dan ikan-ikan air tawar yang tidak kalah cantik, hanya perlu sentuhan lebih agar terlihat lebih menarik lagi biar kayak bunaken, kalau bunaken kan disulawesi ini umbul ponggok jadi bunakenya jawa”. (Wawancara pada tanggal 02 April 2019)*

Dari pengalaman yang dialami Bapak Junaedi ini maka terciptalah wisata umbul ponggok yang sukses dengan jumlah pengunjung setiap tahunnya selalu bertambah. Pengembangan wisata umbul ponggok ini tentu membutuhkan dan yang tidak sedikit, hal ini tentu menjadi PR bagi Kepala Desa, pada tahun 2015 anggaran yang dimiliki Desa Ponggok tidak akan cukup untuk melakukan pengembangan wisata, bermodal dari dana pribadi Kepala Desa dan ide dari Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat didalamnya dengan menawarkan masyarakat untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan wisata umbul ponggok. Menarik masyarakat untuk ikut berinvestasi tentu bukan perkara mudah, dimana butuh usaha lebih untuk

membuat masyarakat percaya bahwa wisata umbul ponggok ini akan berhasil.

Menurut Ibu Stevani Kepala Dusun 1 Desa Ponggok menyatakan:

*“Hampir 75% masyarakat Ponggok sekarang ikut berinvestasi. Pada awalnya hanya sedikit masyarakat yang ikut berinvestasi, karena tidak yakin dengan pengembangan wisata umbul ponggok yang akan sukses seperti sekarang ini. Pemerintah desa tidak memaksa masyarakat untuk ikut berinvestasi, karna memang belum ada jaminan pasti bahwa wisata ini akan berhasil. Karna masyarakat sini kan masyarakat desa mbak, jadi kalau belum ada bukti ya mereka tidak akan percaya, dan pikirnya ngapain investasi kalau hasilnya saja belum kelihatan. Kegigihan pemerintah desa dan dukungan dari beberapa masyarakat membuat mengembangkan wisata umbul ponggok menjadi sukses seperti sekarang. Karena ngelihat umbul ponggok sekarang berhasil, masyarakat sekarang banyak yang ikut berinvestasi. Karena hasilnya lumayan”.* (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2019)

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah kebijakan yang tepat. Masyarakat memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bergerak maju, pemerintah desa tentu tidak dapat bergerak maju tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat. Dengan ikut melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa maka akan membuat masyarakat memiliki rasa kepedulian dan tanggungjawab akan keberhasilan desa mereka. Dengan demikian maka masyarakat akan peduli akan pembangunan desa mereka, hal ini dipertegas dari pernyataan kaur umum Bapak Laskar :

*“ Masyarakat disini sekarang lebih sadar membuang sampah pada tempatnya sama kebersihan lingkungan mbak, karna sekarang ponggok kan menjadi Desa wisata dan menjadi Desa percontohan maka mereka sekarang lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Mereka sadar kalau banyak pengunjung yang datang ke ponggok kalau lihat Desa Ponggok kumuh nanti wisatawannya gak mau datang lagi, kalau gitu kan mereka sendiri yang rugi.*

*Mereka kebanyakan punya tempat usaha disekitar umbul ponggok, kayak MCK, warung, sama kerja di umbul ponggok". (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019)*

## **b. Capaian Pembangunan Desa Ponggok**

### 1) Badan Usaha Milik Desa

Pada tahun 2009 pemerintah Desa Ponggok bersama BPD dan melibatkan unsur tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa telah sepakat mendirikan BUM Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009 dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset milik desa. Tepatnya 15 Desember 2009, BUM Desa Tirta Mandiri resmi mengelola usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam). Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa untuk dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Klaten, salah satunya Pemerintah Desa Ponggok.

Setelah adanya pedoman pengelolaan BUM Des Pemerintah Desa Ponggok kemudian melakukan komunikasi untuk menegosiasikan dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mengelola pemandian umbul ponggok agar dikelola di bawah manajemen BUM Desa. Tentu, komunikasi dan negosiasi bisa berhasil tidak sepenuhnya tanpa syarat, kelompok yang sebelumnya mengelola pemandian umbul ponggok bersepakat untuk dikelola di bawah BUM Desa karena masing-masing dari

mereka akan mendapatkan keuntungan 10 persen setiap bulan dari investasi yang telah dijamin kepada BUM Desa sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan disediakan kios untuk berdagang. Tidak hanya itu, BUM Desa juga membuka investor dari warga desa (secara individu) dan termasuk kolektif RW masing-masing. Investor warga (individu) maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 dan sebanyak enam Rukun Warga (RW) dapat berinvestasi masing-masing Rp 40.000.000,00. Bagi warga yang menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa, Badan Pengawas (BP), dan BPD juga masing-masing dapat berinvestasi maksimal Rp 10.000.000,00. Para investor warga desa mendapatkan keuntungan 10 persen setiap bulan sesuai dengan besaran nilai yang diinvestasikan. Pedagang di wisata umbul Ponggok ibu sunarti menyatakan:

*“Dulu wisata ini cumak untuk mandi sama nyuci saja mbak sama yang ditengah umbul itu untuk air bersih. Tapi setelah pergantian kepala desa yang baru yaitu pak Junaedi umbul ponggok dibangun seperti sekarang dan menjadi ramai. Saya sebelumnya cuma ibu rumah tangga biasa, tapi semenjak adanya umbul ponggok ini saya bisa berjualan di sini dan berpenghasilan untuk nambah-nambah uang jajan anak. Untuk yang berjualan di dalam sini itu harus orang ponggok mbak dan yang berada di dusun 2. Tapi masyarakat ponggok juga bisa merasakan hasi dari wisata ini mbak walaupun tidak berjualan di sini, jadi warga yang lain bisa investasi ke BUM Des Rp. 5.000.000 nanti dapat keuntungan kalau gak salah 10%. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019)*

Dalam waktu 10 tahun BUMDes Tirta Mandiri telah memiliki 9 bidang usaha untuk mengelola potensi ponggok yang berbeda-beda. Masing-masing unit BUM Des yang sekarang telah menjadi badan usaha antara lain yaitu:

a) PT. Umbul Ponggok

Dari hasil investasi masyarakat, pemerintah desa serta dana APBDes wisata umbul ponggok kemudian di revitalisasi total untuk mendorong akselerasi sektor pariwisata. Pemerintah Desa dan BUM Desa mengembangkan umbul ponggok menjadi destinasi desa wisata yang menyajikan berbagai keunikan, seperti; snorkling, berfoto dalam air bersama ikan-ikan maupun dengan perlengkapan unik (seperti; sepeda motor, sepeda, televisi) dan terdapat wahana ninja warior yang menjadi daya tarik para pengunjung/wisatawan. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun berkembang sejak tahun 2014, BUM Desa Tirta Mandiri telah berhasil mendapatkan omzet milyaran tiap tahun dari pemandian umbul ponggok. Menurut Bapak Joko Dirut BUMDes Mengatakan bahwa:

*“ Umbul Ponggok awalnya hanya pemandian biasa yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan omset yang sangat rendah. Kemudian Bapak Kepala Desa Sepulang dari study banding dari Bali memiliki ide untuk mengelola umbul ponggok menjadi wisata air yang berbeda dari kebanyakan wisata air yang sudah ada. Kemudian kami bernegosiasi dengan kelompok masyarakat yang mengelola umbul ponggok untuk menyerahkan kepengurusan umbul ponggok dibawah BUMDes dengan memberikan kompensasi kepada kelompok masyarakat saham sebesar 10% dari laba bersih setiap bulannya. Kemudian kami merenovasi umbul ponggok dengan modal awal 100 juta dari uang pribadi pak lurah. Kemudian kami mulai menambahkan ornament-ornamen dibawah air untuk berfoto dan menyewakan alat snorkeling. Pada tahun pertama, kedua kami mengalami kerugian, karna belum banyak wisatawan yang tau umbul ponggok, kemudian kami memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan umbul ponggok, seperti instagram dan whatapp. Dimana kita ketahui promosi lewat instagram tidaklah memerlukan biaya. Untuk menjalankan promosi ini kami*

*memberikan sosialisasi kepada perangkat desa untuk ikut mempromosikan umbul ponggok lewat whatapp. Pada tahun ketiga barulah kami menerima laba, karena semakin banyak pengunjung yang datang. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019).*



Gambar 4. 4 Wisata Umbul Ponggok (tampak atas)



Gambar 4. 5 Wisata Umbul Ponggok (tampak bawah)

b) PT. Arta Tirta Mandiri

Pada tahun 2019 BUM Des Tirta Mandiri memberikan pelayanan perkreditan. Anak usaha BUM Des yaitu PT. Arta Tirta Mandiri mengelola usaha simpan pinjam kepada masyarakat dengan bunga yang lebih ringan dari pada usaha perkreditan yang lain. Menurut Kadus 1 Ibu Stevani alasan pendirian PT. Arta Tirta Mandiri yaitu:

*“Dulu masyarakat Ponggok ini banyak yang terjerat hutang ke bank plecit mbak, tau sendiri kan bunganya bank plecit itu tinggi sekali, jadi masyarakat yang miskin jadi semakin miskin. Pada awal pemerintahan Pak Junaedi masalah itu telah dibereskan. Pak kades membayar semua hutang masyarakat dengan uang pribadi pak lurah, kemudian masyarakat bisa membayar hutang itu dengan mencicil kepada pak lurah tanpa bunga. Mengingat kejadian itu, Pak lurah tidak ingin lagi terjadi hal itu, makanya sekarang di Ponggok ada perkreditan rakyat dengan bunga yang rendah untuk membantu permasalahan keuangan masyarakat dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan pinjaman”.* (wawancara pada tanggal 14 januari 2019)

c) PT. Ponggok Ciblon

Berhasilnya wisata umbul ponggok seiring berjalannya waktu tidak membuat pengelola BUMDes merasa puas, dari laba yang di dapat. Pengelola terus melihat potensi-potensi desa yang masih belum dikelola dengan baik. Salah satu yang menjadi perhatian BUMDes yaitu wisata umbul ciblon dimana dahulu wisata ini memiliki nama umbul mili dan umbul besuki yang kemudian diubah menjadi umbul ciblon dengan konsep wisata taman air terpadu. Selain menyediakan wisata air, wisata umbul ciblon juga menyediakan resto dengan menu ikan. Para pengunjung yang datang bisa



memesan masakan dengan olahan ikan dengan cara memancing sendiri ikan yang akan di olah.



Gambar 4. 6 Wisata kolam Umbul ciblon



Gambar 4. 7 Resto Umbul ciblon

d) PT. Sumber Penguripan

Desa ponggok juga memiliki PT. Sumber Penguripan, perusahaan ini mengelola toko desa/minimarket. Toko desa ini tidak hanya menjual barang-barang yang umumnya dijual oleh minimarket yang ada, namun di toko ini menjual oleh-oleh khas desa yaitu olahan ikan yang dibuat oleh UMKM Desa ponggok.



Gambar 4. 8 Toko Desa

e) PT. Mina Tirta Mulya

Sumber air yang berlimpah di Desa Ponggok tentu merupakan sebuah berkah, namun potensi yang ada jika tidak dimanfaatkan dengan baik hanya akan menjadi sia-sia. Dengan adanya air yang berlimpah maka di buatlah pengelolaan budi daya ikan air tawar yaitu ikan nila. Melalui PT Mina maka

pengelolaan ikan air tawar mulai dari pembibitan hingga penjualan dikelola. BUMDes membuka kesempatan kepada anggota kelompok ternak Boga Raharjo menggunakan kolam untuk budidaya nila dengan sistem bagi hasil. Peternak penggarap memperoleh bagian 33% dari jumlah pendapatan hasil panen. Sisanya 27% untuk kas desa, 10% untuk pengurus kelompok ternak, dan 30% untuk pengembangan kelompok ternak. BUMDes juga memberikan fasilitas pinjaman modal bagi anggota kelompok ternak dengan bunga 2% pinjaman dibayar saat panen. Menurut salah satu petani ikan Bapak Sukardi pendirian PT. Mina Tirta Mulya sangat membantu para petani budidaya ikan yaitu :

*“Saya sebelumnya bekerja sebagai buruh tani mbak di desa sebelah, kemudian setelah adanya arahan dari pemerintah desa bahwa warga dapat mengembangkan budidaya ikan dengan memanfaatkan tanah kas desa yang ada dibelakang balai desa dengan sistem bagi hasil maka saya tertarik. Awalnya saya tidak tau cara budidaya ikan air tawar khususnya ikan nila itu seperti apa, tapi ternyata dari desa kami warga yang berminat melakukan budidaya ikan diberikan pelatihan cara budidaya ikan. Sekarang sudah banyak masyarakat yang ikut-ikutan budidaya ikan di parit depan rumah, hasilnya lumayan mbak bisa buat tambah-tambah belanja. Selain memanfaatkan parit yang ada di depan rumah, warga juga memanfaatkan sawah sebagai lahan budidaya ikan. Jadi jarak antara tanaman padi dan pematang diperlebar dan diperdalam untuk pembesaran nila. Kami juga tidak bingung jual ikan hasil panen kami, karena BUM Des siap membeli ikan kami”. (wawancara pada tanggal 14 januari 2019).*

UMKM yang mengelola ikan air tawar merupakan salah satu pelanggan dari PT. Mina Tirta Mulya. Selain itu budidaya ikan ini dibeli oleh Resto yang ada di Umbul ciblon. PT Mina tidak hanya menjual Ikan yang usia siap konsumtif

tetapi juga menjual bibit ikan untuk budidaya kepada pelanggan yang ada diluar desa. Selain ikan nila PT Mina juga mengembangkan budidaya ikan air tawar yang lain seperti ikan koi, mujaer , dan udang galah. di Desa Ponggok terdapat 45 peternak nila dengan produksi rata-rata 1,5 ton nila per hari.





Gambar 4. 9 Budidaya Ikan

f) PT. Air Ponggok (APO)

Pemanfaatan sumber mata air yang jernih tidak hanya digunakan untuk budidaya ikan, namun juga dikembangkan oleh PT. Air Ponggok (APO) yang mengelola sumber air menjadi air minum kemasan dan air bersih. PT Air Ponggok ini juga berada dibawah naungan BUMDes Tirta Mandiri, namun PT Air Ponggok ini masih belum memiliki pabrik untuk mengelola air kemasan. Pembangunan pabrik air minum kemasan ini masih terkendala dana. Jadi untuk saat ini Perusahaan APO masih mengelola air bersih.

g) PT. Banyu Panguripan

Selain memanfaatkan sumber mata air, BUMDes tirta mandiri juga memanfaatkan tanah kas desa untuk membangun sebuah gedung untuk disewakan sebagai tempat hajatan dan event yang di kelola oleh dikelola oleh PT. Banyu Panguripan. Selain gedung PT. Banyu Panguripan juga mengelola persewaan kursi dan meja. Persewaan Gedung, kursi dan meja ini tidak hanya ditujukan untuk warga ponggok, tetapi desa-desa lain juga dapat menyewa gedung tersebut. Gedung ini terletak di sebelah kantor desa.



Gambar 4. 10 Penggunaan Gedung sebagai acara Lomba Paud

h) PT. Boga Raharja

Untuk melayani kebutuhan bahan pokok BUMDes juga menyediakan bahan pokok Seperti beras dengan harga yang murah karna beras tersebut merupakan pembelian langsung dari petani Ponggok. Pengelolaan bahan pokok ini dikelola oleh PT. Boga Raharja. Dengan adanya PT. Boga Raharja, petani yang ada di Ponggok tidak harus bingung menjual hasil panen mereka, selain itu petani lebih diuntungkan karena hasil panen mereka langsung dibeli oleh distributor secara langsung, tanpa melalui tengkulak. Berdasarkan pernyataan Bapak Santoso Direktur PT Boga Raharja menjelaskan bahwa:

*“Tujuan pendirian PT. Boga Raharja sebenarnya ingin membantu petani dan masyarakat. PT Boga menyediakan Bahan Pokok seperti beras, tujuannya ialah agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh jika ingin membeli beras dan harga beras yang kami jual memiliki harga lebih miring dari harga beras yang ada dipasaran. Kami bisa memberikan harga lebih murah karena kami membeli beras langsung dari petani. Tujuan kami membeli langsung dari petani yaitu agar petani juga tidak bingung lagi menjual hasil panen mereka, selain itu agar petani juga mendapat harga yang pantas dari hasil panen mereka. Harga beras yang tinggi dipasaran sebenarnya karena banyaknya tangan yang bermain disana mbk, coba saja perusahaan langsung beli langsung kepada petani atau petani langsung menjual kepada perusahaan, tentu harga beras tidak akan semahal sekarang, ini yang ingin kita terapkan”.* (wawancara pada tanggal 2 april 2019).

Selain Beras, PT Boga Raharja juga menyediakan kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat-obatan untuk pertanian. Hal ini bertujuan memfasilitasi para petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian lebih mudah dan tentunya harga lebih murah. Tujuan pendirian PT Boga Raharja adalah memberikan sarana

dan prasana bagi warga dalam meningkatkan usaha mereka. Menurut penuturan Ibu Kadus 1 Ibu stevani menyatakan:

*“Kami dari pemerintahan juga memberikan fasilitas untuk para petani mbak, kami menyediakan pupuk dan obat-obatan untuk kebutuhan pertanian. Selain itu kami juga menyewakan alat pertanian seperti traktor, jadi para petani sekarang gak usah bingung-bingung lagi kalo kalau mau sewa traktor, cukup ke BUMDes semua sudah ada”.* (wawancara pada tanggal 14 januari 2019)

## 2) Infrastruktur

Capaian pembangunan yang dapat terlihat pertama kali oleh pihak luar adalah insfrastruktur, baik jalan, jembatan, talud dan pembangunan sarana dan prasarana umum. Prestasi Desa Ponggok dengan meningkatnya PAD yang di miliki dan adanya dana desa serta ADD tentu membuat dana Desa Ponggok semakin meningkat dari tahun-ketahun hal ini tentu berbanding lurus dengan pembangunan insfrastruktur seperti tempat wisata (yang dijelaskan pada bagian sebelumnya), jembatan, talud, MCK umum, serta jalan. Menurut penuturan kaur Perencanaan Bapak Sunarno bahwa:

*“sekarang ini jembatan, dan jalan di ponggok sudah hampir tidak ada yang rusak mbak, kira-kira 90% sudah bagus baik yang jalan utama ataupun jalan-jalan RT atau gang-gang kecil. Fokus penganggaran kita saat ini sebenarnya kalau untuk infrastruktur hanya untuk pemeliharaan”.* (Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2019)

Sama dengan pernyataan Bapak sunarno saya mewawancarai salah satu warga ponggok yang menjadi pedagang yaitu ibu Sunarti:



*“ Dulu sebelum Ponggok maju seperti sekarang ini, Ponggok ini sepi sekali mbak, jarang sekali ada kendaraan yang lewat di depan balai desa ini. Jalanan juga masih rusak dan lobang-lobang, jadi dulu kita jualan juga sepi. Sekarang jalan-jalan sudah bagus mbak”.* (Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2019)



Gambar 4. 11 Jalan Raya Utama Desa Ponggok



Gambar 4. 12 Toko Desa dan BUMDes Desa Ponggok

### 3) Pemberdayaan

Sebagai bukti nyata proses pemberdayaan masyarakat yaitu dilibatkannya masyarakat dalam proses penggalian gagasan arah pembangunan desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam musrembangdes yang kemudian digunakan sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang selanjutnya di terapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam proses pelaksanaannya pun pemerintah desa melibatkan kelompok-kelompok kecil sebagai pelaksana kegiatan terutama kelompok masyarakat setempat, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan penerima manfaat (masyarakat umum). Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah desa telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan sumber daya yang ada dalam rangkaian proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

#### a) Beasiswa Sarjana

Selain perekonomian masyarakat yang meningkat, dampak lain dari perkembangan Desa Ponggok ialah tingkat pendidikan masyarakat yang juga meningkat, dimana setiap tahunnya minat masyarakat untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke universitas mengalami kenaikan, hal ini tentu bukan tanpa sebab, pemerintah desa ponggok memiliki program satu rumah satu sarjana, hal ini dijelaskan oleh Ibu Ratih Ayu kaur keuangan:

*“Desa ponggok memang memiliki program satu rumah satu sarjana, karna melihat bahwa sarjana di Desa Ponggok ini masih sedikit, padahal masa depan Ponggok berada di tangan anak muda, jika anak muda ponggok tidak meliki tingkat pendidikan yang baik, maka Ponggok tidak akan maju. Melihat hal ini pemerintah melaksanakan program satu rumah satu sarjana dengan memberikan beasiswa kepada para pemuda-pemudi ponggok yang melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas sebesar Rp. 250.000 setiap bulannya. Setiap tahunnya minat pemuda-pemudi untuk malanjutkan kuliah mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah pemuda/ pemudi yang melanjutkan untuk berkuliah sebanyak 30 orang, pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 40 orang”.* (Wawancara pada tanggal 2 April 2019)

b) Jaminan Kesehatan

Pemerintah Desa ponggok ingin menjamin kebutuhan warganya baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pemerintah memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat dengan nama jamkesdes. Pemberian Jamkesdes ini yaitu untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat. Pemberian jamkesdes ini telah merata diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan desa.



Gambar 4. 13 Pemeriksaan dan pengobatan gratis

c) Kesadaran Hidup Sehat dan Bersih semakin meningkat

Kemajuan Desa Pongkok tidak hanya saja berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya, namun disisi lain kemajuan dari Desa ini memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan. Setiap bulan tepatnya pada hari minggu awal bulan masyarakat tepatnya ibu-ibu melakukan sapu bersih pada pagi hari dimulai pukul 06.00 pagi. Selain itu setiap 3 rumah memiliki tempat sampah, sebelumnya masyarakat membuang sampah mereka ke sungai.

d) Bantuan Kepada petani

Selain sebagai pegawai BUMDes Tirta Mandiri, masyarakat Desa Pongkok juga sebagian menjadi petani. Sebanyak 48 orang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Untuk membantu para petani maka pemerintah Desa menyediakan kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat-obat pertanian

dan tractor dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Upaya pemberian pupuk dan obat-obatan pertanian merupakan salah satu kepedulian pemerintahan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok Dapoktan untuk meningkatkan hasil panen mereka untuk kesejahteraan para petani.

e) PKK

Pemerintah Desa Ponggok memiliki perencanaan yang berbeda, pemerintah telah memikirkan perencanaan mereka dengan matang, setelah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat maka pemerintah juga menyediakan pasar untuk produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat. Desa Ponggok memiliki kelompok-kelompok wanita yang tergabung dalam kelompok PKK. Setiap kelompok PKK setiap dusun memiliki produk olahan yang berbeda-beda. Pada Dusun 1 kelompok PKK ini mengelola catering dan telah bekerja sama dengan pemerintah Desa Ponggok untuk menyediakan snack dan nasi ketika ada tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Ponggok untuk melakukan study banding. Selain penyediaan snack untuk tamu-tamu Desa kelompok PKK ini juga menyediakan catering bagi masyarakat yang memiliki hajatan. Kini kelompok PKK ini telah meraih omset hingga 125 juta setiap bulannya. Berikut penjelasan dari Kadus 1 Ibu Anindiayuri stevani:

*“Adanya ide untuk menggerakkan ibu-ibu PKK adalah dari Pak Lurah, beliau menyatakan bahwa tamu BUMDes hampir setiap hari 200 hingga 300 orang. Untuk manjamu tamu-tamu ini sebelumnya pemesanan snack dan makanan memesan dari luar desa. Kemudian pak lurah menyatakan dari*

*pada diberikan kepada orang lain, kenapa tidak memanfaatkan ibu-ibu PKK untuk menyediakan snack dan makan. Kemudian pak lurah mensosialisasikan hal ini kepada ibu-ibu PKK untuk membuat sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian kami memberikan pelatihan pembuatan kue. Jadi sekarang untuk memberi jamuan tamu-tamu BUMdes tirta mandiri dan tamu pemerintah desa kita memesan dari ibu-ibu PKK”.* (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2019)

f) UMKM

Berbeda dengan dusun 1, dusun 2 mengelola snack olahan ikan air tawar. Snack olahan ikan ini merupakan snack olahan dari ikan air tawar yang dikelola oleh ibu-ibu PKK ponggok melalui kelompok UMKM yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa. Kelompok UMKM ini tidak hanya menyediakan snack kering dari ikan, tetapi mereka juga memiliki kreatifitas yang tinggi dengan membuat berbagai olahan dari ikan seperti: cendol, pastel, dan pangsit ikan. Untuk mendorong kreasi anggota PKK Ketua PKK Ibu Ratna sering menyelenggarakan lomba olahan ikan antar kelompok PKK.

Ide pembuatan snack ikan air tawar ini merupakan ide bisnis yang luar biasa, di mana dari kegiatan ini pemerintah telah menyelesaikan dua PR. Masyarakat yang melakukan budi daya ikan tidak akan bingung dan kesulitan untuk menjual ikan mereka, di sisi yang lain kelompok UMKM yang mengelola produk olahan ikan akan dengan mudah menemukan ikan untuk produk olahan mereka. Hasil dari olahan ikan ini akan di jual di toko milik desa. Selain di toko desa kita juga dapat merasakan snack ikan ini dengan ukuran kecil ketika mengunjungi wisata umbul ponggok. Bergeraknya

UMKM di Desa ponggok tentu bukan tanpa alasan, menurut kepala Dusun 2 ibu Wahyu:

*“UMKM di Ponggok Ini bisa seperti sekarang tentu butuh proses mbak, karena untuk menggerakkan kelompok itu tidak mudah dan butuh sesuatu untuk memotivasi mereka. Hampir setiap taun kita pemerintah Desa Ponggok memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat, melalui program kegiatan inilah maka munculah ide pembuatan produk olahan berbahan dasar ikan karena di Ponggok ikan air tawar terutama nila sangat banyak. Kemudian berdirilah UMKM ini yang terdiri dari ibu-ibu yang diketuai oleh Ibu Ratna Ibu Kepala Desa. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2019)*



Gambar 4. 14 Produk UMKM Desa Ponggok



Gambar 4. 15 Kegiatan UMK Nila Murni Desa Ponggok

#### 4) Penghargaan

Selain sebagai Desa mandiri Ponggok juga meraih berbagai kejuaraan lomba Desa/Kelurahan antara lain:

- a) Tingkat Kabupaten (lomba Desa/Evaluasi perkembangan desa): Juara I tahun 2018
- b) Tingkat Kecamatan (Administrasi Desa) : juara I tahun 2015
- c) Tingkat Kabupaten (Administrasi Desa) : juara III tahun 2015
- d) Tingkat provinsi (podakan) : Juara I tahun 2013
- e) Tingkat provinsi (posyandu Desa): Juara I tahun 2012
- f) Tingkat Kabupaten (PKK) Juara I tahun 2012
- g) Tingkat Kecamatan (Administrasi Desa) : juara III tahun 2018



### **3. Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Desa Ponggok**

Capaian pembangunan Desa Ponggo tidak bisa dilepaskan dari peran Kepala Desa Junaedi Mulyono, SH, yang menjabat pada tiga periode. Posisinya sentral dalam memimpin perubahan Desa Ponggok menjadi desa yang mandiri dan percontohan pengelolaan desa nasional. Kepala Desa Junaedi Mulyono, bercerita kebanggaannya dikunjungi oleh tokoh nasional dan pejabat pemerintah pusat, seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan sering dijadikan contoh oleh Presiden Joko Widodo. Peneliti melihat kemampuan Kepala Desa Junaedi Mulyono berhasil merubah internal birokrasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Ponggok dalam memaksimalkan potensinya.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Kepala Desa Ponggok menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan harus dilihat dari akar permasalahannya, dengan melihat data dari bawah dengan melakukan pemetaan data tentang potensi desa serta permasalahan

masyarakat yang dihadapi. Dengan memiliki data permasalahan yang akurat maka selanjutnya disusunlah RPJMDes yang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kepala Desa Ponggok Pak Junaedi menyatakan:

*“Permasalahan yang dihadapi masyarakat ponggok ialah masalah ekonomi, dimana mereka tidak memiliki pekerjaan. Maka untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Jika desa lain isi dari RPJMDes nya adalah kebanyakan pembangunan fisik seperti talud maka permasalahan yang sebenarnya tidak akan terselesaikan. Kita harus melihat potensi desa yang dapat dikembangkan sehingga dapat membawa desa dalam perubahan. Sebenarnya kita dalam bekerja harus mengingat kembali visi dan misi awal kita”. (Wawancara pada tanggal 02 april 2019)*

Peran pemimpin sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di tingkat Dusun dari 12 RT diantaranya, pemasangan lampu penerangan jalan yang ada di dusun 2 dilakukan dengan bergotong royong bersama-sama, perbaikan parit/got, perbaikan jalan dan semenisasi pada Dusun 1 perbaikan dilakukan dengan gotong royong. Pengaruh, dukungan dan motivasi dari pemimpin akan selalu dinantikan oleh

masyarakat dan juga sebaliknya pemimpin mengharapkan dukungan dari masyarakat agar pelaksanaan pembangunan di Desa Ponggok dapat berjalan dengan baik.

Adapun indikator-indikator peran kepemimpinan dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilihat dari: pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individu. Dalam konteks Desa Ponggok, keempat indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**a) Pengaruh Ideal**

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting bagi pemerintah desa, dimana Kepala Desa Ponggok selalu mengajak aparatur desa serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program

pembangunan desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Kepala Desa Bapak Junaedi bahwa:

*“Saya selalu mengajak warga ikut serta dalam setiap program desa yang kita buat, selain itu juga saya memberikan arahan kepada perangkat Desa serta tokoh-tokoh desa untuk selalu mengajak warga dalam pertemuan untuk selalu aktif ikut serta dalam program bergotong royong dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seperti perbaikan fasilitas umum seperti jalan, parit, dan menjaga fasilitas-fasilitas yang telah kita bangun hal ini bertujuan agar warga memiliki rasa memiliki dan akhirnya ikut merawat asset desa bersama”.*(Wawancara pada tanggal 2 April 2019)

Sebagai Kepala Desa Ponggok harus mampu menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan lainnya, serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kepentingan orang banyak, serta kepentingan lainnya untuk jangka panjang. Kepala Desa Ponggok menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan harus dilihat dari akar permasalahannya, dengan melihat data dari bawah dengan melakukan pemetaan data tentang potensi desa serta permasalahan masyarakat yang dihadapi. Dengan memiliki data permasalahan yang akurat maka selanjutnya disusunlah RPJMDes yang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kepala Desa Ponggok Pak Junaedi menyatakan bahwa:

*“Permasalahan yang dihadapi masyarakat ponggok ialah masalah ekonomi, dimana mereka tidak memiliki pekerjaan. Maka untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Jika desa lain isi dari RPJMDes nya adalah kebanyakan pembangunan fisik seperti talud maka permasalahan yang sebenarnya tidak akan terselesaikan. Kita harus melihat potensi desa yang dapat dikembangkan sehingga dapat membawa*

*desa dalam perubahan. Sebenarnya kita dalam bekerja harus mengingat kembali visi dan misi awal kita”.* (Wawancara pada tanggal 02 april 2019)

Partisipasi masyarakat pada Desa Ponggok dalam usaha pembangunan dapat dikatakan cukup baik dimana adanya kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya kerjasama untuk membangun desa. Partisipasi tersebut tidak hanya dalam perencanaan saja tetapi juga dalam proses pelaksanaan program juga ikut terlibat. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan, dimana pada saat berada disana masyarakat Desa Ponggok sedang mengadakan musyawarah mengenai penyusunan program-program desanya. Selain itu masyarakat disana juga sedang giat-giatnya melakukan perbaikan jalan-jalan menuju tempat wisata. Selain itu, perbaikan jembatan usaha tani dan pelebaran parit/got masih terus di lakukan.

#### **b) Motivasi Inspirasi**

Peranan motivator dalam proses pembangunan desa sangatlah penting, pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di desa Ponggok agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Kepala Desa juga harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga tercapai tujuan bersama guna

memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Menurut Bapak Sri Mulyono BPD Desa Ponggok menyatakan:

*“Warga desa ponggok ini setiap 35 hari itu memiliki pertemuan rutin mbak, yang dihadiri oleh BPD, dalam pertemuan ini, masyarakat akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada didesa, baik jalan yang rusak, penerangan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dibutuhkan. Momen perkumpulan ini biasanya kalau pak lurah ada waktu dan tidak keluar kota dimanfaatkan beliau untuk memberikan sosialisasi mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan mengajak masyarakat untuk menjaga jalan, jembatan ataupun talud yang telah dibangun agar bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu kepala desa juga memberikan arahan agar masyarakat ikut memajukan usaha-usaha desa yang telah dimiliki karena usaha-usaha desa merupakan sumber pedapatan mereka dan sumber dana bagi pembangunan desa”.*(Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019)

Kepala pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Ponggok akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Ponggok karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa. Hal ini terlihat bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator telah memberikan motivasi atau dorongan kepada warga desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa.

Kepala Desa dibutuhkan sebagai motivator, hal ini agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian terlihat bahwa peran Kepala Desa sebagai motivator sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa serta menumbuhkan rasa memiliki. Motivator dari kepala desa tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa ponggok karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa.

#### **c) Stimulasi Intelektual**

Dengan adanya fasilitasi pemerintah Desa diharapkan masyarakat desa dapat mengikuti program-program desa yang sudah ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa karena untuk tahun ini saja program Pembangunan Fisik yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Dari rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat perubahan yang signifikan khususnya pada percepatan pembangunan desa khususnya di Desa Ponggok. Kepala Desa Sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya.

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat tumbuh sejalan karena adanya pengaruh kepemimpinan dari tokoh-tokoh desa. Pengaruh positif terhadap pola pikir masyarakat untuk bisa maju bersama membangun Desa Pongkok bersama-sama dengan bekerjasama dengan pemerintah desa dalam menyukseskan setiap program serta kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama. Selain Kepala Desa yang selalu memberikan pengaruh ideal kepada masyarakat untuk bisa membawa desa maju ada peran tokoh masyarakat seperti BPD yang bergerak aktif untuk memberikan fasilitas kepada warga untuk menampung keluhan serta saran dari masyarakat serta memberikan edukasi terhadap warga untuk berani mengutarakan uneg-uneg serta ide-ide kreatif untuk kemajuan desa. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara bersama warga desa pongkok Bapak Imam:

*“BPD Desa Pongkok ini bisa dibilang bagus mbak. Pemilihan BPD juga terbuka, dimana pemilihannya dilakukan mulai ditingkat RW hal ini dilakukan secara terbuka melalui rembung warga, dimana anggota yang terpilih menjadi BPD merupakan pilihan warga bukan hasil penunjukan Bapak Kepala Desa. BPD disini juga selalu aktif mengajak warga untuk berani mengusulkan kegiatan dalam acara musrembangdes mulai tingkat RT, kami disuruh mengusulkan apa yang dibutuhkan lingkungan kami, apa toilet umum, atau perbaikan jalan, atau pelatihan, atau program bantuan untuk petani. Kami disini didorong untuk berani bicara tanpa takut karena uang yang dipergunakan dalam pembangunan desa merupakan uang milik warga juga, sehingga kami harus ikut terlibat. Jadi sekarang warga semakin berani untuk memberikan usulan serta menanyakan kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah desa”. (Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019).*





Gambar 4. 16 Musyawarah Pengisian BPD Tingkat RW

Sesuai fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Peran aktif serta pengaruh BPD terhadap pembangunan Desa cukup besar, tanpa adanya Badan Permusyawaratan Desa yang bergerak aktif maka usulan kegiatan warga tidak akan tersampaikan dengan baik. Fungsi kontrol pengawasan terhadap Pemerintah Desa sangat penting dimana fungsi kontrol ini untuk mengingatkan Pemerintah Desa terhadap visi misi desa yang menjadi tujuan utama.

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator sejauh ini sudah berjalan dengan baik, itu terlihat bahwa kepala desa bersedia untuk membantu masyarakat desa untuk memperlancar kegiatan-kegiatan pembangunan desa, selain memberikan kemudahan untuk memperlancar pembangunan desa Kepala desa selalu melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut dalam program pemerintah. Dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi Kepala Desa hal itu dapat dilihat hingga sekarang baik dari pembangunan fisik yang hanya melakukan perbaikan maupun pembangunan fisik yang baru dibangun. Jadi terlihat bahwa kemampuan pemerintah desa dalam hal ini yaitu Kepala Desa sebagai fasilitator sudah cukup baik melayani masyarakat desa khususnya di Desa Ponggok untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat guna untuk kepentingan bersama. Menurut para perangkat desa pak lurah memiliki kepribadian yang baik dan bisa dikatakan sebagai fasilitator, hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dusun II Ibu Wahyu sebagai berikut:

*“Pak lurah memang sangat sibuk, beliau sering diundang ke acara-acara untuk menjadi narasumber, walaupun pak lurah sibuk tapi beliau selalu mengawal kegiatan atau pembangunan yang sedang dilaksanakan. Setiap satu minggu sekali pak lurah secara langsung meninjau langsung lokasi-lokasi yang sedang dilaksanakan pembangunan. Ketika beliau tidak dapat melakukan kunjungan secara langsung beliau tetap mengawal dengan menanyakan lewat whatsapp bagaimana perkembangan pelaksanaan kegiatannya, jika ada masalah maka pak lurah membuat peta permasalahan dan memberikan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut”. (Wawancara pada tanggal 14 Januari 2019).*

#### **d) Konsiderasi Individu**

Kepala Desa merupakan sosok yang diharapkan selalu mendengarkan keluhan kesah masalah yang dihadapi warganya baik dalam hal kesehatan, ekonomi, sarana dan prasana dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan warganya. Selain mendengarkan keluhan kesah warga, kepala desa juga harus memberikan perhatian kepada bawahannya sebagai bentuk perhatian, dimana hal ini sangat mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannya dan dapat meningkatkan produktivitas bawahan. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk memperlakukan bawahan secara individu dan mengekspresikan penghargaan untuk setiap pekerjaan yang telah dilakukan.

Peran Kepala Desa Ponggok sebagai konsiderasi individu sudah cukup baik dimana kepala desa lebih sering menyapa warga secara langsung dengan mendatangi warung warga untuk mengajak warga mengobrol secara langsung untuk mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi warga. Permasalahan warga tidak hanya didengarkan oleh Bapak kepala Desa namun permasalahan yang telah disampaikan warga selanjutnya di diskusikan bersama untuk mencari solusi akan permasalahan tersebut bersama-sama warga secara langsung. Selain mendengarkan keluhan kesah warganya, Bapak Junaedi juga memberikan perhatian kepada bawahannya dengan menyapa setiap pegawai dan menanyakan apakah ada permasalahan yang belum bisa ditangani dan memberikan solusi permasalahan tersebut. Hal ini diperjelas dari pernyataan kaur umum Bapak Laskar:

*“ Untuk Bertemu Bapak Kepala Desa itu susah mbak, karena Bapak Kepala Desa itu jarang ke kantor. Bapak itu bukan orang yang suka kerja duduk ngadep meja. Jadi Bapak lebih sering keliling-keliling Desa menyapa warga langsung dan melihat progres pembangunan yang sedang dikerjakan secara langsung, selain itu Bapak lebih sering melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tenaga ahlinya bapak”. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019)*



Gambar 4. 17 Kepala Desa dan Warga sedang berdiskusi

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Pada tingkat desa ada beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program pada forum musyawarah RT. Setelah menghimpun gagasan dan usulan ditingkat RT dilanjutkan menghimpun usulan dari beberapa RT untuk dibawa musyawarah tingkat desa untuk mewakili skala prioritas ditingkat dusun. Tahapan terakhir pada tingkat desa yaitu

dengan mengadakan forum musyawarah rencana pembangunan desa dengan memberikan hasil kesepakatan bersama untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Desa Ponggok pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Untuk anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan operasional desa kemampuan anggaran digunakan. Namun sekarang ponggok dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan dengan kondisi keuangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana ponggok dapat berdaya dengan pendapatan asli desa (PADes) yang cukup besar. Hal ini karena Desa Ponggok telah mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi sebagai pendapatan asli desa. Sumber dana sebagai faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

Pada tahun 2001 ponggok menjadi Desa tertinggal dan termiskin di kecamatan polanharjo. Pada tahun 2005 kepemimpinan Desa Ponggok berpindah ke Bapak Junaedi. Pada saat itu bapak Junaedi melakukan study banding ke Bali, kemudian menerapkan ilmu yang didapat dari hasil study banding. Pak kades berfikir bahwa ponggok memiliki potensi yang besar, tapi kenapa gak dimanfaatkan. Sebelumnya umbul ponggok hanya dipergunakan untuk mencuci dan mandi. Kemudian tercetuslah ide untuk mengelola umbul ponggok menjadi objek wisata dan mendirikan badan usaha milik desa pada tahun 2011 dari modal kurang dari 500.000.000 dari uang pribadi pak lurah dan alokasi dana dari desa, pada tahun

pertama dan tahun kedua mengalami kerugian, kemudian pada tahun 2013 mulai mengalami untung. Pada awalnya BUMDes hanya mengelola umbul ponggok. Sekarang BUMDes mengelola Umbul Ciblon, umbul besuki, kios-kios yang ada di depan kantor Desa, toko desa, pertanian penjualan pupuk pertanian, tractor dan obat-obat pertanian, kolam ikan untuk disewakan ke masyarakat serta persewaan gedung.

Bapak junaedi bergerak dengan masyarakat yang mau diajak bergerak, diawal hanya sekitar 50% masyarakat yang mau bergerak bersama. Namun setelah Ponggok maju masyarakat percaya akan program yang dijalankan oleh Pak lurah.

Dampak dari Desa Ponggok yang sekarang adalah tingkat kemiskinan yang menurun, kemiskinan menurun karna tingkat pengangguran yang menurun. Dimana sekarang 90% masyarakat usia produktif telah memiliki pekerjaan tetap. Mereka bekerja menjadi pegawai di usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes, PT Aqua, dan berdagang di tempat wisata umbul ponggok, umbul besuki, maupun umbul ciblon. Umbul ponggok merupakan umbul yang berada di Dusun 2, agar tidak terjadi kecemburuan antar dusun maka di dusun 1 juga dibangun wisata yaitu umbul sigedang kapiler yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang bernama pokdarwis (kelompok sadar wisata) agar masyarakat juga merasakan dampak dari wisata, masyarakat bisa menjadi tukang parkir dan berdagang. Pemerintah desa ponggok juga tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan pekerjaan pada pria, namun ibu-ibu rumah tangga dan para wanita yang tidak memiliki kegiatan diberikan kegiatan agar memiliki penghasilan sendiri untuk membantu menambah penghasilan di keluarga mereka.

Salah satu perencanaan pembangunan ponggok yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ini merupakan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan, para ibu-ibu diberikan keterampilan untuk membuat snack dan cara mengelola catering. Setelah adanya pembinaan, maka tugas bagi pemerintah desa yaitu menyediakan pasar. Kebanyakan pemberdayaan tidak memiliki dampak keberlangsungan karena setelah pemberian keterampilan pemerintah tidak memikirkan langkah selanjutnya yaitu bagaimana masyarakat akan menjual produk mereka. Masyarakat yang tidak dapat menjual produk mereka akan mengalami kerugian dan pada akhirnya mereka berhenti untuk berproduksi, maka usaha pemberdayaan akan menjadi sia-sia.

Bapak-bapak POKDARWIS bekerja bahu membahu memperbaiki jalan desa. Salah satu titik jalan mengalami ambles, dan POKDARWIS Desa Ponggok berinisiatif membuat pengerasan mencegah ambrol. Pak Teguh Kuwat, anggota POKDARWIS PONGGOK mengatakan, selain sebagai bagian dari warga menjaga kenyamanan dan keselamatan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama memelihara infrastruktur desa yang menunjang arus wisatawan.

#### **a. Kerjasama**

Membangunan sebuah Desa menjadi Desa yang berdaya dan mandiri bukanlah perkara mudah yang dapat diselesaikan dan dikerjakan hanya oleh pemerintah Desa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu kerjasama masyarakat untuk terlibat langsung didalamnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa bisa dimulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses monitoring atau evaluasi. Dukungan dari masyarakat berupa masukan merupakan modal awal yang sangat penting, dimana masyarakat dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk membawa desa mereka dalam kemajuan. Dalam proses perencanaan usulan masyarakat lokal menjadi bagian yang paling penting, dimana masyarakat lebih memahami keadaan serta masalah yang dihadapi daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Kerjasama yang dilakukan warga Desa Pongkok dalam proses perencanaan yaitu dengan berperan aktif dalam memberikan usulan mereka pada kegiatan musrembangdes baik dari tingkat RT hingga tingkat desa merupakan bentuk partisipasi yang sangat luar biasa dimana mereka ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan desa kedepannya. Selain ikut dalam pemberian usulan warga desa pongkok juga ikut terlibat dalam pembangunan desa dengan ikut serta terlibat dalam program-program yang diadakan oleh pemerintah desa. Selain terlibat masyarakat desa pongkok merupakan masyarakat yang kritis, dimana mereka juga ikut memonitoring kegiatan yang telah dilakukan pemerintah desa dengan mengamati dan mencermati laporan APBDes dengan mencocokkan setiap kegiatan yang telah dilaporkan dengan kondisi lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kaur Keuangan Ibu Ratih Ayu:



*“ Masyarakat Ponggok sekarang partisipasinya luar biasa mbak, acara musrembangdes setiap tahunnya bertambah rame, dimana masyarakat ingin mendengarkan hasil dari musrawarah dan ikut menentukan usulan yang harus menjadi prioritas utama. Sekarang masyarakat juga semakin kritis, mereka menanyakan setiap detail uang yang kami laporkan dalam APBDes yang kita tempelkan, ketika mereka kurang jelas penggunaan dananya mereka tidak sungkan lagi untuk bertanya kejelasan penggunaan dana tersebut”*  
(Wawancara pada tanggal 2 April 2019)

#### **b. Komunikasi dan Adaptif**

Seseorang Kepala desa atau pemimpin memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara, salah satunya menjadi komunikator yang baik. Bagaimana menyampaikan pesan hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkahlaku si penerima pesan. Pentingnya hubungan komunikasi dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah untuk memperbaiki organisasi itu sendiri. Suatu organisasi bisa dikatakan sukses apabila hubungan komunikasi antar anggota berjalan harmonis.

Komunikasi yang baik antar Kepala Desa Ponggok dengan warga dan perangkat desa berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari tersampainya visi dan misi kepada masyarakat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan masyarakat dalam penyusunan serta pelaksanaan berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Ponggok. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program serta kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa bukanlah perkara mudah, dimana masyarakat pada awalnya tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap program-program pemerintah desa, namun komunikasi yang baik yang

disampaikan kepala desa kepada masyarakat dalam menyampaikan program serta dampak dari program tersebut telah menumbuhkan kepercayaan warga terhadap kepala desa. Kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan melihat bahwa program yang telah dilaksanakan memiliki dampak terhadap ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan warga ponggok bapak Suhaidi sebagai berikut:

*“Membangun sebuah kepercayaan bukanlah sebuah perkara mudah, dimana masyarakat sudah kebal akan janji-janji pemerintah, sekarang bukan saatnya lagi sebagai pemerintah hanya memberikan janji namun memberikan bukti nyata kepada masyarakat, dengan melihat langsung hasilnya masyarakat akan percaya dengan sendirinya. Dalam hal ini Bapak Junaedi mengetahui karakteristik warga Desa Ponggok, bahwa warga Desa membutuhkan hasil nyata dari kepemimpinan Kepala Desa yang sekarang, ternyata hal ini dapat dibuktikan dengan membuat Ponggok menjadi desa yang maju. Namun pemerintahan Desa harus tetap bisa menjaga kepercayaan warga dengan baik”. (Wawancara pada tanggal 2 April 2019)*

Namun dalam proses berjalannya pemerintahan Bapak Junaedi terdapat pertentangan dan kritik yang disampaikan warga kepada pemerintahan Desa Ponggok sebagai masukan bagi pembangunan desa, namun kritik yang disampaikan warga dapat dikelola dengan baik oleh perangkat desa dengan berbagai pendekatan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan respon yang baik dari warga bahwa warga berperan aktif dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibawah pimpinan Bapak Junaedi.

### **c. Proaktif**

Keaktifan masyarakat merupakan sebuah dukungan yang besar bagi pemerintah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat pemerintah tidak akan bisa menjalankan semua program yang telah dibuat. Keaktifan masyarakat sekecil apapun akan memberikan semangat bagi pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dukungan masyarakat Desa Ponggok terhadap pemerintahan Desa sangatlah terlihat jelas, dimana masyarakat aktif dalam penyusunan program dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa baik kaum pria, wanita atau anak-anak. Berbagai program pemberdayaan telah diselenggarakan pemerintah desa untuk warga Desa Ponggok. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menambah skill bagi warga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dimana masalah utama Desa Ponggok adalah kemiskinan.

Program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mendapatkan sambutan positif oleh warga. Beberapa program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Ponggok antara lain: pemberdayaan budidaya ikan air tawar yang sekarang ini telah sukses dimana desa ponggok dapat memanen ikan sebanyak 1,5 ton perhari. Selain bapak-bapak, ibu-ibu desa ponggok tidak luput dari perhatian pemerintah desa, dimana ibu-ibu rumah tangga tidak hanya duduk dirumah, tetapi mereka dapat berkegiatan dalam kegiatan PKK yang dikelola dengan baik. PKK Desa Ponggok mampu meraup omset hingga 100-120juta perbulan dengan membuat olahan ikan nila dan mengelola catering. Selain pemberdayaan bagi warga masyarakat dewasa, pemerintah desa Ponggok juga mengikutsertakan keaktifan anak-

anak dalam program edukasi yaitu kegiatan Nginggris day dimana dalam program ini anak-anak akan belajar bahasa inggris secara gratis dialam terbuka dengan suasana yang santai. Pernyataan yang sama disampaikan oleh sekertaris desa Bapak Yani bahwa :

*“Kami setiap tahunya memiliki program pemberdayaan masyarakat mbak, tujuan kami adalah peningkatan SDM dan skill warga desa. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan masyarakat semakin berdaya dan membuka usaha keratf malalui ukm yang tentunya dari segi modal akan kami bantu dan untuk pemasaran kami juga akan bantu memasarkan. Jadi masarakat tidak akan bingung memasarkan produk/jasa mereka. Setiap program pemberdayaan alhamdulillah antusias warga sangat baik, dimana semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang kita buat, seperti pelatihan budidaya ikan, pelatihan computer, serta pelatihan pembuatan snack ikan”. (Wawancara pada tanggal 2 April 2019).*

Sama dengan pernyataan Bapak Yani saya mewawancarai salah satu warga ponggok yang menjadi salah satu anggota PKK Ibu Lastri:

*“Saya dulu seorang ibu rumah tangga biasa mbak gak punya penghasilan, cuma mengandalkan uang dari suami yang menjadi petani. Terus diajakin kegiatan PKK, awalnya saya males mbak, paling cuma acara kumpul-kumpul biasa. Ternyata endak, kita dikasih kegiatan yaitu bikin kue. Sebelumnya kita dikasih pelatihan bikin kue yang enak kayak gimana, trus ngemasnya biar menarik. Kuenya nanti buat ngasih ketamu yang datang ke desa ponggok , kita juga nerima pesanan buat acara nikahan/hajaatan. Lumayan mbak sekarang saya sama ibu-ibu disini ada kegiatan dan punya penghasilan sendiri buat tambah-tambah belanja sama uang saku anak sekolah”. (Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019)*

Selain aktif dalam kegiatan Desa, masyarakat Desa Ponggok memiliki jiwa gotong royong dan kepedulian yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan

masyarakat yang aktif dalam kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan pada hari libur dengan membenahi jalan berlubang, lampu penerangan jalan yang mati dan peduli akan kebersihan lingkungan mereka dalam kegiatan sapu bersih. Warga tergabung dalam kelompok-kelompok paguyuban yang memiliki fungsi dan keaktifan dalam kegiatan Desa berbeda-beda sebagai berikut:

- 1) Karang Taruna PutraTelaga
- 2) Kelompok Sinoman
- 3) Seni Music
- 4) Paguyuban Makam
- 5) Paguyuban Deklit

Kelompok tani yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- 1) Poktan Bogo Raharjo I
- 2) Poktan Bogo Raharjo II
- 3) Pokdakan Bogo Raharjo
- 4) P3A



Gambar 4. 18 Pemanfaatan Selokan air sebagai tempat Budidaya ikan



Gambar 4. 19 Kerja bakti perbaikan jalan berlubang

**d. Inklusif**

Peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan desa disambut positif oleh pemerintah desa. Semua warga yang memberikan usulan atau masukan dalam perkumpulan warga atau musrembangdes akan diterima masukannya tanpa membedakan status dan golongan warga tersebut. Semua warga dapat memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah demi kemajuan desa. Pemerintah Desa Ponggok bahkan mendorong semua warga untuk berani menyampaikan uneg-uneg dan pendapat mereka dalam forum tanpa harus takut dan minder.

Selain perlakuan yang sama terhadap penerimaan masukan warga, pemerintah Desa Ponggok juga memberikan perlakuan yang sama terhadap semua dusun, dimana setiap dusun didirikan tempat wisata hal ini untuk menghindari kecemburuan antar dusun. Selain untuk menghindari kecemburuan hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Desa Ponggok dalam pemeretaan ekonomi setiap dusun. Dengan adanya tempat wisata baru maka akan membuka lapangan kerja baru warga sekitar sehingga semua warga memiliki lapangan pekerjaan.

**e. Edukatif**

Pelibatan masyarakat Desa Ponggok untuk terlibat dalam kebijakan desa diawal menghadapi hambatan akibat tidak terbiasa mengikuti agenda pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakatlah yang aktif untuk membuat usulan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya edukasi yang dilakukan pemerintah desa untuk warganya agar memahami proses kebijakan secara formal dan pendidikan

demokrasi di desa lebih nyata dirasakan masyarakat. Pemerintah Desa Ponggok juga mendukung program pendidikan dengan meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya dengan memberikan akses pendidikan formal dan informal bagi warga miskin dengan memberikan kartu cerdas yaitu akses bantuan pendidikan bagi warga miskin.

Pendidikan demokrasi di desa lebih nyata dirasakan masyarakat Pemerintah Desa Ponggok juga mendukung program pendidikan dengan meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya dengan memberikan akses pendidikan formal dan informal bagi warga miskin dengan memberikan kartu cerdas yaitu akses bantuan pendidikan bagi warga miskin. Peningkatan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program satu rumah satu sarjana yaitu program bea siswa ke perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan kerja/Balai

Latihan Kerja/Magang. Serta pembangunan fasilitas pusat studi tematik untuk pusat riset internal maupun riset eksternal yang dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran sekaligus mendukung PAD Desa. Hal ini dibenarkan dari pernyataan Kaur keuangan Ibu Ratih bahwa:

*“Desa Ponggok Sering mengadakan pelatihan untuk kami para perangkat Desa maupun warga. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM Desa serta nantinya kami dapat memberikan pelayanan serta pelaporan secara tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi serta sistem mbak. Jadi setiap tahunnya Desa Ponggok selalu menganggarkan kegiatan pelatihan, pemberdayaan serta program-program edukasi, contohnya kemaren ada pelatihan siskeudes . Kami sebagai perangkat desa sangat senang, dengan adanya pelatihan ini dan dibantu oleh sistem saya*



*mengerjakan laporan keuangan juga lebih cepat dan mudah”*. (Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019).



Gambar 4. 20 Kegiatan Nginggris day Dusun Umbulsari



Gambar 4. 21 Pelatihan Siskeudes tahun 2019

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan pembangunan desa. Secara ringkas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

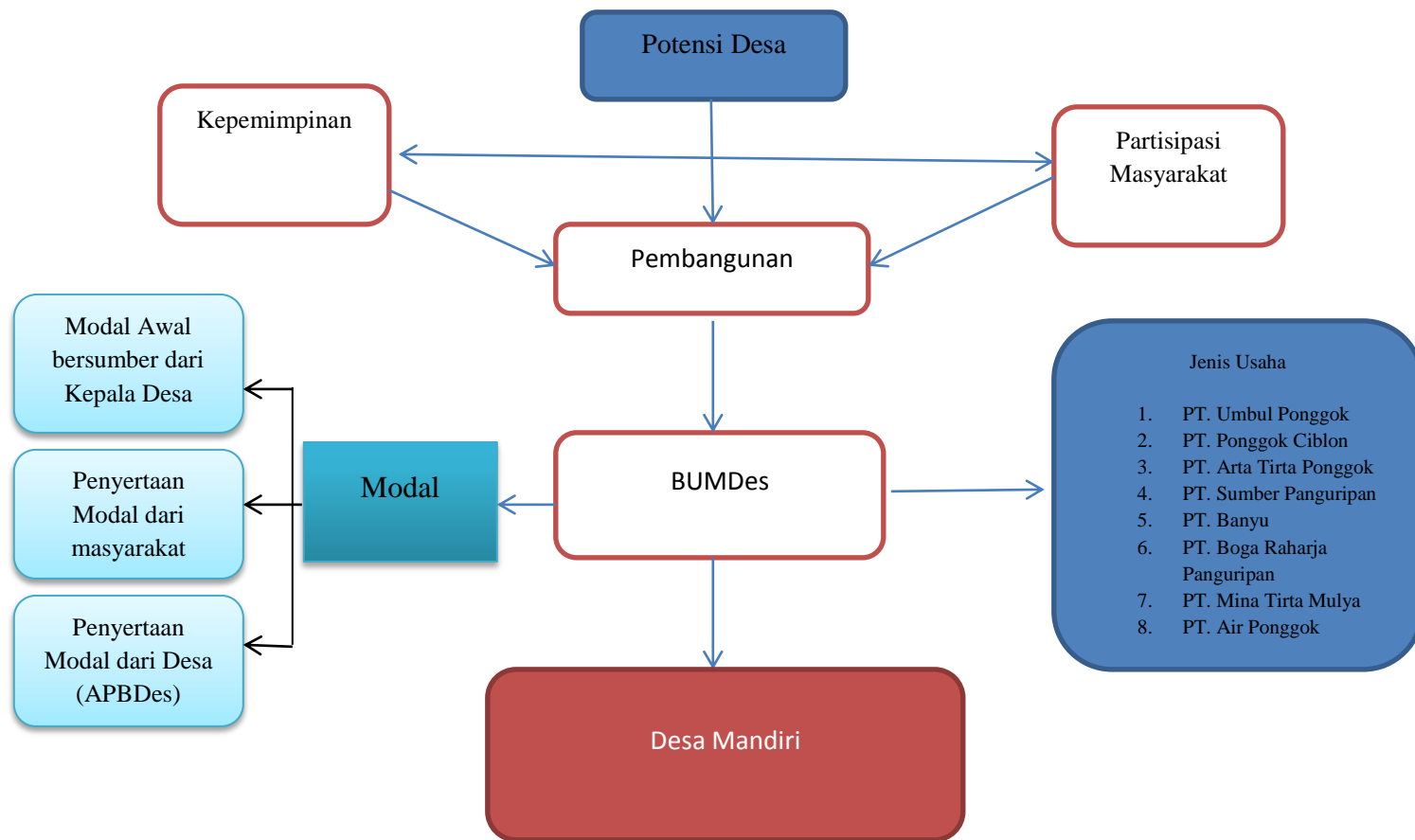
Tabel 4. 6 Kepemimpinan dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa

Kepemimpinan	Partisipasi Masyarakat	Capaian Pembangunan Desa
<p>1. Pengaruh Ideal. Kepala desa mampu untuk mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk memiliki misi bersama yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Ponggok</p> <p>2. Motivasi Inspirasi. Kepala desa memberikan contoh untuk meraih tujuan, sehingga rencana pembangunan dapat berjalan maksimal. Anggaran yang terbatas dapat dipenuhi dengan swadaya oleh masyarakat desa Ponggok.</p> <p>3. Stimulasi Intelektual. Kepala desa memberikan stimulasi intelektual untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, seperti ibu-ibu yang mulai memiliki usaha</p>	<p>1. Kerjasama. Kerjasama di masyarakat desa Ponggok mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi program. Terutama pada saat implementasi, seluruh warga bekerja sama dalam pembangunan.</p> <p>2. Komunikasi dan Adaptif. Komunikasi yang baik dapat mengurangi potensi konflik yang terjadi di desa Ponggok.</p> <p>3. Proaktif. Masyarakat dengan berbagai latar belakang, aktif terlibat dengan menyumbang waktu, tenaga, uang, dan jaringan agar program desa dapat terwujud.</p> <p>4. Inklusif. Seluruh warga didorong untuk ikut terlibat dalam seluruh kegiatan desa, baik dalam proses perencanaan pembangunan sampai evaluasi program. Edukatif. Seiring berjalannya waktu, proses yang partisipatif membuat masyarakat jauh lebih aktif terlibat</p>	<p>1. BUMDes Tirta mandiri dengan anak perusahaan sebanyak 8 perusahaan</p> <p>2. Jalan, jembatan, talud hampir 90% baik. Sarana dan prasarana umum yang cukup lengkap baik dari sekolah, kesehatan, tempat beribadah, tempat olahraga dan gedung pertunjukan dan studio</p> <p>3. Program pemberdayaan yang berjalan sukses dengan berbagai program sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beasiswa Sarjana</li> <li>b. Jaminan Kesehatan</li> <li>c. Kesadaran Hidup Sehat dan Bersih semakin meningkat</li> <li>d. Bantuan Kepada Petani</li> <li>e. Pemberdayaan PKK</li> <li>f. Suksesnya UMKM</li> </ul> <p>4. Desa Ponggok Meraih berbagai Penghargaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kabupaten</li> </ul>

<p>berdagang di sekitar tempat wisata.</p> <p>4. <b>Konsiderasi Individu.</b> Kepala desa mampu mengelola berbagai ide, gagasan yang sering berbeda baik dalam internal pemerintah desa maupun masyarakat.</p>	<p>dalam pembangunan karena adanya pendidikan pengelolaan desa yang berkelanjutan.</p>	<p>(lomba Desa/Evaluasi perkembangan desa): Juara I tahun 2018</p> <p>b. Tingkat Kecamatan (Administrasi Desa) : juara I tahun 2015</p> <p>c. Tingkat Kabupaten (Administrasi Desa) : juara III tahun 2015</p> <p>d. Tingkat provinsi (podakan) : Juara I tahun 2013</p> <p>e. Tingkat provinsi (posyandu Desa): Juara I tahun 2012</p> <p>f. Tingkat Kabupaten (PKK) Juara I tahun 2012</p> <p>g. Tingkat Kecamatan (Administrasi Desa) : juara III tahun 2018</p>
--	--	---

## B. Pembahasan

Bagian ini membahas lebih lanjut mengenai keterkaitan antara BAB II (Tinjauan Pustaka) dengan paparan data pada bagian A BAB VI. Analisa pada bagian ini bukan ditujukan untuk menguji fakta empiris temuan lapangan dengan teori, tetapi menjelaskan fenomena secara teoritis dalam bingkai kepemimpinan dan partisipasi dalam pembangunan, serta implikasinya pada studi akuntansi.



Gambar 4. 22 Kerangka Konseptual Pembangunan Desa Pongkok

Salah satu cara membangun desa adalah dengan menggali dan mengelola semua potensi yang dimiliki desa secara optimal (Pavel dan Moldovan, 2019). Masyarakat dan pemerintah Desa Ponggok telah menyadari potensi yang dimiliki Desa mereka, namun potensi tersebut belum dikelola dengan baik. Desa Ponggok merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya air yang besar. Sumber daya air memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Desa Ponggok, mulai dari pengairan sawah dengan beragam varietas tumbuhan, perikanan tambak, dan air untuk konsumsi sehari-hari. Belakangan ini, muncul usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya air melalui wisata air berupa kolam renang dan air minum bekerja sama dengan perusahaan Danone untuk memproduksi air minum kemasan “Aqua”. Pengembangan potensi tersebut bertujuan untuk memacu pengembangan ekonomi desa. Dua usaha unggulan tersebut dapat merangsang jenis usaha baru dari masyarakat lebih bervariasi dan pendapatan meningkat.

Pengelolaan potensi desa tersebut setidaknya berkembang setelah terpilihnya Bapak Junaedi sebagai Kepala Desa. Usaha menjadikan sumber daya air sebagai potensi pemacu ekonomi desa menjadi prioritas utama. Bapak Junaedi membawa misi bahwa Desa Ponggok harus menjadi Desa yang mandiri melalui pengembangan sumber daya air. Salah satu potensi tersebut dikembangkan menjadi wahana wisata, yaitu Umbul Ponggok. Umbul Ponggok sebelumnya merupakan tempat pemandian yang tidak populer yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis). Untuk meningkatkan pengembangan Umbul Ponggok, pemerintah desa melakukan

komunikasi serta negosiasi agar pengelolaan wisata umbul pongkok dikelola oleh BUMDes. Setelah kesepakatan tercapai, sumber daya desa diarahkan untuk mengembangkan umbul pongkok menjadi tempat wisata yang menarik.

Namun, tantangan besar terletak pada sumber pendanaan yang berasal dari APBDes sangatlah terbatas. Terlebih, sebagai desa dengan ekonomi masyarakat menengah kebawah, alokasi anggaran dibutuhkan untuk membantu berbagai permasalahan yang dihadapi warga. Desa Pongkok merupakan salah satu Desa yang memiliki Pendapatan yang tidak terlalu besar. Pendapatan Desa berasal dari pendapatan transfer dan pendapat lain dari pembagian hasil PT TIV Aqua. Semua dana dari pendapatan tersebut tentu tidak akan cukup untuk membangun desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk mewujudkan misi Desa yaitu membuat desa mandiri dan mengentaskan kemiskinan tentu membutuhkan pendapatan yang lebih besar, untuk menyelesaikan permasalahan ini maka desa harus memiliki pendapatan sendiri tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat.

Salah satu cara agar pendapatan desa bertambah yaitu dengan memperbesar pendapatan dengan melihat kembali setiap sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan lagi. Pendapatan asli Desa merupakan salah satu pendapatan yang masih dapat dan mungkin untuk bisa di tingkatkan lagi, untuk membuat pendapatan asli Desa meningkat tentu dengan mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Desa Pongkok telah membuktikan hal ini dengan pendanaan yang terbilang kecil dapat bangkit dan membangun Desa menjadi desa yang berdaya.

Pada tahun 2018 Desa Pongkok telah memiliki pendapatan tidak kurang dari 4 milyar yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 1 Milyar, pendapatan Transfer sebesar 1,5 Milyar dan pendapatan lain-lain sebesar 1,5 Milyar. Dengan pendanaan yang cukup besar tentu akan mempermudah Desa Pongkok untuk membangun desa lebih maju lagi dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki dari semua sektor.

Keterbatasan anggaran APBDes untuk pengembangan Umbul Pongkok kemudian teratasi dengan pembukaan investasi kepada masyarakat. Alokasi anggaran APBDes menjadi *trigger* bagi modal pembangunan, sedangkan investasi masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan (Swinburn, Goga, dan Murphy, 2006). Dari hasil investasi inilah maka wisata umbul pongkok mengalami renovasi. Setelah adanya renovasi tentu merubah tampilan umbul pongkok menjadi lebih menarik dan membuat para wisatawan tertarik untuk datang.

Seluruh proses pembangunan tersebut, peran kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat sangat besar. Dalam hal kepemimpinan kepala desa Pongkok, sangat relevan dikaitkan dengan teori kepemimpinan transformatif. Teori ini dikembangkan oleh Burns (1978) untuk menjelaskan pemimpin yang dapat memberikan inspirasi kepada yang lain, baik didalam organisasi maupun ke publik. Pemimpin transformatif mengajak orang lain untuk bergerak mengikuti visinya, dan mendorong pada inovasi dan kreativitas (Amankwaa, Gyensare, dan Susomrith, 2019). Pola kepemimpinan dan partisipasi aktif masyarakat inilah yang membuat

alokasi anggaran APBDes lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan Kepala Desa yang menjadi sorotan di mana dalam dua periode kepemimpinannya telah mampu membuktikan misi Desa Pongkok menjadi Desa mandiri dan Desa wisata. Keberhasilan Bapak Junaedi ini tentu di dukung beberapa faktor yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap kegiatan yang telah di buat. Sebelum melakukan sebuah perencanaan beliau mengumpulkan data serta informasi untuk memulai. Penyusunan rencana melalui musrembang desa dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk menentukan arah pembangunan Desa. Di mulai dengan musrembang tingkat RT kemudian ke tingkat RW maka di bawah usulan tersebut ketingkat Desa untuk di diskusikan bersama melalui musyawarah tingkat Desa (musrembangdes) yang di hadiri oleh masyarakat, BPD, tokoh Desa dan Pemerintah Desa. Pada musyawarah inilah Kepala Desa menyampaikan usulan-usulan kepala desa secara pribadi seperti pengelolaan wisata umbul pongkok dibawah pengelolaan BUMDes, serta pemberdayaan masyarakat desa yaitu kelompok-kelompok Desa untuk memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat dengan memberikan pelatihan agar kelompok-kelompok yang ada desa lebih berdaya.

Setelah perencanaan melalui kesepakatan bersama maka perencanaan di susun kedalam dokumen RPJMDes dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPDes. Berdasarkan dokumen itulah pemeritah desa melaksanakan setiap kegiatan. Di setiap kegiatan yang di laksanakan Kepala Desa menghimbau para warga agar ikut terlibat aktif, tujuan dari keterlibatan warga agar warga memiliki rasa kepemilikan akan



setiap kegiatan tersebut sehingga mendukung kegiatan tersebut berjalan sesuai yang diharapkan. Tahap akhir dari pembangunan yaitu evaluasi, Kepala Desa melibatkan kembali untuk terlibat dalam proses evaluasi dengan meminta pendapat para warga terhadap apa yang telah dilaksanakan sehingga hasil dari evaluasi tersebut menjadi bahan koreksi Pemerintah Desa untuk kedepannya.

Kepemimpinan Kepala Desa Ponggok apabila dilihat menggunakan empat dimensi kepemimpinan transformatif (Bass dan Avolio, 2004), yaitu pengaruh ideal, motivasi aspirasi, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individu. Pertama, pengaruh ideal dapat dilihat dari kemampuan untuk mengajak masyarakat dan stakeholder lainnya untuk memiliki misi bersama yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Ponggok. Penentuan misi bersama untuk fokus pada optimalisasi sumber daya air tersebut kemudian didukung oleh masyarakat luas melalui keterlibatan aktif, baik waktu, tenaga, maupun dana. Hal ini juga berhubungan dengan dimensi kedua yaitu motivasi aspirasi yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menunjukkan cara untuk meraih tujuan dan meyakinkan pengikutnya/warga dapat meraih tujuan. Kepala desa Ponggok menunjukkan bahwa masyarakat berhasil diarahkan untuk meraih tujuan pembangunan melalui langkah-langkah yang telah disiapkan oleh kepala desa. Pada dimensi ketiga, konsiderasi individu, kepala desa Ponggok mampu untuk mempertimbangkan dan mewartakan banyak kepentingan dari masing-masing individu dan kelompok, termasuk juga mengelola konflik dan pertentangan. Oleh karenanya, dalam stimulasi intelektual, kepala desa berhasil

mendorong masyarakat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai hal. Hal ini yang menjadi penjelasan semakin beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendidikan. Menurut Elns dan Keller (2003), menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional dapat berkontribusi pada inovasi dan kreativitas, seperti yang ditunjukkan oleh kepala desa dalam pengembangan Umbul Ponggok, kerjasama dengan Aqua, dan peningkatan produktivitas produk perikanan di Desa Ponggok.

Kepemimpinan transformatif dapat melibatkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada serta membangun hubungan yang baik agar lebih memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan pegawai, dan mengarahkan pada tujuan organisasi (Fitzgerald dan Schutte, 2010). Dalam konteks Desa Ponggok, pelibatan masyarakat ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga mereposisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga tidak hanya sebatas sebagai pelaksana lapangan, lebih luas pemerintah desa melibatkan dalam seluruh proses pembangunan.

Dalam proses pembangunan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap di mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi akan menentukan hasil dari akhir dari pembangunan (Herdiana, 2018). Keterlibatan masyarakat Desa Ponggok dalam pembangunan Desa ini terbilang baik. Keterlibatan masyarakat tentu di dorong oleh beberapa faktor yaitu komunikasi dari Kepala desa dan perangkat desa mengajak

masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan perencanaan dengan menghadiri kegiatan musyawarah dari tingkat paling bawah yaitu tingkat RT dan ikut memberikan usulan serta masukan, hingga mengevaluasi bersama setiap kebijakan. Menggunakan evaluasi partisipasi publik berdasarkan indikator menurut Enserink, Witteveen, dan Lie (2009), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerjasama. Selama proses pembangunan Desa Ponggok, terdapat kerjasama mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Proses musrembang desa dimulai hingga level paling bawah yaitu RT dan RW. Setelah rencana kerja desa dan alokasi anggaran ditetapkan, masyarakat terlibat penuh selama proses pembangunan, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, tenaga, waktu dan dana. Pada proses evaluasi, masyarakat juga bersama melakukan refleksi mengenai capaian pembangunan. Dengan demikian, kerjasama pemerintah dan masyarakat memberikan ikatan kuat karena seluruh stakeholder di desa terlibat.
2. Komunikatif dan adaptif. Kemampuan kepala desa Ponggok dalam melakukan komunikasi sangat baik. Kepala Desa berhasil membagikan visi dan misi sehingga masyarakat dengan aktif terlibat. Walaupun terdapat pertentangan dan kritik, namun dapat dikelola dengan baik untuk memberi masukan bagi pembangunan. Konflik yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga memiliki komunikasi yang lancar.

3. Proaktif. Masyarakat proaktif terlibat dalam seluruh proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda tidak menjadi penghalang kerjasama, karena justru dapat dimanfaatkan dengan berbagai perbedaan latar belakang yang dimiliki. Mulai dari tukang, petani, pedagang, karyawan, PNS dan sebagainya terlibat sesuai dengan keahlian.
4. Inklusif. Pemerintah desa tidak membedakan individu dan kelompok yang ingin terlibat. Pembagian hanya dilakukan di masing-masing padukuhun agar masyarakat lebih fokus pada program dimasing-masing wilayah.
5. Edukatif. Pelibatan masyarakat Desa Ponggok untuk terlibat dalam kebijakan desa diawal menghadapi hambatan akibat tidak terbiasa mengikuti agenda pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakatlah yang aktif untuk membuat usulan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya edukasi yang dilakukan pemerintah desa untuk warganya agar memahami proses kebijakan secara formal dan pendidikan demokrasi di desa lebih nyata dirasakan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan juga cukup tinggi di Desa Ponggok. partisipasi perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi penting untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga menunjukkan keberhasilan pembangunan masyarakat secara lebih luas (Kumari, 2011; Yang, 2012; Karim, et al, 2017). Partisipasi perempuan ini mulai dari tahap menentukan program dan alokasi

anggaram untuk pelatihan pedagang di sekitar tempat wisata di Desa Ponggok, hingga pendampingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun tidak menyumbang sebagai pendapatan utama rumah tangga, pedagang yang mayoritas perempuan merasa lebih berdaya dari sebelumnya yang hanya berada dirumah atau membantu suami dalam pertanian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan menggambarkan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian mengenai Peran Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ponggok.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, perspektif *bottom-up* dalam memahami proses pembangunan desa dapat menunjukkan peran kepemimpinan dan keterlibatan aktif masyarakat secara menyeluruh mempengaruhi setiap perencanaan dan kebijakan alokasi anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan sangatlah berpengaruh besar terhadap kemajuan Desa dalam hal ini adalah Desa Ponggok. Kepemimpinan kepala desa Ponggok dapat dilihat dalam empat indikator, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan konsiderasi individu. Pengaruh ideal dapat dilihat dari pemimpin mampu mengajak masyarakat untuk mau bersama membangun desa. Motivasi inspirasi dapat dilihat dari kemampuan pemimpin mengajak masyarakat berkontribusi dan swadaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran desa. Stimulasi intelektual paling terlihat dari perubahan masyarakat dari petani tradisional mengarah pada jasa industry wisata dan meningkatkan nilai dari produk lokal. Konsiderasi individu dilihat dari kemampuan mengelola perbedaan dalam proses penyusunan program dan anggaran. Kepemimpinan dengan karakteristik demikian dalam mendorong dan memfasilitasi potensi baik

internal pemerintah desa maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga, perencanaan pembangunan hingga evaluasi bersama dapat berjalan dengan efektif.

Sedangkan reposisi masyarakat sebagai sentral dari proses perencanaan terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang dilihat dari kerjasama, komunikasi dan adaptif, proaktif, inklusif, dan edukatif. mampu membuat partisipasi masyarakat berjalan dengan baik. Indikator kerjasama terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi hingga evaluasi program pembangunan desa. Komunikasi dan adaptif dilihat dari potensi konflik yang mampu dikelola dengan baik. Proaktif terlihat jelas dari kemauan masyarakat menyumbangkan tenaga, uang, waktu dan ide dalam setiap program. Inklusif terlihat dari terbukanya kesempatan untuk ikut serta dan menikmati hasil dari pembangunan. Masyarakat saling membantu untuk berkembang bersama baik dari program bersama, maupun meningkatkan kapasitas individu. Edukatif dapat dilihat dari kemandirian masyarakat dalam berusaha dan mengembangkan BUMDes. Hal ini menunjukkan masyarakat belajar mengembangkan bisnis dan terlibat dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat membuat pembangunan di Desa Pongok dalam memanfaatkan potensi sumber daya menjadi maksimal. Tanpa adanya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, sumber daya yang besar tidak dapat dimaksimalkan potensinya. Sumber daya itu berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam merupakan modal bagi Desa untuk mendapatkan pendapatan dari kekayaan alam mereka. Berdasarkan hasil eksplorasi di

Desa Ponggok, Pemerintah Desa Ponggok berhasil melakukan transformasi pemberdayaan masyarakat desa dari berbasis komunitas menjadi BUMDesa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya milik bersama (desa wisata alam: pemandiaan sumber mata air umbul Ponggok) dengan cara melakukan kesepakatan pembagian hasil pendapatan persewaan property (seperti; kamera, pelampung, kaki katak, snorkel, sepeda motor, dan lainnya) melalui sistem investasi bersama kelompok pengelola sebelumnya. Desa Ponggok juga mampu secara finansial merevitalisasi total pemandian umbul Ponggok karena sebagian besar PADes (Rp 1,5 milyar setiap tahun) ditopang dari kontribusi PT. TIV Aqua. BUMDesa Tirta Mandiri dengan sektor unit usaha pemandian umbul Ponggok, serta unit usaha-usaha lain seperti toko desa, persewaan gedung, budidaya ikan, perusahaan air bersih, mampu menghasilkan pendapatan yang kini hingga mencapai belasan milyar setiap tahunnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah Desa Ponggok, perlu adanya regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Hal ini penting karena posisi kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes akan berganti seiring dengan peraturan yang berlaku. Apabila tidak segera dilakukan, ketiadaan pemimpin yang transformasional akan menghambat pembangunan desa kedepannya. Selain itu, perlu promosi dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini seiring dengan



banyaknya desa berbasis wisata dan agribisnis lainnya yang membuat kompetisi memperebutkan wisatawan semakin besar.

2. Saran untuk masyarakat di Desa Ponggok, perlu pengembangan kapasitas yang dapat menyesuaikan perkembangan tren wisatawan. Produk yang telah dihasilkan juga perlu lebih bervariasi.
3. Pemerintah daerah dan pusat. Pemberian dana desa dari pemerintah pusat, dan dana alokasi desa dari pemerintah daerah tidaklah cukup jika hanya berorientasi dana. Perlu pendampingan terkait dengan inovasi program desa di Desa Ponggok. Stimulan anggaran bagi masyarakat juga diperlukan dan diarahkan bagi penyediaan akomodasi wisata agar okupansi akomodasi meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert Amankwaa, Michael Asiedu Gyensare, Pattanee Susomrith, (2019) "*Transformational leadership with innovative behaviour: Examining multiple mediating paths with PLS-SEM*", *Leadership & Organization Development Journal*, <https://doi.org/10.1108/LODJ-10-2018-0358>
- Alkadafi, M. (2014). *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 32-40.
- Alexandru Pavel \* and Octavian Moldovan. *Determining Local Economic Development in the Rural Areas of Romania. Exploring the Role of Exogenous Factors*. *Sustainability* 2019, 11, 282; doi:10.3390/su11010282
- Avolio, B. J., dan Bass, B. M. (2004). *Multifactor Leadership Questionnaire: Manual and Sampler Set (3rd Ed.)*. Redwood City, CA: Mind Garden.
- Beaumont, A. and Nicholls, W. (2008). Plural Governance, Participation And Democracy In Cities, *International Journal of Urban and Regional Research*, 32, pp. 87-94.
- Blakely, Edward J. (1994) *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California, Sage Publications, Inc
- Boonperm, Jirawan, Haughton, Jonathan and Khandker, Shahidur R. (2013). Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics* 25, pp. 3–16.
- Burns JM. *Leadership*. New York: Harper & Row; 1978
- Chandra Kusuma Putra, Pratiwi, dan Suwondo (2016) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Hal. 1203-1212.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dove, R. Michael (1988) *Sistem Perladangan di Indonesia: Studi Kasus di Kalimantan Barat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Elkins T, Keller RT. *Leadership in research and development organizations: a literature review and conceptual framework*. Leadership Quarterly 2003;14: 587–606.
- Enserink, B, Witteveen, L and Lie, R. 2009. Performance indicators for public participation. IAIA09 Conference Proceedings', Impact Assessment and Human Well-Being 29th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, 16-22 May 2009, Accra International Conference Center, Accra, Ghana (www.iaia.org)
- Handra, Hefrizal., Sidik, Machfud., Satria, Sentot., Suhirman., Murniasih, Erny., Suryani, Devi. (2017) *Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Kementerian PPN/Bappenas dan Australian Government.
- Hamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences* (ISSN 2221-1152) Vol. 6, No. 3, pp. 15-23.
- Herdiana D.\*, Suwaryo U., Deliarnoor N.A., Rahmatunnisa M. *the affecting factors of community participation in ruraldevelopment planning: a case of kertawangi village of bandung barat district*. RJOAS, 10(82), October 2018
- Hernandez, Adolfo and Moisa, Laura. (2011). Participation and innovation, the keys to rural development: The case of rural Medellin Participacion e innovacion, claves del desarrollo rural: el caso de la ruralidad de Medellín. *Agronomia Colombiana* 29(2), 293-300.
- Hill, Tosi, Caroll, SJ. (1997). *Organizational Theory and Management: A Macro Approach*, John Willey and Sons Inc, New York.
- Hoy K, Wayne & Miskel G, Cecil. (1987). *Educational Administration Theory Research and Practice*. Third Edition. Random House. New York.
- Kreitner, Robert, and Kinicki, Angelo, (2003), *Perilaku Organisasi, Dalam: Early Suandy (penterjemah)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Koentjaraningrat. (1971). *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Krugman, Paul And Maurice Obstfeld. (1994). *Ekonomi Internasional : Teori Dan Kebijakan*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

- Kumari, K. B. V. (2011). *Microcredit as a poverty alleviation strategy, women's empowerment and gender relations*. The State University of New Jersey, New Brunswick, New Jersey.
- L. Gumusluoglu, A. Ilsev. *Transformational leadership, creativity, and organizational innovation*. *Journal of Business Research* 62 (2009) 461–473
- Mangkoesoebroto, Guritno. (2001). *Ekonomi Pubilk*. Edisi 3. Yogyakarta: FE UGM.
- Martijn J, Smit, Leeuwen, Eveline S. van, Florax, Raymond J.G.M., Henri L.F, De Groot. (2015). Rural development funding and agricultural labour productivity: A spatial analysis of the European Union at the NUTS2 level. *Jurnal Asian economy* Volume 59. Pages 19-26.
- Miftah Thoha. (2006). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1982). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nordholt, Nico S. (1987). *Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan* . PT Sinar Harapan.
- Rabiul Karim<sup>1,2</sup>, Lene Lindberg<sup>2</sup>, Sarah Wamala<sup>3,4</sup>, and Maria Emmelin<sup>5</sup>. *Men's Perceptions of Women's Participation in Development Initiatives in Rural Bangladesh* . *American Journal of Men's Health* 1– 13. 2017
- Ridlwani, zulkarnain (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No 3
- Rozaki, Abdur., Subhan, Ahmad. (2005). *“Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. Institute for Research and Empowerment (IRE) (Yogyakarta)
- Santoso, Purwo, Hanif, Hasrul , Gustomy, Rachmad. (2004) *Menembus ortodoksi kajian kebijakan publik*. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Siagian, 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : Bumi aksara.

- Slight, Penny., Adams, Michelle., Sherren, Kate. (2016) Policy support for rural economic development based on Holling's ecological concept of panarchy. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology Vol. 23, No. 1, 1–14.*
- Strauss, Anselm. Corbin. Juliet. (2003). *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumardjo dan Saharudin. (2003). *Metode-metode partisipasi dalam pengembangan masyarakat*. Jurusan Ilmu sosial Ekonomi Faperta IPB. Bogor.
- Suroso, Hadi., dkk. (2014). Jurnal: *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pere(ncanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Program Magister Jurusan Ilmu Adminitrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Susan Fitzgerald and Nicola S. Schutte. *Increasing transformational leadership through enhancing self-efficacy* Journal of Management Development Vol. 29 No. 5, 2010 pp. 495-505
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Soetrisno, Loekman. (1998). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Kanisius.
- Swinburn, G.; Goga, S.; Murphy, F. *Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans*; World Bank: Washington, DC, USA, 2006.
- Syafiie, Kencana, Inu, Drs. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Pasolong, Harbani. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta
- Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi *Journal of Management and Sustainability*; Vol. 4, No. 3; 2014 ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733 Published by Canadian Center of Science and Education.

- Wetzstein, Steffen. (2008). In (pre-) Olympic spirit: Assembling the global economic geography community in Beijing, 2007. *New Zealand Geography* Vol 64 issue 1.
- Yang, L. (2012). *Empowered or disempowered? Women's participation in a development project in rural China*. *Asian Journal of Women's Studies*, 18(3), 38–67.
- Yin, Robert K (2003). *Studi Kasus Desain dan metode*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yuki, Gary. (2010). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi Kelima. Jakarta : PT. Indeks.
- Zhenga, Lucy., Batuo, Michael Enowbi., Shepherd, David. (2017) *The Impact of Regional and Institutional Factors on Labor Productive Performance*

# LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERAN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM**  
**PEMBANGUNAN DESA DI DESA PONGGOK KAB. KLATEN**

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengemukakan pedoman wawancara yang merupakan panduan secara garis besar digunakan dan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat. Informan yang dipilih dalam tabel berikut ini:

Tabel Informan dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan	Waktu
1	Bapak Junaedi Mulyono	Kepala Desa Ponggok	2 April 2019
2	Bapak Sunarno	Kaur Perencanaan Desa Ponggok	14 Januari 2019
3	Bapak Sri Mulyono	BPD Desa Ponggok	16 Januari 2019
4	Ibu Stevani	Kepala Dusun 1 Desa Ponggok	14 Januari 2019
5	Bapak Laskar	Kaur Umum Desa Ponggok	16 Januari 2019
6	Ibu sunarti	Pedagang di wisata umbul Ponggok	16 Januari 2019
7	Bapak Joko	Dirut BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok	16 Januari 2019
8	Bapak Sukardi	Petani ikan Desa Ponggok	14 januari 2019
9	Bapak santoso	Direktur PT Boga Raharja	2 April 2019
10	Ibu Ratih Ayu	Kaur Keuangan Desa Ponggok	2 April 2019
11	Ibu Wahyu	Kepala Dusun 2 Desa Ponggok	14 Januari 2019



12	Bapak Imam	Warga Desa Ponggok	12 Januari 2019
13	Ibu Lastri	Warga Desa Ponggok	12 Januari 2019
14	Bapak Yani Setiadi	Sekretaris Desa Ponggok	2 April 2019
15	Bapak Suhaidi	Warga Desa Ponggok	2 April 2019

**Pedoman wawancara dan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Desa serta Warga Desa.**

**1. Demografi**

- a. Apa saja jenis pekerjaan masyarakat Desa Ponggok?
- b. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa ponggok?
- c. Bagaimana kebiasaan masyarakat desa?
- d. Apa potensi desa ponggok?

**2. APBDes**

- a. Bagaimana penggunaan APBDes?
- b. Apakah Penggunaan APBDes telah tepat sasaran?
- c. Apakah program-program pemerintah desa sesuai dengan APBDes?
- d. Apakah dalam penentuan program dalam APBDes masyarakat ikut terlibat?

**3. Dana Desa**

- a. Apakah dana desa memiliki impac terhadap masyarakat secara langsung?
- b. Apakah dana desa memberikan perubahan ekonomi masyarakat desa?
- c. Apakah dana desa penggunaanya telah tepat sasaran?
- d. Apakah dalam penentuan dan pelaksanaan program dalam penggunaan dana desa masyarakat ikut terlibat?

**4. Program Pembangunan Desa Ponggok**

- a. Apa saja program pemerintah desa dalam pembangunan desa?
- b. Adakah program khusus untuk pembangunan desa?

- c. Bagaimana proses pembangunan desa?
- d. Apasaja kendala yang biasanya muncul pelaksanan program-program tsb?
- e. Apakah pelaksanaan sudah sesuai tujuan awal?
- f. Bagaimana penyelesaian masalah yang muncul? Adanya penolakan misalnya?
- g. Siapa yang paling berperan dalam program?
- h. Bagaimana keterlibatan pemerintah desa dalam keberhasilan pelaksanaan program?
- i. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program?
- j. Apakah program sejauh ini berjalan sesuai yag diharapkan?
- k. Programnya banyak ke fisik atau pengembangan ekonomi masyarakat lokal?

**5. Relasi antara kepala desa dan pegawai desa serta masyarakat**

- a. Bagaimana hubungan antara kepala desa dengan pegawai?
- b. Bagaimana hubungan antara kepala desa dengan masyarakat?
- b. Apakah kepala desa selalu menerima masukan dari pegawainya?
- c. Apakah kepala desa selalu menerima masukan dari masyarakat?
- d. Apakah dalam pengambilan keputusan kepala desa melibatkan masyarakat dan perangkat desa?
- e. Apakah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa?
- f. Apakah dalam pelaksanaan program kepala desa mengikutsertakan masyarakat desa?
- g. Apakah dalam pengambilan keputusan kepala desa mempertimbangkan masukan dari masyarakat atau perangkat desa?
- h. Bagaimana sistem kontrol kepala desa terhadap pegawai?
- i. Bagaimana keramahan kepala desa?
- j. Bagaimana kepemimpinan kepala desa?
- k. Apakah kepala desa merupakan pemimpin yang karismatik?

- l. Apakah kepala desa merupakan sosok yang menginspirasi?
- m. Apakah kepala desa selalu memotivasi para pegawai?
- n. Bagaimana hubungan antara kepala desa dan pegawai?
- o. Apakah selalu terjadi komunikasi dua arah antara kepala desa dan pegawai serta masyarakat?
- p. Apakah Kepala desa mengarahkan para pegawai tentang apa yang harus dikerjakan?
- q. Apakah kepala desa memberikan solusi jika terjadi masalah?
- r. Apakah kepala desa memberi ruang untuk para pegawai mendiskusikan masalah yang dihadapi?
- s. Apakah kepala desa juga memberikan perhatian untuk pegawai yang tidak sukses dalam kerjanya?

## **6. Partisipasi masyarakat**

- a. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan desa?
- b. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa?
- c. Apakah masyarakat selalu terlibat dalam setiap program pemerintah desa?
- d. Apa yang memotivasi masyarakat untuk ikut terlibat?
- e. Apakah kepala desa memotivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap program pemerintah desa?
- f. Sejauh mana bentuk keterlibatan masyarakat?
- g. Apakah keterlibatan masyarakat atas kesadaran diri atau karna arahan dari pemerintah desa?
- h. Apa bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa?
- i. Apakah dalam proses partisipasi terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat?
- j. Apakah masyarakat desa ikut terlibat dalam penyusunan program dan kegiatan desa?

- k. Apakah masyarakat desa peduli dengan laporan keuangan/ APBDes yang telah dilaporkan oleh pemerintah desa?

## **7. Capaian pembangunan desa**

- a. Apakah capaian pembangunan desa telah sesuai yang diharapkan?
- b. Bagaimana tingkat pencapaian pembangunan dari segi prasarana dan sarana sistem agribisnis? Bagaimana tingkat pencapaian pembangunan dari segi penguasaan teknologi tepat guna?
- c. Bagaimana tingkat pencapaian pembangunan dari segi pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan?
- d. Bagaimana tingkat pencapaian pembangunan dari segi pengembangan industri kecil dan rumah tangga?
- e. Bagaimana tingkat pencapaian pembangunan dari segi penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat?
- f. Bagaimana proses dalam pembangunan desa?
- g. Siapakah yang paling berperan terhadap tercapainya pembangunan desa?
- h. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam tercapainya pembangunan desa?
- i. Program apakah yang paling berkontribusi dalam tercapainya pembangunan desa?
- j. Apa saja faktor yang membuat pembangunan desa dapat tercapai?

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) PERUBAHAN  
DESA PONGGOK KECAMATAN PKN ANHAR-KY  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran tahun berjalan	Anggaran Perubahan	Keterangan
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.568.353,000</b>	<b>2.537.571,000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>648.800,000</b>	<b>321.800,000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>500.000,000</b>	<b>150.000,000</b>	BUMDes
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	500.000,000	150.000,000	
1.1.1.2	Lumbung desa	-	-	
1.1.1.3	UED-SP	-	-	
1.1.1.4	Hasil kemasama desa	-	-	
1.1.1.5	Pungutan desa	-	-	
1.1.1.6	Retribusi desa	-	-	
1.1.1.7	Hasil usaha lain yang sah	-	-	
1.1.1.8	Dst .....	-	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>121.300,000</b>	<b>146.300,000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	121.300,000	146.300,000	
1.1.2.1.1	Tanah kas desa untuk operasional Pemerintah Desa	14.000,000	14.000,000	Bengkok
1.1.2.1.2	Bengkok Kepala Desa	-	-	
1.1.2.1.3	Bengkok Sekretaris Desa (Bukan PNS)	2.000,000	2.000,000	Bengkok
1.1.2.1.4	Bengkok Sekertaris Desa (PNS)	4.000,000	4.000,000	Bengkok
1.1.2.1.5	Bengkok Kepala Urusan Pembangunan	4.000,000	4.000,000	Bengkok
1.1.2.1.6	Bengkok Kepala urusan Umum	4.000,000	4.000,000	Bengkok
1.1.2.1.7	Bengkok Kepala Urusan Pemerintahan	-	-	
1.1.2.1.8	Bengkok Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat	-	-	
1.1.2.1.9	Bengkok Kepala Urusan Keuangan	4.000,000	4.000,000	Bengkok
1.1.2.1.10	Bengkok Kepala Dusun I	4.000,000	4.000,000	Bengkok
1.1.2.1.11	Bengkok Kepala Dusun II	-	-	
1.1.2.1.14	Bengkok pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Rt,Rw)	45.000,000	45.000,000	Kas
1.1.2.1.15	Tanah desa	300,000	300,000	Kios Ngebakan
1.1.2.1.16	Kios desa	35.000,000	60.000,000	Balai Desa
1.1.2.1.17	Bangunan milik desa / Balai desa	-	-	
1.1.2.1.18	Lapangan milik desa	3.000,000	3.000,000	Banyu Milli
1.1.2.1.19	Obyek pariwisata/rekreasi Banyu Milli	-	-	
1.1.2.1.20	Tanah bukan milik desa yang dikuasai atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh desa	-	-	
1.1.2.1.20	Penjualan hasil tanaman tanah milik desa	-	-	
1.1.2.1.21	Hutan Negara yang dikelola oleh desa	-	-	
1.1.2.1.22	Kekayaan desa lainnya yang sah	2.000,000	2.000,000	Banyu Milli
1.1.2.1.23	Parkir Banyu Milli	-	-	
1.1.2.1.24	Dst .....	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambalan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.6	Hasil eksplorasi potensi desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst .....	-	-	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1.3.1	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta yang berupa uang	-	-	
1.1.3.2	Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat/swasta yang berupa barang dan jasa	-	-	
1.1.3.3	Dst .....	20.000,000	20.000,000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Keterangan/ Sumber Dana
2.2.3.10	Belanja bantuan Sembako Idul Fitri			
2.2.3.11	Dst .....	6.000.000	4.600.000	Pihak III
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.4.1	Belanja bantuan kepada pedukuhan	655.000.000	706.000.000	
2.2.4.2	Belanja bantuan kepada Rw	-	-	
2.2.4.3	Belanja bantuan kepada Rt	300.000.000	300.000.000	Pihak III/PAD
2.2.4.4	Belanja bantuan kepada PKK	-	-	
2.2.4.5	Belanja bantuan kepada PKK & Posyandu	20.000.000	20.000.000	Pihak III
2.2.4.6	Belanja bantuan kepada LPMD/LKMD	-	10.000.000	Dana Desa
2.2.4.7	Belanja bantuan kepada karang taruna desa	-	6.000.000	Kabupaten
2.2.4.8	Belanja bantuan pemilihan/pengisian anggota BPD	-	-	
2.2.4.9	Belanja bantuan pengisian/pemilihan kepala desa	-	-	
2.2.4.10	Belanja bantuan pengisian/pemilihan perangkat desa	30.000.000	-	
2.2.4.11	Belanja bantuan kepada Satgas Linmas	-	-	
2.2.4.12	Belanja bantuan pengisian/pemilihan pengurus rw	-	-	
2.2.4.13	Belanja bantuan pengisian/pemilihan pengurus rt	-	-	
2.2.4.14	Belanja bantuan kepada kelompok tani	5.000.000	5.000.000	ADD
2.2.4.15	Belanja bantuan kepada Panitia HUT RI	-	-	
2.2.4.16	Belanja bantuan kepada Panitia HUT RI	40.000.000	40.000.000	Pihak III
2.2.4.17	Belanja bantuan kepada LKM Trita Mandiri	-	2.000.000	PAD
2.2.4.18	Belanja bantuan kepada PPS & KPPS	-	4.000.000	PAD
2.2.4.19	Belanja bantuan kepada Panitia Pembangunan	250.000.000	101.000.000	Pihak III
	Panitia Pemb. Saluran limbah rumah tangga	-	40.000.000	Propinsi
	Panitia Pemb. Bak air bersih RW 2 Dk. Ponggok	-	10.000.000	Kabupaten
	Panitia Pemb. Sanitasi RT 01/02 Ds. Ponggok	-	3.000.000	Kabupaten
	Panitia Pemb. Talud Jln Dk. Besuki	-	50.000.000	Kabupaten
	Panitia Pemb. Talud Jln Dk. Bekuning	-	25.000.000	Kabupaten
	Panitia Padat Karya Talud sal. Irigasi barat kiringan	-	50.000.000	Kabupaten
2.2.4.20	Belanja bantuan kepada swasta/instansi	10.000.000	10.000.000	PAD
2.2.4.21	Belanja bantuan kepada Panitia pemberdayaan masyarakat	-	30.000.000	Dana Desa
2.2.4.22	Dst .....	-	-	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.5.1	Belanja bantuan bencana alam	-	-	
2.2.5.2	Belanja bantuan keadaan darurat/mendesak	-	-	
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja Subsidi</b>			
2.2.6.1	Belanja subsidi kepada kelompok tani	-	-	
2.2.6.2	Belanja subsidi kepada lembaga kemasyarakatan desa	-	-	
2.2.6.3	Belanja subsidi kepada penyelenggara/pelaksana program/kegiatan	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.222.116.919</b>	<b>2.193.334.919</b>	
	<b>Surplus/defisit</b>	<b>344.236.081</b>	<b>344.236.081</b>	
		<b>(344.236.081)</b>	<b>(344.236.081)</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.763.919</b>	<b>5.763.919</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.763.919</b>	<b>5.763.919</b>	PAD
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.1.4	Penerimaan Piutang	350.000.000	350.000.000	
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	350.000.000	350.000.000	Pihak III
3.2.3	Pembayaran hutang	(344.236.081)	(344.236.081)	
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Silpa tahun berjalan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ponggok, tanggal 22 Oktober 2015  
 KEPALA DESA  
 PONGGOK  
 H. JUNACHI MILYONO, SH

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PONGGOK  
 NOMOR 04 TAHUN 2016  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN  
 PEMERINTAH DESA PONGGOK  
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE KELASIFIKASI	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG ( Rp. )	PROSENTASE ( % )	KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN ( Rp. )	SETELAH PERUBAHAN ( Rp. )			
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.925.353.951</b>	<b>3.159.902.051</b>	<b>234.548.100</b>	<b>8</b>	
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<i>355.500.000</i>	<i>350.000.000</i>	<i>(5.500.000)</i>	<i>1,5</i>	
1	Hasil Usaha	334.700.000	329.200.000	(5.500.000)	1,5	
1 1	Tanah Kas Desa/BUMDes	210.000.000	192.500.000	(17.500.000)	8,3	PAD
1 2	Hasil Bengkok Tanah Kas Desa	41.400.000	41.400.000	0	0	PAD
1 3	Kios Desa	300.000	300.000	0	0	PAD/Ngebakan
1 4	Bangunan Milik Desa	65.000.000	70.000.000	5.000.000	7,7	PAD/Balai Desa
1 5	Lapangan Milik Desa	0	0	0	0	
1 6	Pasar Desa	0	0	0	0	
1 7	Tanamar. Milik Desa	0	0	0	0	
1 8	Lain-lain Kekayaan Desa	18.000.000	25.000.000	7.000.000	38,8	Banyu Mili, Parkir & Kursi
2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	20.000.000	20.000.000	0	0	kursi,knap&dopo
2 1	Swadaya/Gotong royong berupa uang atau barang/tenaga	20.000.000	20.000.000	0	0	Tenaga
3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	800.000	800.000	0	0	
3 1	Jasa Giro dan pendapatan Bunga Bank	800.000	800.000	0	0	PAD
3 2	Komis, Potongan bentuk lain akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh desa					
	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>1.045.853.951</i>	<i>1.285.902.051</i>	<i>240.048.100</i>	<i>23</i>	
1	Dana Desa	622.188.000	622.188.000	0	0	APBN/DO

* THR Kades, Perangkat Desa, Kebersihan, Penjaga & Taman	✓	✗	8.000.000	10.000.000	2.000.000	25	PAD
* Sembako Hari Raya Idul Fitri	✓	✗	6.000.000	4.000.000	(2.000.000)	33	PAD
* Bantuan - bantuan	✓	✗	10.000.000	15.000.000	5.000.000	50	PAD
* BPJS Kades (ADD : 720.000 PAD : 480.000 )	✓	✗	1.080.000	1.200.000	120.000	11	ADD/PAD
* BPJS Perangkat Desa ( ADD : 1.728.000 PAD : 1.152.000 )	✓	✗	2.592.000	2.880.000	288.000	11	ADD/PAD
* Penyertifikatan tanah kas desa	✓	✗	20.000.000	20.000.000	0	0	Pihak III
* Pemeliharaan Kendaraan Dinas ( ADD : 400.000 PAD : 4.600.000 )	✓	✗	3.000.000	5.000.000	2.000.000	66	PAD/ADD
* Operasional KPMD	✗	✗	5.000.000	5.000.000	0	0	Propinsi
* Pengadaan program Sikedes	✗	✗	7.500.000	7.500.000	0	0	ADD
* Bingkisan Purna tugas RT & RW	✗	✗	0	7.200.000	7.200.000	100	PAD
* Biaya pemilihan Direktur & BP BUMDes Tirta Mandiri	✗	✗	0	11.000.000	11.000.000	100	Pihak III
* Biaya pemilihan RT & RW	✗	✗	0	1.500.000	1.500.000	100	PAD
Belanja Modal : ADD: 41.950.000 PAD: 100.025.000 Pajak: 6.975.000			<b>148.950.000</b>	<b>224.912.000</b>	<b>75.962.000</b>	<b>51</b>	<b>ADD/PAD/Pajak/rst</b>
- Komputer	✗	✗	5.000.000	5.890.000	890.000	17	ADD
- Meja dan Kursi	✗	✗	60.000.000	0	(60.000.000)	100	PAD
- Mesin potong rumput	✗	✗	2.500.000	1.880.000	(620.000)	24	ADD
* Almari Piala / Interior Kantor ( Pajak : 5.475.000 PAD : 138.575.000 )	✗	✗	33.000.000	144.050.000	111.050.000	339	Pihak III/Pajak/ristribusi
* Pengadaan sound sistem	✗	✗	10.000.000	20.000.000	10.000.000	100	PAD
* Pengadaan ruang BPD, PKK & LPMD	✗	✗	34.950.000	34.950.000	0	0	ADD
* Kipas angin	✓	✗	1.500.000	1.500.000	0	0	Pajak/ristribusi
* Printer	✗	✗	2.000.000	1.565.000	(435.000)		ADD
* Lemari es	✗	✗	0	2.800.000	2.800.000		PAD
* Website Desa	✗	✗	0	8.810.000	8.810.000		PAD
* Pemasangan meteran listrik baru 1300VA taman	✗	✗	0	3.467.000	3.467.000		PAD
Operasional BPD			<b>21.950.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Belanja Barang dan Jasa :			21.950.000	21.950.000	0	0	
* Alat Tulis Kantor			780.000	780.000	0	0	PAD
* Konsumsi Rapat			1.470.000	1.470.000	0	0	PAD
* THR BPD ( ADD : 1.750.000 PAD : 1.750.000 )			3.500.000	3.500.000	0	0	ADD/PAD
* Pakaian dinas dan atribut			2.100.000	2.100.000	0	0	PAD
* Perjalanan dinas ( ADD : 700.000 PAD : 800.000 )			1.500.000	1.500.000	0	0	ADD/PAD
			<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pihak III</b>



			• Pralon 6"						
			• Keni 6"	7.020.000	7.020.000				
			• Lem Pralon	450.000	450.000	0	0		
			• Bata merah	315.000	315.000	0	0		
			• Benang	700.000	700.000	0	0		
				10.000	10.000	0	0		
2	10		Pembangunan Cor Jalan beton Kiringan						
2	10	2	Belanja Barang dan Jasa :	70.280.000	70.280.000	0	0	Dana Desa	
			• Upah Kerja	15.800.000	15.800.000	0	0		
			• Peralatan	12.400.000	12.400.000	0	0		
			• Konsumsi pekerja	2.400.000	2.400.000	0	0		
				1.000.000	1.000.000	0	0		
2	10	3	Belanja Modal :	54.480.000	54.480.000	0	0		
			• Semen	24.000.000	24.000.000	0	0		
			• Pasir	9.600.000	9.600.000	0	0		
			• Kerikil	20.880.000	20.880.000	0	0		
2	11		Pembangunan Cor Jalan beton Umbulsari	37.040.000	37.040.000	50.000.000	235	Dana Desa (37.040.000)	
2	11	2	Belanja Barang dan Jasa :	9.800.000	31.200.000	21.400.000	0	Pihak III (50.000.000)	
			• Upah Kerja	7.400.000	29.000.000	21.600.000	0		
			• Peralatan	1.200.000	1.200.000	0	0		
			• Konsumsi pekerja	1.200.000	-	(1.200.000)	0		
			• Sewa molen	-	1.000.000	1.000.000	0		
				27.240.000	55.840.000	0	0		
2	11	3	Belanja Modal :	12.000.000	23.130.000	0	0		
			• Semen	4.800.000	14.400.000	0	0		
			• Pasir	10.440.000	17.400.000	0	0		
			• Kerikil	-	200.000	0	0		
			• Prasasti	-	150.000	0	0		
			• Papan Pengumuman	-	560.000	0	0		
			• Kayu kaso	-	-	0	0	Dana Desa	
				7.729.000	7.729.000	0	0		
2	2	12	Pembangunan TK/PAUD	1.560.000	1.560.000	0	0		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa :					

2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota/OMAC	65.000.000	15.048.100	(49.951.900)	76,8	Kab
3	Alokasi Dana Desa	322.547.000	322.547.000	0	0	APBD/ADD
4	Bantuan Keuangan	<b>36.118.951</b>	<b>326.118.951</b>	<b>290.000.000</b>	<b>802</b>	
4 1	Bantuan Provinsi	5.000.000	5.000.000	0	0	Prop
4 2	Bantuan Kabupaten/Kota	10.000.000	300.000.000	290.000.000	2900	Kab
4 3	Bagi Hasil Pajak	16.689.769	16.689.769	0	0	Kab
4 4	Bagi Hasil Ristribusi	4.429.182	4.429.182	0	0	Kab
	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.524.000.000</b>	<b>1.524.000.000</b>	0	0	
1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	PT. TIV
2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	24.000.000	24.000.000	0	0	POAM & Nganjat
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.925.353.951</b>	<b>3.159.902.051</b>	<b>234.548.100</b>	<b>8</b>	
	<b>BELANJA</b>	<b>2.934.049.572</b>	<b>3.168.597.672</b>	<b>234.548.100</b>	<b>8</b>	
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>1.818.130.572</b>	<b>1.648.810.672</b>	<b>(169.319.900)</b>	<b>1</b>	
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	286.200.000	286.200.000	0		
1 1	Belanja Pegawai :	286.200.000	286.200.000	0		
	• Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0		ADD
	• Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ( Non PNS )	0	0	0		
	• Penghasilan Tetap Perangkat Desa	86.400.000	86.400.000	0		ADD
	• Tunjangan Kepala Desa ( PAD :15.600.000 Bengkulu :15.000.000 )	30.600.000	30.600.000	0		Pihak III/Bengkok
	• Tunjangan SekDes ( PNS ) ( PAD : 13.200.000 Bengkulu : 2.400.000 )	15.600.000	15.600.000	0		Pihak III/Bengkok
	• Tunjangan Perangkat Desa ( PAD ; 60.000.000 Bengkulu :24.000.000 )	84.000.000	84.000.000	0		Pihak III/Bengkok
	• Tunjangan BPD	33.600.000	33.600.000	0		ADD
2	Operasional Perkantoran	664.829.572	575.861.172	(88.968.400)	14	
2 2	Belanja Barang dan Jasa	664.829.572	575.861.172	(88.968.400)	14	
	• Alat Tulis Kantor ( ADD : 1.289.000 PAD;5.711.000 Pajak: 2.000.000 )	7.000.000	9.000.000	2.000.000	28	PAD/ADD/Pajak/retribusi
	• Benda Pos	720.000	720.000	0	0	PAD
	• Pakaian Dinas dan Atribut	2.400.000	2.400.000	0	0	PAD
	• Alat dan Bahan Perkantoran ( ADD :6.200.000 PAD; 6.300.000 )	10.000.000	12.500.000	2.500.000	25	ADD/PAD

* Perjalanan Dinas ( ADD : 1.000.000 PAD : 10.000.000)	✓	X	9.500.000	11.000.000	1.500.000	15	ADD/PAD
* Pemeliharaan & Perbaikan ( PAD :6.500.000 Pajak : 1.000.000 )	✓	X	5.000.000	7.500.000	2.500.000	50	PAD/Pajak/distribusi
* Listrik, air, telephone (Pajak : 2.025.000 PAD : 5.638.440 )	✓	X	7.711.440	7.711.440	0	0	PAD/Pajak/distribusi
* Makanan dan minuman ( ADD : 1.685.000 PAD : 43.315.000)	✓	X	40.000.000	45.000.000	5.000.000	12	PAD/ADD
* Surat Kabar	✓	X	3.480.000	3.480.000	0	0	PAD
* Pajak PBB Tanah Kas Desa ( Pajak : 1.118.951 PAD : 2.627.181 )	✓	X	3.746.132	3.746.132	0	0	PAD/Pajak/distribusi
* Kalender Desa	✓	X	500.000	500.000	0	0	PAD
* Biaya jasa transaksi Keuangan	✓	X	600.000	600.000	0	0	cetak di rek bank
* Insentif petugas pemungut PBB	✓	X	8.000.000	8.000.000	0	0	Pajak/distribusi Kab
* Pemberian uang kepada mahasiswa	✓	X	93.000.000	80.000.000	(13.000.000)	14	Pihak III
* HUT RI dan Hari Besar keagamaan	✓	X	50.000.000	50.000.000	0	0	Pihak III
* Honor koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa ( PTPKD )	✓	X	12.000.000	12.000.000	0	0	PAD
* Honor Bendahara Desa	✓	✓	14.400.000	14.400.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan Monografi	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan Profil Desa	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan RPJMDes	X	—	0	0	0	0	PAD
* Honor Penyusunan review RPJMDes	X	—	0	0	0	0	PAD
* Honor Penyusunan RKPDes	✓	—	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan perubahan RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Penyusunan pertanggungjawaban RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
* Honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	X	57.600.000	33.600.000	(24.000.000)	42	Pihak III
* Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )	✓	X	14.400.000	14.400.000	0	0	ADD
* Honor lembur & pendataan program desa	✓	X	3.000.000	3.000.000	0	0	PAD
* Honor Petugas kebersihan kantor	✓	X	8.400.000	8.400.000	0	0	PAD
* Honor penjaga malam kantor desa	X	—	3.600.000	3.600.000	0	0	PAD
* Honor Petugas Kader Kesehatan	✓	X	3.600.000	3.600.000	0	0	PAD
* Honor Petugas pemeliharaan taman/Sanitasi	✓	X	1.000.000	0	(1.000.000)	100	PAD
* Honor Petugas DPU Desa	X	—	33.000.000	43.923.600	10.923.600	33	PAD
* Pajak kendaraan dinas ( ADD : 250.000 PAD : 2.750.000 )	✓	X	3.000.000	3.000.000	0	0	PAD/ADD
* Jaminan kesehatan BPJS warga	✓	X	153.000.000	49.000.000	(104.000.000)	70	Pihak III
* Jaminan sosial Perangkat Desa	✓	X	25.000.000	25.000.000	0	0	Pihak III
* Cetak & Penggandaan ( ADD : 1.440.000 PAD : 2.060.000 )	✓	X	2.000.000	3.500.000	1.500.000	75	PAD/ADD
* Uang saku rapat ( ADD : 4.000.000 PAD : 16.000.000 )	X	—	20.000.000	20.000.000	0	0	PAD/ADD

	* Pasir	600.000	600.000	0	0	
	* Pralon	6.500.000	6.500.000	0	0	
	* Prasasti	200.000	200.000	0	0	
	* Lem Pralon	315.000	315.000	0	0	
	* Keni	150.000	150.000	0	0	
	Pembangunan Sumur pantek RW III	<b>20.045.000</b>	<b>20.045.000</b>	0	0	Dana Desa
	Belanja Barang dan Jasa :	16.250.000	16.250.000	0	0	
	* Upah Kerja	11.250.000	11.250.000	0	0	
	* Honor Tim	0	0	0	0	
	* Sewa alat	5.000.000	5.000.000	0	0	
	Belanja Modal :	3.795.000	3.795.000	0	0	
	* Solar	1.005.000	1.005.000	0	0	
	* Pralon	2.580.000	2.580.000	0	0	
	* Lem	210.000	210.000	0	0	
	* Prasasti	0	0	0	0	
		<b>100.000.000</b>	<b>48.476.000</b>	(51.524.000)	48	Pihak III
	Pembangunan 1 Gapuro	33.250.000	16.040.000	(17.210.000)		
2	Belanja Barang dan Jasa :	33.250.000	16.040.000	(17.210.000)		
	* Upah Kerja		-	0		
	* Biaya Operasional	66.750.000	32.436.000	(34.314.000)		
3	Belanja Modal :	9.600.000	2.200.000	(7.400.000)		
	* Semen	5.600.000	2.200.000	(3.400.000)		
	* Pasir	2.800.000	1.600.000	(1.200.000)		
	* Batu batc	1.500.000	300.000	(1.200.000)		
	* Peralatan kerja	15.400.000	8.000.000	(7.400.000)		
	* Batu alam	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)		
	* Papan nama	6.800.000	5.950.000	(850.000)		
	* Batu alam hias	3.750.000	1.812.000	(1.938.000)		
	* Besi 12"	300.000	300.000	(600.000)		
	* Besi 6"	400.000	74.000	(326.000)		
	* Bendrat					
		<b>250.000.000</b>	<b>67.005.500</b>	(182.994.500)	73	Pihak III
4	Pembangunan Banyu Milli					

			* Upah Kerja						
			* Honor Tim	1.560.000	1.560.000	0	0		
			* Konsumsi pekerja	0	0	0	0		
				0	0	0	0		
12	3		Belanja Modal :						
			* Genteng	6.169.000	6.169.000	0	0		
			* Selot	165.000	165.000	0	0		
			* Daun Pintu	240.000	240.000	0	0		
			* Almari Piagam & Piala	1.500.000	1.500.000	0	0		
			* Rangka Plapon	1.000.000	1.000.000	0	0		
			* Plapon	1.680.000	1.680.000	0	0		
				1.584.000	1.584.000	0	0		
2	13		Pembangunan Tempat Bolo Pecah Umbulsari	<b>10.650.000</b>	<b>10.650.000</b>	0	0		Dana Desa
2	13	2	Belanja Barang dan Jasa :	3.800.000	3.800.000	0	0		
			* Upah Kerja	3.800.000	3.800.000	0	0		
			* Peralatan	0	0	0	0		
			* Konsumsi pekerja	0	0	0	0		
2	13	3	Belanja Modal :	6.850.000	6.850.000	0	0		
			* Semen	2.100.000	2.100.000	0	0		
			* Pasir	1.400.000	1.400.000	0	0		
			* Sirtu	1.350.000	1.350.000	0	0		
			* Asbes	2.000.000	2.000.000	0	0		
				0	<b>83.700.000</b>	<b>83.700.000</b>			100 Kab & PAD
2	14		Perbaikan saluran irigasi dan jin desa ( Kab : 80.000.000	0	<b>28.000.000</b>	<b>27.800.000</b>			
2	14	2	Belanja Barang dan Jasa : PAD : 3.700.000 )	0	28.000.000	27.800.000			
			* Upah Kerja	0	0	0			
			* Konsumsi pekerja						
				0	<b>55.700.000</b>	<b>55.900.000</b>			
2	14	3	Belanja Modal :	0	18.270.000	18.500.000			
			* Semen	0	14.400.000	14.300.000			
			* Pasir	0	22.400.000	22.450.000			
			* Batu	0	275.000	300.000			
			* Peralatan kerja	0					

24		Pembangunan Jalan beton RW V						
24	2	Belanja Barang dan Jasa :	0	18.324.000	18.324.000	100	Dana Desa	
		• Upah Kerja	0	6.404.000	6.404.000			
		• Peralatan	0	6.040.000	6.040.000			
		• Kayu	0	250.000	250.000			
			0	114.000	114.000			
24	3	Belanja Modal :						
		• Semen	0	11.920.000	11.920.000			
		• Pasir	0	4.365.000	4.365.000			
		• Kerikil	0	1.200.000	1.200.000			
		• Prasasti	0	200.000	200.000			
		• Papan Pengumuman	0	150.000	150.000			
		• Batu kali	0	2.400.000	2.400.000			
		• Benang	0	5.000	5.000			
25		Pembangunan Besuki & sigedang	0	38.000.000	38.000.000	100	Pihak III	
25	2	Belanja Barang dan Jasa :	0	28.000.000	28.000.000			
		• Upah Kerja	0	28.000.000	28.000.000			
		• Peralatan	0	0	0			
			0	10.000.000	10.000.000			
25	3	Belanja Modal :	0	5.000.000	5.000.000			
		• Besi	0	5.000.000	5.000.000			
		• Ganti rugi bangunan						
			167.300.000	127.200.000	(40.600.000)	39	ADD	
3		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	12.800.000	12.800.000	0	0	ADD	
3	1	Kegiatan Pelatihan Linmas Desa	12.800.000	12.800.000	0	0	ADD	
3	1 2	Belanja Barang dan Jasa :	500.000	500.000	0	0	ADD	
		• Honor Pelatih	1.500.000	1.500.000	0	0	ADD	
		• Transport peserta	300.000	300.000	0	0	ADD	
		• Konsumsi	10.500.000	10.500.000	0	0	ADD	
		• Seragam	75.000.000	54.400.000	(20.600.000)	27	Pihak III	
3	2	Kegiatan Keagamaan						

			• Peralatan					
			• Konsumsi pekerja					
				0	0	0		
				0	0	0		
2	17	3	Belanja Modal :					
			• Besi	0	6.950.000	6.950.000		
			• Pasir	0	6.950.000	6.950.000		
			• Split	0	0	0		
				0	0	0		
2	18		Pembangunan Bak air kiringan					
2	18	2	Belanja Barang dan Jasa :	0	28.450.500	28.450.500	100	Prakt III
			• Upah Kerja	0	9.890.000	9.600.000		
			• Peralatan	0	9.690.000	9.400.000		
			• Konsumsi pekerja	0	200.000	200.000		
				0	-	-		
2	18	3	Belanja Modal :	0	18.560.500	18.850.500		
			• Semen	0	3.150.000	4.015.000		
			• Pasir	0	3.600.000	3.600.000		
			• Pralon	0	750.000	750.000		
			• Prasasti	0	200.000	200.000		
			• Lem Pralon	0	425.000	200.000		
			• Keni	0	150.000	150.000		
			• Bata merah	0	2.400.000	2.100.000		
			• Kayu	0	3.335.500	4.335.500		
			• Genteng & kerpus	0	1.200.000	1.000.000		
			• Paku	0	50.000	100.000		
			• Batu kali	0	2.400.000	2.400.000		
			• Batu kali	0	900.000	900.000		
			• Besi	0	31.297.000	31.297.000	100	Prakt III
				0	10.460.000	10.460.000		
2	2	19	Pembangunan Bak Air Umbulsari	0	10.260.000	10.260.000		
2	2	19	2 Belanja Barang dan Jasa :	0	200.000	200.000		
			• Upan Kerja	0	0	0		
			• Peralatan	0	20.837.000	20.837.000		
			• Konsumsi pekerja	0	3.420.000	3.420.000		
2	2	19	3 Belanja Modal :					
			• Semen					

		• Upah Kerja					
		• Honor Tim	13.080.000	13.080.000	0	0	
		• Konsumsi pekerja	0	0	0	0	
3		Belanja Modal :	0	0	0	0	
		• Semen	49.400.000	49.400.000	0	0	
		• Pasir	15.000.000	15.000.000	0	0	
		• Bata	10.800.000	10.800.000	0	0	
		• Peralatan kerja/Karpet	23.600.000	23.600.000	0	0	
		• Prasasti	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		Pembangunan Saluran Limbah RW III	14.245.000	14.245.000	0	0	Dana Desa
2		Belanja Barang dan Jasa :	3.760.000	3.760.000	0	0	
		• Upah Kerja	3.220.000	3.220.000	0	0	
		• Peralatan	200.000	200.000	0	0	
		• Konsumsi pekerja	340.000	340.000	0	0	
3		Belanja Modal :	10.485.000	10.485.000	0	0	
		• Semen	1.200.000	1.200.000	0	0	
		• Pasir	600.000	600.000	0	0	
		• Pralon 6"	7.020.000	7.020.000	0	0	
		• Keni 6"	450.000	450.000	0	0	
		• Lem Pralon	315.000	315.000	0	0	
		• Bata merah	700.000	700.000	0	0	
		• Prasasti	200.000	200.000	0	0	
			14.245.000	14.245.000	0	0	Dana Desa
9		Pembangunan Saluran Limbah RW IV	3.770.000	3.770.000	0	0	
9	2	Belanja Barang dan Jasa :	3.220.000	3.220.000	0	0	
		• Upah Kerja	200.000	200.000	0	0	
		• Peralatan	350.000	350.000	0	0	
		• Konsumsi pekerja					
			10.475.000	10.475.000	0	0	
9	3	Belanja Modal :	1.380.000	1.380.000	0	0	
		• Semen	600.000	600.000	0	0	
		• Pasir					



* Pasir					
* Pralon	0	4.400.000	4.400.000		
* Prasasti	0	750.000	750.000		
* Lem Pralon	0	200.000	200.000		
* Keni	0	425.000	425.000		
* Bata merah	0	150.000	150.000		
* Kayu	0	2.400.000	2.400.000		
* Genteng & kerpus	0	3.342.000	3.342.000		
* Paku	0	1.200.000	1.200.000		
* Batu kali	0	50.000	50.000		
* Besi	0	3.600.000	3.600.000		
	0	900.000	900.000		
Pembangunan Saluran Air bersih ( PAM ) & limbah Umbulsari	0	195.000.000	195.000.000	100	Dana Desa
Belanja Barang dan Jasa :	0	64.700.000	64.700.000		
* Upah Kerja	0	64.200.000	64.200.000		
* Peralatan	0	500.000	500.000		
* Konsumsi pekerja	0	-	-		
Belanja Modal :	0	130.300.000	130.300.000		
* Pralon	0	87.500.000	87.500.000		
* Pasir & bata merah	0	7.600.000	7.600.000		
* Besi	0	13.500.000	13.500.000		
* Semen	0	2.925.000	2.925.000		
* Water meter	0	13.500.000	13.500.000		
* Keni	0	3.225.000	3.225.000		
* Papan Pengumuman	0	150.000	150.000		
* Prasasti	0	200.000	200.000		
* Lem	0	1.700.000	1.700.000		
	0	50.000.000	50.000.000	100	Pinak III
Pembangunan Tiang listrik Kiringan & Umbulsari	0	15.000.000	15.000.000		
Belanja Barang dan Jasa :	0	15.000.000	15.000.000		
* Upah Kerja	0	0	0		
* Peralatan	0	0	0		
* Konsumsi pekerja	0	0	0		

	Insentif RT/RW	513.000.000	213.000.000	(300.000.000)	29	
2	Belanja Barang dan Jasa :	513.000.000	213.000.000	(300.000.000)		
	• Alat Tulis Kantor RT/RW	0	0	0		
	• Konsumsi Rapat RT/RW	0	0	0		
	• THR Ketua RT/RW ( ADD : 4.500.000 PAD : 4.500.000 )	9.000.000	9.000.000	0		ADD/PAD
	* Honor RT/RW ( ADD : 21.600.000 PAD : 28.400.000 )	54.000.000	54.000.000	0		ADD/PAD
	* Stimulan RW	450.000.000	150.000.000	(300.000.000)		Pihak III
	Pembangunan Gudang, Pentri & Pintu Balai Desa	183.201.000	326.887.500	143.686.500	78	Pihak III
2	Belanja Barang dan Jasa :	48.400.000	107.000.000	58.600.000		
	• Upah Kerja	48.400.000	107.000.000	58.600.000		
	• Konsumsi pekerja	-	-	-		
3	Belanja Modal :	134.801.000	219.887.500	85.086.500		
	• Pasir & Urug	16.800.000	6.800.000	(10.000.000)		
	• Semen	24.000.000	2.745.000	(21.255.000)		
	• Batu Bata	4.200.000	-	(4.200.000)		
	• Besi	9.790.000	23.250.000	13.460.000		
	• Panggung Balai Desa	30.000.000	81.200.000	51.200.000		
	• Pintu	20.000.000	7.500.000	(12.500.000)		
	* Atap bangunan	30.000.000	35.440.500	5.440.500		
	* benang	11.000	16.000	5.000		
	* Rilling	0	30.800.000	30.800.000	100	
	* Pengecatan	0	32.136.000	32.136.000	100	
		662.819.000	1.167.317.000	504.498.000	58	
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
		11.485.000	11.485.000	0	0	Dana Desa
1	Pembangunan RW II Saluran limbah	2.820.000	2.820.000	0	0	
1 2	Belanja Barang dan Jasa :	2.480.000	2.480.000	0	0	
	• Upah Kerja	200.000	200.000	0	0	
	• Peralatan	140.000	140.000	0	0	
	• Konsumsi pekerja	8.665.000	8.665.000	0	0	
1 3	Belanja Modal :	900.000	900.000	0	0	
	• Semen					

2	2	Belanja Barang dan Jasa :					
		• Peringatan Hari Besar Islam	75.000.000	54.400.000	(20.600.000)		
		• Pembelian peralatan masjid RW III	45.000.000	13.000.000	(32.000.000)		
		• Tarling tingkat desa	6.400.000	6.400.000	0		
		• Sosial keagamaan ( Fasi & Khitanan masal)	3.000.000	0	(3.000.000)		
		• Kegiatan masjid rohmad kiringan	5.000.000	0	(5.000.000)		
		• Kegiatan masjid Al-Masyurin RW III	15.600.000	15.000.000	(600.000)		
			0	20.000.000	20.000.000		
3	3	Kegiatan Peningkatan Prasarana Olahraga	80.000.000	60.000.000	(20.000.000)	25	PAD/USB
3	3	2 Belanja Barang dan Jasa :	80.000.000	60.000.000	(20.000.000)	25	
		• Alat-alat olahraga / seragam ( PAD : 20.000.000 Kab : 10.000.000 )	30.000.000	30.000.000	0	0	PAD/USB
		• Modal usaha Pemuda	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	40	Pusat II
4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	273.300.000	223.300.000	(50.000.000)	81	PAD/ADD/SD
4	1	Kegiatan PKK dan Posyandu	32.300.000	32.300.000	0	0	
4	1	2 Belanja Barang dan Jasa :	32.300.000	32.300.000	0	0	
		• Desa Binaan PKK ( ADD : 12.000.000 PAD : 8.000.000 )	20.000.000	20.000.000	0	0	PAD/ADD
		• Makan dan Minum PKK dan Posyandu	0	0	0	0	
		• ATK PKK	7.500.000	7.500.000	0	0	ADD
		• Revisi Posyandu	4.800.000	4.800.000	0	0	Desa Desa
		• Senam sehat					Desa Desa (Pusat II)
			157.000.000	157.000.000	0	0	Desa Desa (Pusat II)
4	2	Kegiatan Pelatihan ( DD : 57.000.000 pad : 100.000.000 )	157.000.000	157.000.000	0	0	Desa Desa
4	2	2 Belanja Barang dan Jasa :	3.000.000	3.000.000	0	0	Desa Desa
		• Honor Narasumber	6.000.000	6.000.000	0	0	Desa Desa
		• Transport Peserta	45.000.000	45.000.000	0	0	Desa Desa
		• Bahan / alat Pelatihan	3.000.000	3.000.000	0	0	Pusat II
		• Kunsumsi Pelatihan	100.000.000	100.000.000	0	0	
		• Modal Usana PKK & Posyandu					ADD
			60.000.000	10.000.000	(50.000.000)	85	ADD
			60.000.000	10.000.000	(50.000.000)	85	ADD
			53.000.000	3.000.000	(50.000.000)	94	ADD
2	4	3 Kegiatan Lembaga Desa					
2	4	3 2 Belanja Barang dan Jasa :					
		• Bantuan LPMD ( ADD : 3.000.000 PAD : 50.000.000 )					

				* Prasasti	0	200.000	200.000		
				* Papan pengumuman	0	150.000	150.000		
				* Benang	0	5.000	5.000		
2	2	15		Pembangunan Aspal RW I	0	100.000.000	100.000.000	100	Kab
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa :	0				
				• Upah Kerja	0	42.270.000	42.270.000		
				• Peralatan	0	31.000.000	31.000.000		
				• Sewa wales	0	150.000	150.000		
				• Bahan Bakar	0	10.000.000	10.000.000		
2	2	15	3	Belanja Modal :	0	1.120.000	1.120.000		
				• Aspal	0	57.730.000	57.730.000		
				• Pasir	0	47.505.000	47.505.000		
				• Kayu bakar	0	4.650.000	4.650.000		
				• Papan pengumuman	0	5.200.000	5.200.000		
				• Kayu reng	0	150.000	150.000		
				• Prasasti	0	25.000	25.000		
					0	200.000	200.000		
2	2	16		Pembangunan Cor Jalan beton timur Kiringan	0	100.000.000	100.000.000	100	Kab
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa :	0	34.550.000	34.550.000		
				• Upah Kerja	0	34.200.000	34.200.000		
				• Peralatan	0	350.000	350.000		
				• Konsumsi pekerja	0				
					0	65.450.000	65.450.000		
2	2	16	3	Belanja Modal :	0	27.000.000	27.000.000		
				• Semen	0	16.800.000	16.800.000		
				• Pasir	0	21.000.000	21.000.000		
				• Split	0	200.000	200.000		
				• Prasasti	0	150.000	150.000		
				• Papan pengumuman	0	300.000	300.000		
				• Kayu	0	10.000.000	10.000.000	100	Kab
					0	3.050.000	3.050.000		
2	2	17		Pembangunan Dopo	0	3.050.000	3.050.000		
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa :	0				
				• Upah Kerja	0				

2	21	3	Belanja Modal :					
			• Besi	0	35.000.000	35.000.000		
			• Kabel	0	30.000.000	30.000.000		
				0	5.000.000	5.000.000		
2	22		Pembangunan Saluran Limbah RW I					
2	22	2	Belanja Barang dan Jasa :	0	14.245.000	14.245.000	100	Dana Desa
			• Upah Kerja	0	3.420.000	3.420.000		
			• Peralatan	0	3.220.000	3.220.000		
			• Konsumsi pekerja	0	200.000	200.000		
				0	-			
2	22	3	Belanja Modal :	0	10.825.000	10.825.000		
			• Semen	0	1.380.000	1.380.000		
			• Pasir	0	600.000	600.000		
			• Pralon 6"	0	7.020.000	7.020.000		
			• Keni 6"	0	450.000	450.000		
			• Lem Pralon	0	315.000	315.000		
			• Bata merah	0	700.000	700.000		
			• Benang	0	10.000	10.000		
			• Prasasti	0	200.000	200.000		
			• Papan Pengumuman	0	150.000	150.000		
				0	20.000.000	20.000.000	100	Dana Desa
2	2	23	Pembangunan Cor Jalan beton barat tugiman Kiringan	0	6.870.000	6.870.000		
2	2	23	2 Belanja Barang dan Jasa :	0	6.250.000	6.250.000		
			• Upah Kerja	0	500.000	500.000		
			• Peralatan	0	120.000	120.000		
			• Kayu Kzso	0	13.130.000	13.130.000		
				0	3.780.000	3.780.000		
2	2	23	3 Belanja Modal :	0	4.800.000	4.800.000		
			• Semen	0	4.200.000	4.200.000		
			• Pasir	0	200.000	200.000		
			• Kerikil	0	150.000	150.000		
			• Prasasti					
			• Papan Pengumuman					

4	2	Belanja Barang dan Jasa :					
		• Upah Kerja	74.820.000	18.300.000	(56.520.000)		
		• Konsumsi pekerja	74.820.000	18.300.000	(56.520.000)		
			-	-			
4	3	Belanja Modal :					
		• Semen	175.180.000	48.705.500	(126.474.500)		
		• Cat	51.180.000	3.652.000	(47.528.000)		
		• Batu	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)		
		• Peralatan kerja & Servis	30.000.000	1.500.000	(28.500.000)		
		• Batu Bata/Paku	37.000.000	23.505.500	(13.494.500)		
			7.000.000	48.000	(6.952.000)		
5		Pembangunan Talud sungai jeblogan	<b>12.640.000</b>	<b>12.640.000</b>	0	0	Dana Desa
5	2	Belanja Barang dan Jasa :	2.640.000	2.640.000	0	0	
		• Upah Kerja	2.640.000	2.640.000	0	0	
		• Konsumsi pekerja	0	0	0	0	
5	3	Belanja Modal :	10.000.000	10.000.000	0	0	
		• Semen	3.000.000	3.000.000	0	0	
		• Pasir	2.200.000	2.200.000	0	0	
		• Batu/Slpit	4.800.000	4.800.000	0	0	
		• Peralatan kerja	0	0	0	0	
		• Prasasti	0	0	0	0	
			<b>51.980.000</b>	<b>51.980.000</b>	0	0	Dana Desa
2	6	Pembangunan Talud sawah selatan tugiman kiringan	10.880.000	10.880.000	0	0	
2	6	2 Belanja Barang dan Jasa :	10.880.000	10.880.000	0	0	
		• Upah Kerja	10.880.000	10.880.000	0	0	
		• Konsumsi pekerja	0	0	0	0	
			41.100.000	41.100.000	0	0	
2	6	3 Belanja Modal :	13.500.000	13.500.000	0	0	
		• Semen	8.000.000	8.000.000	0	0	
		• Pasir	19.600.000	19.600.000	0	0	
		• Split	0	0	0	0	
		• Peralatan kerja	0	0	0	0	
			<b>62.480.000</b>	<b>62.480.000</b>	0	0	Dana Desa
2	7	Pembangunan Talud Sayap Jembatan Kiringan	13.080.000	13.080.000	0	0	
2	7	2 Belanja Barang dan Jasa :					

			• Bantuan LKM						
			• Bantuan Kelompok Tani	2.000.000	2.000.000	0	0		ADD
				5.000.000	5.000.000	0	0		ADD
4	4		Kegiatan Pendidikan SD/TK/PAUD/Madrasah			0	0		ADD
4	4	2	Belanja Barang dan Jasa :	24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
			• ATK dan Fotocopy	24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
			* Honor Guru WB ( ADD : 10.800.000 PAD : 13.200.000 )	0	0	0	0		ADD/PAD
				24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
5			<b>Bidang Tak Terduga</b>						
5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa :	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
			• Honor Tim	0	0		0		
			• Konsumsi	0	0		0		
			• Pemberian barang dan uang	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.934.049.572</b>	<b>3.168.597.672</b>	<b>234.548.100</b>	<b>8</b>		
			<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8.695.621)</b>	<b>(8.695.621)</b>				
			<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>8.695.621</b>	<b>8.695.621</b>	0			
				8.695.621	8.695.621	0			PAD
1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>8.695.621</b>	<b>8.695.621</b>	0			
1	1		SILPA	0	0	0			
1	2		Pencairan Dana Cadangan	0	0	0			
1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	0			
1	4		Piutang Pendapatan	8.695.621	8.695.621	0			
			<b>JUMLAH ( RP )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						

			• Bantuan LKM						
			• Bantuan Kelompok Tani	2.000.000	2.000.000	0	0		ADD
				5.000.000	5.000.000	0	0		ADD
4	4		Kegiatan Pendidikan SD/TK/PAUD/Madrasah			0	0		ADD
4	4	2	Belanja Barang dan Jasa :	24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
			• ATK dan Fotocopy	24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
			* Honor Guru WB ( ADD : 10.800.000 PAD : 13.200.000 )	0	0	0	0		ADD/PAD
				24.000.000	24.000.000	0	0		ADD/PAD
5			<b>Bidang Tak Terduga</b>						
5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa :	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
			• Honor Tim	0	0		0		
			• Konsumsi	0	0		0		
			• Pemberian barang dan uang	12.000.000	1.970.000	(10.030.000)	83		PAD
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.934.049.572</b>	<b>3.168.597.672</b>	<b>234.548.100</b>	<b>8</b>		
			<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8.695.621)</b>	<b>(8.695.621)</b>				
			<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>8.695.621</b>	<b>8.695.621</b>	0			
				8.695.621	8.695.621	0			PAD
1			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>8.695.621</b>	<b>8.695.621</b>	0			
1	1		SILPA	0	0	0			
1	2		Pencairan Dana Cadangan	0	0	0			
1	3		Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	0			
1	4		Piutang Pendapatan	8.695.621	8.695.621	0			
			<b>JUMLAH ( RP )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						



- Perjalanan Dinas ( ADD : 1.000.000 PAD : 10.000.000)	✓	X	9.500.000	11.000.000	1.500.000	35	ADD/PAD
- Pemeliharaan & Perbaikan ( PAD :6.500.000 Pajak : 1.000.000 )	✓	X	5.000.000	7.500.000	2.500.000	50	PAD/Pajak/distribusi
- Listrik, air, telephone (Pajak : 2.025.000 PAD : 5.638.440 )	✓	X	7.711.440	7.711.440	0	0	PAD/Pajak/distribusi
- Makanan dan minuman ( ADD : 1.685.000 PAD : 43.315.000)	✓	X	40.000.000	45.000.000	5.000.000	12	PAD/ADD
- Surat Kabar	✓	X	3.480.000	3.480.000	0	0	PAD
- Pajak PBB Tanah Kas Desa ( Pajak : 1.118.951 PAD : 2.627.181 )	✓	X	3.746.132	3.746.132	0	0	PAD/Pajak/distribusi
- Kalender Desa	✓	X	500.000	500.000	0	0	PAD
- Biaya jasa transaksi Keuangan	✓	X	600.000	600.000	0	0	cetak di rekr bank
- Insentif petugas pemungut PBB	✓	X	8.000.000	8.000.000	0	0	Pajak/distribusi Kab
- Pemberian uang kepada mahasiswa	✓	X	93.000.000	80.000.000	(13.000.000)	14	Pihak III
- HUT RI dan Hari Besar keagamaan	✓	X	50.000.000	50.000.000	0	0	Pihak III
- Honor koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa ( PTPKD )	✓	X	12.000.000	12.000.000	0	0	PAD
- Honor Bendahara Desa	✓	X	14.400.000	14.400.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan Monografi	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan Profil Desa	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan RPJMDes	X	X	0	0	0	0	PAD
- Honor Penyusunan review RPJMDes	X	X	0	0	0	0	PAD
- Honor Penyusunan RKPDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan perubahan RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Penyusunan pertanggungjawaban RAPBDes	✓	X	1.000.000	1.000.000	0	0	PAD
- Honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	X	57.600.000	33.600.000	(24.000.000)	42	Pihak III
- Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )	✓	X	14.400.000	14.400.000	0	0	ADD
- Honor lembur & pendataan program desa	✓	X	3.000.000	3.000.000	0	0	PAD
- Honor Petugas kebersihan kantor	✓	X	8.400.000	8.400.000	0	0	PAD
- Honor penjaga malam kantor desa	X	X	3.600.000	3.600.000	0	0	PAD
- Honor Petugas Kader Kesehatan	✓	X	3.600.000	3.600.000	0	0	PAD
- Honor Petugas pemeliharaan taman/Sanitasi	✓	X	1.000.000	0	(1.000.000)	100	PAD
- Honor Petugas DPU Desa	✓	X	32.000.000	43.923.600	10.923.600	33	PAD
- Honor Petugas DPU Desa	✓	X	3.000.000	3.000.000	0	0	PAD/ADD
- Pajak kendaraan dinas ( ADD : 250.000 PAD : 2.750.000 )	✓	X	3.000.000	3.000.000	0	0	PAD/ADD
- * Jaminan kesehatan BPJS warga	✓	X	153.000.000	49.000.000	(104.000.000)	70	Pihak III
- * Jaminan sosial Perangkat Desa	✓	X	25.000.000	25.000.000	0	0	Pihak III
- * Cetak & Penggandaan ( ADD : 1.440.000 PAD : 2.060.000 )	✓	X	2.000.000	3.500.000	1.500.000	75	PAD/ADD
- * Uang saku rapat ( ADD : 4.000.000 PAD : 16.000.000 )	✓	X	20.000.000	20.000.000	0	0	PAD/ADD

			* Pralon 6"							
			* Keni 6"	7.020.000	7.020.000		0	0		
			* Lem Pralon	450.000	450.000		0	0		
			* Bata merah	315.000	315.000		0	0		
			* Benang	700.000	700.000		0	0		
				10.000	10.000		0	0		
2	10		Pembangunan Cor Jalan beton Kiringan							
2	10	2	Belanja Barang dan Jasa :	70.280.000	70.280.000		0	0		Dana Desa
			* Upah Kerja	15.800.000	15.800.000		0	0		
			* Peralatan	12.400.000	12.400.000		0	0		
			* Konsumsi pekerja	2.400.000	2.400.000		0	0		
				1.000.000	1.000.000		0	0		
2	10	3	Belanja Modal :	54.480.000	54.480.000		0	0		
			* Semen	24.000.000	24.000.000		0	0		
			* Pasir	9.600.000	9.600.000		0	0		
			* Kerikil	20.880.000	20.880.000		0	0		
2	11		Pembangunan Cor Jalan beton Umbulsari	37.040.000	87.040.000	50.000.000	235			Dana Desa ( 37.040.000 )
2	11	2	Belanja Barang dan Jasa :	9.800.000	31.200.000	21.400.000	0			Pihak III ( 50.000.000 )
			* Upah Kerja	7.400.000	29.000.000	21.600.000	0			
			* Peralatan	1.200.000	1.200.000	0	0			
			* Konsumsi pekerja	1.200.000	-	(1.200.000)	0			
			* Sewa molen	-	1.000.000	1.000.000				
				27.240.000	55.840.000	0	0			
2	2	11	3	Belanja Modal :	12.000.000	23.130.000	0	0		
			* Semen	4.800.000	14.400.000	0	0			
			* Pasir	10.440.000	17.400.000	0	0			
			* Kerikil	-	200.000	0	0			
			* Prasasti	-	150.000	0	0			
			* Papan Pengumuman	-	560.000	0	0			
			* Kayu kaso	-	-	0	0			Dana Desa
				7.729.000	7.729.000	0	0			
2	2	12	Pembangunan TK/PAUD	1.560.000	1.560.000		0	0		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa :						



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN POLANHARJO  
DESA PONGGOK**

*Jl. Raya Ponggok No.110 Kode Pos 57474*

**SURAT KETERANGAN**

No : 470 / 057 / IV / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANI SETYADI, S Sos  
NIP : 19660706 200701 1 034  
Jabatan : Sekretaris Desa Ponggok

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AMELIA FERLINA  
Jenis kelamin : Perempuan  
No Mahasiswa : 16919053  
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Indonesia  
Judul Tesis : Peran Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  
Desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Telah mengadakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul Peran Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ponggok kec. Polanharjo Kab. Klaten

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponggok, 02 April 2019

Yani Setyadi, S.Sos  
Sekretaris desa



**YANI SETYADI, S Sos**  
**NIP: 196607062007011034**